

MOESLIMCHOICE



PERSONEL
BADAN
PENYELENGGARA
HAJI MULAI
TERISI

CATATAN
PENEGAKAN HUKUM
KOMISI III DPR

MERETAS
MASA DEPAN
ZAKAT DAN
WAKAF INDONESIA

MENTERI
AGAMA DAN
MASJID
SEMATANG
BORANG

SUMSEL
TETAP
WASPADA
INFLASI

MENAG GERAK CEPAT

NAIK HAJI TURUN ONGKOS

ISSN_2614-2783



Rp 75.000

MOESLIM^{CHOICE}.COM

PORTAL NEWS



ALAMAT REDAKSI/IKLAN
PT. Inter Media Digital
Jalan Raya Kalibata No. 8,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750
Telepon : (021) 791 96781
FAX : (021) 791 96786

EMAIL :
moeslimchoice@gmail.com

FACEBOOK :
[moeslimchoice](https://www.facebook.com/moeslimchoice)

TWITTER :
[@moeslimchoice](https://twitter.com/moeslimchoice)
you tube channel:
[moeslimchoice tv](https://www.youtube.com/moeslimchoice)

MCTV
MOESLIMCHOICE.TV

MOESLIM^{CHOICE}
M A G A Z I N E

moeslimchoice.com

PENANGGUNG JAWAB

H. Usman Rizal

DIREKTUR

HM. Kamel Fahresy SH

PEMIMPIN REDAKSI

Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Hj. Melati Tagore

REDAKTUR PELAKSANA

Rahmat Romli

SEKRETARIS REDAKSI

Niken Rizky Apriandani

REDAKTURIrmayani, Rosyidah Rozali,
Fahmi Jamba, M. Rahmat,
M. Husnie**REDAKTUR BISNIS**.H. M Firmansyah
Muhammad Rizky,
Muhammad Raden Solehin**REPORTER**Mario CH, Aldi Rinaldi,
M. Iqbal, Ida Iryani, M. Yadhi,
Muhammad Fiqri,
Muhammad Khaidir**KEPALA BIRO SUMSEL**

Rahmat Romli

FOTOGRAFER & VIDEOGRAFER

Al Amin

TATA LETAK/COVER

Kosasih Chiko

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Dra. Nur Khamidah

DIVISI PENGEMBANGAN IT

Irvan, Wahyu, M. Fikri

DISTRIBUSI

Itang AB, M. Isro

PERCETAKAN

PT. RESPATIH SAHABAT SEJATI

Isi di luar tanggung jawab
percetakan

>>SALAM REDAKSI

PANJA

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Akhir 2024 masehi tiba beriringan dengan peralihan dari Jumadil Akhir ke Rajab 1446 hijriyah. Toh umat Islam sudah mewacanakan musim haji 2025 meskipun baru beberapa bulan ke depan, pemberangkatan kelompok terbang pertama tiba gilirannya.

Harap maklum ibadah haji sebagai rukun kelima dalam Islam memang memerlukan persiapan awal lebih panjang ini terkait dengan waktu perjalanan dan jarak yang ditempuh para jamaah. Haji reguler setiap tahun umumnya menelan waktu 40 hari pergi pulang. Bukan waktu yang singkat mengingat jarak yang juga relatif jauh antara Indonesia dan Tanah Suci Makkah dan Madinah.

Memasuki hari-hari pertama 2025, Panitia Kerja (Panja) Penyelenggaraan Haji segera mulai bekerja. Lazimnya agenda awal Panja Haji adalah pembahasan mengenai besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebelum mengemukakan kepada calon jamaah haji.

Kabar baik bagi jamaah calon haji, biaya haji pada 2025 berpeluang lebih murah. Namun, kepastiannya tentu saja menunggu simpulan pembahasan Panja Haji. Toh tetap akan muncul pertanyaan, apakah biaya lebih murah seiring dengan kualitas layanan yang seimbang, atau malah lebih baik?

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengemukakan penentuan biaya haji 2025 akan menghitung sejumlah pos pengeluaran yang bisa ditekan. Ia pun menyebutkan, faktor eksternal yang mempengaruhi nilai Bipih, meliputi tingkat inflasi, kurs rupiah terhadap dollar AS maupun SAR, hingga faktor-faktor lainnya.

Pada titik ini kita berharap penentuan ongkos haji 2025 tetap realistis dalam arti terjangkau oleh jamaah umumnya mengingat antrean yang panjang, namun juga memperhitungkan layanan prima karena antrean panjang juga tak mengecualikan jamaah lanjut usia.

Proses penyelenggaraan ibadah haji 1446 hijriyah pada masehi segera berjalan saat lini masa memasuki Januari 2025. Pengalaman demi pengalaman setiap musim haji hendaknya menjadi cermin untuk membentuk pola terbaik bagi jamaah, penyelenggara maupun tuan rumah.

Pemerintah pun mulai merumuskan pola penyelenggaraan baru dengan membentuk Badan Penyelenggara Haji sebagai penyelenggara atau operator. Musim Haji kali ini adalah momentum memisahkan regulator dan operator yang selama ini melekat dengan Kementerian Agama.

Akhirnya, Indonesia yang lazim mengirim kuota jamaah terbanyak selayaknya dapat menjadi contoh bagi jamaah bangsa-bangsa lain. Jumlah jamaah terbanyak beriring dengan kualitas penyelenggaraan terbaik pun akan memudahkan upaya meraih haji mabrur. Insya Allah. ♦

>>COVER EDISI INI

**ALAMAT REDAKSI/IKLAN**

PT. Inter Media Digital
Jalan Raya Kalibata No.
8, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12750

Telepon : (021) 791 96781
FAX : (021) 791 96786

EMAIL :

moeslimchoice@gmail.com

FACEBOOK :

moeslimchoice

TWITTER :

@moeslimchoice

YOU TUBE CHANNEL:

moeslimchoice TV

>>DAFTAR ISI



06



22



48



26

06

LAPORAN UTAMA

Penyelenggaraan ibadah haji 1446 hijriyah segera tiba. Tiada jera untuk memperbaiki penyelenggaraan ritual rukun kelima Islam yang bergulir setiap tahun sekali.

26

SUMSEL SYARIAH

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H., M.S.E mendampingi Menteri Agama Republik Indonesia (RI) Prof. Dr. K.H Nasaruddin Umar, MA meresmikan Masjid Al-Abduh yang didirikan oleh Kapolda Riau Irjen. Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., MH.

22

EKONOMI SYARIAH

Untuk 2024 saja, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (Baznas RI) menargetkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat mencapai Rp41 triliun.

56

BIROKRASI KEMENDAGRI

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyukseskan Pemilu 2024, baik di pusat maupun daerah.



48

KEMENAG

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengajak tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan agar selalu solid dalam membina dan membangun kehidupan keagamaan yang lebih baik untuk kemaslahatan bangsa.

84

PARLEMEN

Bertolak dari catatan sepanjang 2024, masalah penegakan hukum yang menjadi ranah Komisi III DPR tampak akan menjadi perhatian pada 2025 dan selanjutnya. Laporan akhir tahun Komisi III DPR mengarah ke sana.

88

LAPORAN KHUSUS

Indonesia mulai menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dari harga pokok mulai 1 Januari 2025. Semula PPN hanya mencapai 10 dan 11 persen. Dampak utamanya adalah harga yang harus dibayar oleh pembeli, konsumen dikenai tambahan pungutan. Tapi, tidak untuk semua barang dan jasa.

REGULER

- 3 | SALAM REDAKSI
- 18 | UFUK
- 44 | WISATA HALAL
- 68 | KAJIAN
- 76 | KESEHATAN
- 78 | RESENSI
- 80 | INSPIRATIF
- 82 | KOLOM 1
- 98 | KOLOM 2

72

MUALAF

Cristian Gonzales adalah pemain naturalisasi yang jadi salah satu legenda sepak bola Indonesia. Ia tercatat sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi, dan jadi pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang diidolakan.



AGAR PENYELENGGARAAN HAJI LEBIH BAIK LAGI

Penyelenggaraan ibadah haji 1446 hijriyah segera tiba. Tiada jera untuk memperbaiki penyelenggaraan ritual rukun kelima Islam yang bergulir setiap tahun sekali.

Rangkaian penyelenggaraan haji 1446 hijriyah memasuki lini masanya beriringan dengan Tahun Baru Masehi 2026. Di penghujung 2024, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat bersepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M.

Kesepakatan ini tercapai dalam Rapat Kerja (Raker) Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan Komisi VIII DPR RI pada Senin, 30 Desember 2024. Raker di Komplek Parlemen Senayan ini dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang. Tampak hadir Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafii, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, serta sejumlah pejabat eselon I dan II Kementag.

"Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI bersepakat membentuk Panja tentang Biaya Penyelenggaraan

Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M dengan melibatkan Badan Penyelenggara Haji RI, dan secepatnya akan memulai pembahasan asumsi dasar dan komponen BPIH secara intensif dan detail,” kata Marwan, Senin, 30 Desember 2024.

Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyetujui penggunaan uang muka yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk membayar pemesanan zona tenda di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armina) sebesar Saudi Arabia Real (SAR) 159.250.390. Biaya ini dialokasikan untuk 203.320 jamaah dengan harga rata-rata tenda perjamaah sebesar SAR 783,25.

Menag Nasaruddin mengungkapkan sebagai pihak eksekutif pemerintahan dan dan jajaran akan bergerak cepat mengulirkan. “Hari ini kita bisa segera beroperasi untuk booking tempat di Armina. Maka kami lega. Tentu kami bisa mematok tempat itu untuk tidak lagi ditawarkan atau diambil oleh negara lain. Tugas-tugas berikutnya akan kita selesaikan pada rapat Panja yang akan



Ini masih bisa kita dalam, masih banyak unsur-unsur yang bisa kita ganti. Armuzna misalnya, itu masih bisa turun.

datang,” kata Menag.

Ia juga menyatakan komitmennya untuk memberantas penyimpangan yang dilakukan di tanah suci walaupun di tanah air dalam rangka penyelenggaraan haji. “Pemerintah akan berusaha setegas-tegasnya untuk tidak menoleransi segala macam penyimpangan yang dilakukan siapapun di tanah suci maupun di Indonesia. Mari kita introspeksi. Jangan ada yang pernah membisniskan rukun Islam,” tukasnya.

Poin penting lain pada Raker kali ini Komisi VIII DPR dan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar adalah kesepakatan membentuk panitia kerja (panja) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M dengan melibatkan Badan Penyelenggara Haji. Panja tersebut akan secepatnya membahas asumsi dasar dan komponen BPIH 2025.

Menag pun telah menyampaikan usulan anggaran operasional haji 2025. Sumber biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dan nilai manfaat.

Asumsi dasarnya dalam menyusun rancangan besaran BPIH ini dengan mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang rata-rata sebesar Rp 16.000 per dolar AS, serta asumsi kurs SAR terhadap rupiah sebesar Rp 4.266,67.

“Untuk 2025, pemerintah mengusulkan rata-rata rata-rata BPIH per jamaah haji Rp 93.389.684. Komposisinya, Bipih sebesar

Samodra mempertanyakan usulan Kemenag terkait Bipih 2025. Nanang mempertanyakan biaya haji yang dibebankan kepada jamaah haji atau Bipih naik, meskipun total BPIH per jamaah turun.

“Dari segi biaya, memang ada penurunan BPIH dari 93.410.286 pada tahun lalu menjadi 93.389.648,99. Namun yang agak membingungkan, komponen nilai manfaat dan



Rp 65.372.779,49 atau 70 persen, dan nilai manfaat sebesar Rp 28.016.905,5 atau 30 persen,” kata Nasaruddin Umar.

Usulan biaya ini belum final dan masih akan dibahas dalam panja haji bersama Komisi VIII DPR. Sedangkan anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Demokrat Nanang

Bipih-nya ini berbalik, yang tadinya 60 persen Bipih dan nilai manfaat 40 persen, sekarang Bipih-nya naik menjadi 70 persen dan nilai manfaatnya 30 persen,” ujar Nanang.

Dengan perubahan komposisi itu, masyarakat akan membayar lebih besar. Padahal sebelumnya ada pernyataan bahwa

biaya haji 2025 akan turun.

Mengenai hal ini, Wakil Menteri Agama H.R Muhammad Syaf'i mengakui, memang menjadi kontradiksi antara statement sebelumnya dengan angka yang diajukan. Namun, komponen Bipih dan nilai manfaat tersebut masih bisa berubah dalam pembahasan bersama panja haji.

"Pertama, ini kan bisa selesai kalau komponennya kita pertahankan 60 persen dan 40 persen. Karena perubahan 60 persen 40 persen ke 70 persen 30 persen ini tidak diatur oleh undang-undang. Jadi saya kira kita sepakati nanti 60 persen 40 persen, berarti sudah ada penurunan Rp 20.000," kata Romo Syafii.

Ia menambahkan, dirinya bersama beberapa orang yang paham tentang pe-

bersama dengan DPR," kata Syafii.

Syafii mengatakan pemerintah dan DPR RI menargetkan penetapan biaya haji tahun 1446 H/2025 M dapat diputuskan pada 10 Januari 2025. Biaya haji yang diputuskan mencakup total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jamaah. "Itu rencana kita paling lama 10 Januari sudah ketok, supaya bisa combine dengan cepat," ujar Romo.

Sedangkan Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji DPR Abdul Wachid menyebut pihaknya menggelar rapat kerja meski masa reses. Dia mengatakan rapat pembahasan penyelenggaraan ibadah haji akan berlangsung pada 2-10 Januari. "Di masa reses ini kami akan mulai rapat Panja, besok tanggal 2 sampai

Wachid menjelaskan bahwa beberapa komponen biaya menjadi fokus Komisi VIII, antara lain transportasi udara. Ia merujuk, biaya tiket pesawat mencapai 30 persen dari total biaya haji, atau sekitar Rp 33 juta. Selanjutnya catering yang mengacu pada efisiensi penyediaan makanan jamaah dinilai masih bisa ditingkatkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Selain itu soal pemondokan. Wachid menyebut perlunya evaluasi terkait pengaturan kamar, yang sebelumnya ditemukan ada yang melebihi kapasitas ideal. Faktor lain adalah transportasi darat terutama efisiensi penggunaan bus antarjemput jamaah juga menjadi salah satu komponen yang diterapkan.

Wachid menegaskan bahwa efisiensi



nyelenggaraan haji juga sudah membuat kajian mengenai rasionalisasi BPIH 2025 yang nilainya bisa turun mencapai Rp 87 juta. Kajian tersebut bisa menjadi panduan untuk membahas penurunan biaya haji 2025.

"Ini masih bisa kita dalam, masih banyak unsur-unsur yang bisa kita ganti. Armuzna misalnya, itu masih bisa turun. Kemudian ada upaya dari bapak presiden kita untuk meminta kepada Pertamina menurunkan keuntungan Avtur khusus untuk pemberangkatan haji. Ini kemudian berkaitan dengan Garuda, yang juga bisa menurunkan ongkos haji. Jadi ini memang belum didiskusikan karena ingin menjadi success

tanggal 10 Januari," ujarnya.

Ia juga menyampaikan evaluasi awal terkait usulan biaya haji 2025 yang diajukan oleh Kementerian Agama. Menurut Wachid, penurunan biaya sebesar Rp 2 juta dari angka sebelumnya Rp 93 juta, yang dinilainya belum signifikan.

"Kami melihat rincian biaya ini hanya turun sekitar Rp 2 juta. Sementara, berdasarkan amanat dari Panitia Khusus (Pansus) dan arahan Presiden Prabowo Subianto, kami diminta mencari efisiensi biaya agar tidak memberatkan calon jamaah. Hasil temuan kami menunjukkan bahwa biaya haji sebenarnya bisa ditekan hingga di bawah Rp 90 juta," ungkap Wachid dalam rapat.

biaya tidak akan mengurangi kualitas pelayanan dan kenyamanan jamaah, terutama di lokasi-lokasi penting seperti Arafah, Muzdalifah, dan Mina. "Kami akan menerapkan sistem Tanazur di Mina, dengan menempatkan sebagian jamaah di sekitar Aziziyah untuk mengurangi kepadatan. Selain itu, kami juga memastikan kapasitas pemondokan tidak overload, sesuai standar empat tempat tidur per kamar," jelasnya.

Dalam rapat pendahuluan, Menag Nasruddin Umar bersama Komisi VIII DPR telah membahas masalah-masalah krusial penyelenggaraan ibadah haji kali ini. Dalam rapat pendahuluan itu Menag mengemukakan usulan rata-rata BPIH tahun 2025

sebesar Rp 93.389.684. Sementara itu, nilai manfaat sebesar 30 persen yang dikeluarkan BPKH sebesar Rp 28.016.905,5.

Dengan demikian, Bipih yang dibebankan kepada jamaah sebesar 70 persen dari total BPIH sebesar Rp 65.372.779,49. Namun angka ini masih merupakan usulan Kemenag dan akan diputuskan dalam rapat kesepakatan bersama DPR nantinya.

Sebelumnya Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kuota haji Indonesia pada 2025 sebanyak 221.000 jamaah. Adapun kuota petugas haji Indonesia sebanyak 2.210 orang atau lebih sedikit dibandingkan dengan penyelenggaraan haji sebelumnya.

Menurut Menag, jumlah petugas haji tersebut belum ideal apabila melihat jumlah jamaah haji yang harus dilayani mencapai

itu, Nasaruddin mengaku masih akan mengupayakan penambahan jumlah kuota petugas haji. Sebab, jumlah tersebut dianggap belum ideal dengan total jamaah haji yang harus dilayani pada 2025.

"Jadi ini ada pengurangan (dari) tahun yang sebelumnya jumlah tersebut, itu belum mencapai tahap ideal mengingat jamaah haji yang harus dilayani sebesar 221.000 orang. Karena itu kami akan terus berupaya agar mendapatkan tambahan kuota petugas sebagaimana tahun-tahun sebelumnya," kata Nasaruddin.

"Kalau tahun sebelumnya itu aslinya sebetulnya 4.200 ya, tapi ada tambahan 500 menjadi 4.700 orang untuk tahun 2024," sambungnya.

Pada sisi lain, Anggota Komisi VIII dari

mukakan pentingnya pengawasan yang disiplin terhadap penyimpangan penggunaan visa ziarah. "Pada saat kita melakukan pengawasan, terutama para jamaah haji visa ziarah, tentu ini masih ada tenggang waktu yang lama yang harus dilakukan Kemenag bagaimana mengantisipasi itu," katanya.

Menurut Selly, kehadiran jamaah umrah dan ziarah yang mencoba ikut ibadah haji pada 2025 harus diantisipasi sejak Ramadan 1446 hijriyah. Alasannya, pada saat Ramadan beberapa tahun belakangan, banyak warga Indonesia yang berangkat ke Arab Saudi menjalankan ibadah umrah sekaligus berziarah. Namun, kata Selly, akan ada saja di antara mereka yang mungkin menetap di Tanah Suci hingga musim haji walaupun tidak memiliki visa resmi untuk ibadah haji



221.000 jamaah. Karenanya, Kemenag akan terus berupaya untuk mendapatkan tambahan kuota petugas haji seperti penyelenggaraan haji sebelumnya. Sedangkan mengenai biaya haji 2025, hal itu akan segera dibahas dalam panja haji secara intensif dan rinci.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan, jumlah kuota haji Indonesia untuk tahun 2025 sebesar 221.000 orang. Sementara untuk kuota petugas haji 2025, lanjut Nasaruddin, sebanyak 2.210 orang.

Jumlah tersebut turun dibandingkan kuota yang didapat Indonesia pada 2024 lalu, yang mencapai 4.200 petugas. Untuk

Fraksi PDI-P Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi adanya jamaah ilegal pada penyelenggaraan ibadah haji 2025. Dia pun menyerukan agar Kemenag untuk mengatasi persoalan itu bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) serta Kementerian Imigrasi dan Masyarakat.

"Mungkin harus segera dibenahi oleh Kemenag dan berkoordinasi dengan Kemlu maupun keimigrasian kaitan para jamaah haji dan jamaah umrah yang mungkin selama ini menjadi momok yang memprihatinkan," ujar Selly dalam Raker kali ini.

Mengisahkan pengalaman tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, Selly menge-

2025.

"Kami Komisi VIII mengingatkan, mungkin masih ada waktu, sepertinya sebaiknya kita harus melakukan koordinasi. Dari mulai bulan Ramadan, orang sudah mulai berbondong-bondong melakukan umrah dan setelah itu mereka tidak mau balik ke Indonesia," kata Selly.

"Maka, bagaimana kita bisa menghambat para travel yang mungkin melakukan wanprestasi atau melakukan upaya supaya para jamaahnya stay di sana," ujarnya.

Akhirnya, semua pemangku kepentingan perlu mengingat kembali agar aspek ekonomi dan religius tetap seimbang. Ad-dunya mazra'atul akhirah. ♦



PARA JAMAAH SILAKAN BERSIAP

Di luar soal-soal teknis pembiayaan, jadwal keberangkatan jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci Makkah, Arab Saudi pada 1446 Hijriyah beriringan dengan 2025 masehi, dan kepulangannya, sudah tersusun. Jadi, para jamaah yang sudah masuk daftar tunggu harap mengecek ulang untuk bersiap-siap menunaikan rukun kelima Islam itu.

Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan bahwa sejauh ini keberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama jamaah calon haji Indonesia 1446 Hijriah/2025 Masehi direncanakan berlangsung pada 2 hingga 16 Mei 2025.

"Kita insya Allah tanggal 2-16 Mei itu pemberangkatan jamaah haji gelombang I. Jadi tanggal 1 jamaah sudah masuk ke asrama dan pemberangkatan jamaah haji dari Makkah ke Arafah itu 4 Juni," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief dalam Rapat Dengar Pendapat seputar Haji 2025 yang digelar oleh Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 Hijriah/2025 Masehi Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, akhir Desember 2024.

Sedangkan keberangkatan gelombang terakhir jamaah Indonesia menuju Tanah Suci terjadwal pada 31 Mei 2025. "Closing date 31 Mei 2025. Closing date sudah tidak ada penerbangan lagi tanggal 31 Mei 2025," ujar Hilman.

Sebagai patokan, puncak ibadah haji di Tanah Suci Makkah Al Mukarromah berlangsung mulai pada 5 Juni 2025. "Puncak haji wukuf di Arafah tanggal 5 Juni, jadi jamaah akan berangkat ke Arafah pada tanggal 4 Juni 2025. Idul Adha-nya di tanggal 6 Juni (10 Zulhijah), mudah-mudahan tidak ada pergeseran tanggal," katanya.

Setelah keberangkatan kloter pertama pada 2-16 Mei 2025, keberangkatan jamaah haji dari Madinah ke Jeddah dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 25 Mei 2025. Sementara itu, pemberangkatan jamaah haji gelombang kedua dari Indonesia langsung menuju Jeddah akan dilakukan pada 17 hingga 31 Mei 2025, dengan tanggal penutupan keberangkatan (closing date) ditetapkan pada 31 Mei 2025.

Prosesi puncak ibadah haji dimulai dengan pemberangkatan jamaah dari Makkah menuju Arafah pada 4 Juni 2025, yang dilanjutkan dengan wukuf di Arafah pada 5 Juni 2025. Perayaan Idul Adha berlangsung pada 6 Juni 2025, diikuti dengan Hari Tasyrik pada 7, 8, dan 9

Juni 2025.

Untuk pemulangan, jamaah haji gelombang pertama dari Jeddah ke Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 26 Juni 2025, dengan awal kedatangan di Indonesia dimulai pada 12 Juni 2025. Untuk jamaah gelombang kedua, pemberangkatan dari Makkah menuju Madinah akan dilakukan antara 19 Juni hingga 3 Juli 2025, sedangkan pemulangan dari Jeddah ke Indonesia akan berlangsung pada 27 Juni hingga 11 Juli 2025.

Akhir kedatangan jamaah haji gelombang kedua di Indonesia dijadwalkan pada 12 Juli 2025. Di tengah rangkaian ibadah ini, tahun baru Hijriah 1447 H akan jatuh pada 26 Juni 2025.

Hilman menjelaskan, pemberangkatan jamaah haji kloter I akan berangkat pada 2-16 Mei. Jamaah dijadwalkan masuk ke asrama haji mulai 1 Mei mendatang.

"Insya Allah, pemberangkatan jamaah haji gelombang pertama akan dimulai pada 2 hingga 16 Mei 2025," kata Hilman, Kamis.

Untuk pemberangkatan gelombang II, jadwalnya ditetapkan pada 17-31 Mei 2025. Hilman menegaskan bahwa penerbangan terakhir menuju Tanah Suci akan dilakukan pada 31 Mei atau 4 Zulhijah.

"Pemberangkatan jamaah haji gelombang II dilakukan pada 17-31 Mei. Setelah tanggal 31 Mei, tidak diperbolehkan ada penerbangan lagi ke Tanah Suci," katanya.

Baca Juga: Pembayaran Biaya Haji 2025 Ditargetkan Turun Dari 2024, Ini Perhitungannya

Hilman menambahkan, jamaah haji akan diberangkatkan ke Arafah pada 4 Juni atau 8 Zulhijah untuk melaksanakan wukuf.

Sementara itu, proses pemulangan jamaah haji akan berlangsung dalam dua gelombang. Pemulangan kloter pertama dijadwalkan pada 12-26 Juni 2025 atau 16 Zulhijah hingga 1 Muharam. Adapun pemulangan gelombang II akan dilaksanakan pada 27 Juni hingga 11 Juli 2025.

"Pemulangan jamaah haji gelombang pertama dimulai pada 12-26 Juni, sementara gelombang kedua pada 27 Juni hingga 11 Juli 2025," kata Hilman.

Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jamaah pada tahun 2025. Pemerintah melalui Menteri Agama, Nasaruddin Umar, telah mengusulkan Biaya Penyelenggaraan

Ibadah Haji (BPIH) tahun ini sebesar Rp93.389.684,99 per jamaah.

Dari total biaya tersebut, sekitar 70 persen atau Rp65.372.779,49 akan ditanggung langsung oleh jamaah haji, sementara sisanya akan dibiayai melalui subsidi dana haji. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia, termasuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar sesuai jadwal yang telah

"Untuk tahun 1446 Hijriah dan 2025 masa ini, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji Rp93.399.694,90 dengan komposisi bipih sebesar Rp65.372.779,49 atau 70 persen dan nilai manfaat sebesar Rp28.016.905,5 atau 30 persen," ujar Nasarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 30 Desember 2024.

Jumlah tersebut mencakup lima komponen yakni biaya penerbangan dari



ditetapkan.

Di depan wakil rakyat, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp93.389.684,99. Jumlah ini adalah akumulasi dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibebankan kepada jamaah dan nilai manfaat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam paparannya di depan DPR, Nasaruddin merinci besaran Bipih yang dibebankan kepada jamaah sebesar 70 persen atau Rp65.372.779,49 dengan nilai manfaat yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar 30 persen atau Rp28.016.905.

Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp34.386.390,68 kemudian akomodasi Makkah Rp15.232.011,90. Berikutnya, komponen akomodasi Madinah Rp4.454.403,48, living cost sebesar Rp3.200.002,50, dan komponen paket layanan masyarakat (sebagian) sebesar Rp8.099.970,094.

Jadi, biaya haji 2025 yang menjadi beban jamaah mengalami kenaikan dibanding tahun 2024. Pada tahun 2024, pemerintah menetapkan biaya naik haji 2024 untuk jamaah reguler rata-rata Rp56 juta. Dengan usulan Kemenag ini, ongkos per orang jamaah haji naik Rp9 juta dari Rp56 juta di tahun 2024 menjadi

Rp65,3 juta di tahun 2025.

Sementara, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2025 sebesar Rp93,38 juta berbanding BPIH tahun 2024 Rp93,40 juta. Dengan demikian, nilai BPIH tahun 2025 turun Rp20 ribu dibandingkan dengan ongkos 2024 lalu.

Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan rata-rata biaya haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) jemaah Indonesia pada 1446H/2025M sebesar Rp93.389.684,99 atau Rp93,3 juta.

"Untuk 1446H/2025M, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH Rp93,3 juta," usul Menteri Agama (Menag) Nasaruddin

yakni biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi sebesar Rp34 juta, dan akomodasi Makkah Rp15 juta, akomodasi di Madinah Rp4,49 juta. Kemudian, living cost atau biaya hidup Rp3,2 juta, dan paket layanan masyarakat.

Sementara itu, nilai manfaat atau dana optimalisasi ditetapkan sebesar Rp28 juta atau 30 persen dari BPIH 2025. Secara terperinci, anggaran yang bersumber dari nilai manfaat diantaranya akan dimanfaatkan untuk membiaya komponen pelayanan akomodasi, biaya konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah, Madinah dan Mina. Kemudian, untuk perlindungan, pelayanan

Nasaruddin menyebut, rancangan besaran BPIH disusun dengan menggunakan asumsi nilai tukar kurs dolar terhadap Rupiah sebesar Rp16.000, sedangkan asumsi nilai tukar SAR terhadap rupiah sebesar Rp4.266,67 per 1 SAR.

Sementara itu, tahun lalu, biaya haji 1445H/2024M disepakati sebesar Rp93,4 juta. Biaya ini terdiri dari Bipih sebesar Rp56 juta yang meliputi biaya penerbangan, akomodasi di Makkah, sebagian akomodasi Madinah, biaya hidup, dan visa.

Sedangkan nilai manfaat keuangan haji ditetapkan sebesar Rp37,3 juta. Nilai manfaat ini meliputi biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan di dalam negeri.

Penurunan nilai BPIH dan kenaikan ongkos yang mesti ditanggung Jemaah haji 2025 ini disorot oleh anggota Komisi VIII DPR Maman Immanuelhaq. "Jadi kalau BPIH 2025 memang turun tapi turunnya cuma sekitar Rp20 ribu. Jadi tidak signifikan dan jauh dari harapan masyarakat. Apalagi Bipih yang ditanggung jemaah justru naik cukup besar dari Rp56 juta di 2024 menjadi Rp65,3 di tahun 2025," katanya.

Dia menekankan prinsip utama dalam penyelenggaraan haji adalah memastikan biaya yang dibebankan kepada jemaah tetap terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Apalagi penurunan biaya perjalanan ibadah haji merupakan salah satu komitmen dari Presiden Prabowo Subianto.

"Saat ini, pemerintah belum sepenuhnya mematuhi arahan Presiden RI untuk menurunkan biaya haji dengan efisiensi yang tetap menjaga kualitas pelayanan," katanya.

Sebagai lembaga legislatif, kata Maman, DPR RI memiliki tugas untuk mengawasi dan membahas usulan BPIH bersama pemerintah. Namun, tanggung jawab untuk memastikan penurunan biaya haji seharusnya dimulai dari pihak eksekutif, yaitu Menteri Agama dan Kepala BPH.

"Kami di Komisi VIII akan terus mengawal agar keputusan yang diambil nantinya tidak memberatkan jemaah haji. Saya mendesak Kementerian Agama dan BPH segera merevisi usulan mereka dan menunjukkan niat nyata untuk menurunkan Bipih," ujarnya.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) HR Muhammad Syafii memaparkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penurunan biaya haji di 2025 sehingga dapat membuka peluang bagi seluruh masyarakat untuk pergi haji dengan lebih mudah dan murah.

"Efisiensinya itu banyak, mungkin yang paling signifikan itu pesawat. Kemarin, presiden sudah bisa memotong 10 persen ongkos pesawat, kalau itu nanti berlaku di haji,



Umar, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji di Kompleks Parlemen, Senin (30/12/2024).

Secara terperinci, Nasaruddin menuturkan bahwa biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau besaran yang ditanggung jemaah sebesar Rp65,3 juta atau 70 persen dari BPIH. Total Bipih yang mencapai Rp65,3 juta akan dimanfaatkan untuk membiayai sejumlah komponen

di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan perlindungan lainnya, hingga pembinaan jemaah haji di Tanah Air dan di Arab Saudi.

"Terkait dengan haji khusus, pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M yang bersumber dari dana nilai manfaat atau optimalisasi dana setoran awal dan setoran lunas jemaah haji khusus sebesar Rp9,49 miliar," ujarnya.

sudah sebuah penurunan yang signifikan. Selain itu, mungkin juga di hotel, di Armuzna (tiga titik penting dalam rangkaian ibadah haji) ini kita sisir kembali,” katanya di Kantor Kemenag.

Kemenag telah melakukan survei ke Arab Saudi dan menemukan bahwa perusahaan yang mengakomodasi ibadah haji sudah semakin kompetitif sehingga pihak Badan Penyelenggara (BP) Haji dapat membandingkan harga-harga untuk mengambil alternatif yang terbaik terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH) bagi masyarakat.

“Karena dulu perusahaan itu tidak banyak, jadi ada sedikit monopoli. Sekarang, begitu dibuka yang daftar sangat banyak, maka mulai kompetitif dan akhirnya kita belajar bahwa ‘oh, sebenarnya bisa seini’, jadi kemungkinan turunnya itu sangat jelas,” ujar dia.

Romo Syafii juga menyebutkan, biaya haji bisa diturunkan hingga di angka Rp80 juta, sementara Kemenag dan BP Haji terus menjalin komunikasi dengan DPR.

“Ini kan masih terus kita sisir, tetapi yang pasti, di pengusulan pertama, BPIH-nya sudah turun, kalau biasanya agak lebih tinggi supaya nanti disisir kembali oleh DPR baru bisa turun, kalau ini, di penawaran awal saja sudah turun, jadi insyaallah itu bisa lebih turun mungkin di angka Rp80-an (juta) lah,” tuturnya.

Politikus Gerindra ini juga mengemukakan, saat ini Kemenag masih fokus mengurus transisi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) ke BP Haji.

“Per-hajian itu sudah dimulai oleh BP Haji tahun 2025, meski tetap regulasi dan diplomasi di Kementerian Agama. Namun, lembaga yang baru kan membutuhkan waktu untuk menyusun susunan organisasi dan tata kerja (SOTK), tentu juga mentransfer apa yang sudah biasa dilakukan di Kemenag, itu kan mungkin butuh waktu, maka disepakati pelaksanaannya masih Kemenag, tetapi sudah dengan melibatkan BP Haji,” paparnya.

Dia menegaskan, penyelenggaraan ibadah haji akan sepenuhnya ditangani oleh BP Haji pada 2026. “Pada 2026 sepenuhnya sudah BP Haji nanti, 2025 ini masih Kemenag, tetapi dengan pelaksana teknis sudah sebagian ditangani oleh BP Haji, dan ini sekaligus upaya transisi, nanti 2026 itu sepenuhnya harus sudah bisa dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Haji,” tuturnya.

Sedangkan Asosiasi Amanah Umroh Haji (Ashuri) mengharapkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus dibayar oleh jemaah pada tahun depan bisa menu-

run atau minimal sama dengan 2024 yang sebesar Rp56 juta. Ketua Umum Ashuri Nur Faizin menyampaikan, naiknya biaya haji yang harus dibayar oleh jemaah bisa mendatangkan petaka, salah satunya bagi calon jemaah yang belum berangkat ibadah haji. Pasalnya, para calon jemaah ini sebagian besar menjadikan biaya 2024 sebagai patokan dalam mempersiapkan biaya haji.

“Kalau berubah semacam ini, dia kan harus nyari-nyari lagi. Ikhtiar lagi,” kata Nur Faizin, Senin, 30 Desember 2024.

Menurut dia, belum ada urgensi untuk mendongkrak biaya haji. Idealnya, sambungnya, biaya haji baru mengalami perubahan setelah beberapa tahun diberlakukan.

Untuk itu, dia meminta pemerintah dan DPR RI agar nilai yang ditetapkan nantinya sama seperti tahun lalu. “Kalau masih cuma satu tahun, itu tidak banyak pergerakan. Kecuali sudah beberapa tahun ya, karena inflasi, atau karena apa, itu masih memungkinkan,” ujarnya.



Di sisi lain, dia mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu bisa segera siap dan profesional dalam mengambil alih tugas Kemenag dalam menyelenggarakan ibadah haji.

Terkait perjalanan haji 2025, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyatakan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati tetap akan menjadi bandara resmi keberangkatan dan kepulangan pada musim haji 2025. Tidak hanya itu, pada 2025 ini bandara di Kabupaten Majalengka juga akan dipergunakan jemaah umroh baik di Jawa Barat maupun Jawa Tengah perbatasan.

“Tadi disampaikan oleh Pak Kanwil bahwa (Bandara) Kertajati bisa dipertahankan menjadi Bandara Internasional, memang betul karena ada keberangkatan haji,” kata Bey.

“Satu lagi, umrohnya Pak sekalian dari Kertajati. Insyaallah akan berjalan bulan Januari 2025 ini,” ujar Bey Machmudin.

Salah satunya optimalisasi pelayanan di asrama - asrama haji. Secara spesifik, Bey meminta fasilitas di Asrama Haji Indramayu ditingkatkan. Selain bandara, asrama menjadi penentu keberhasilan ibadah haji oleh pemerintah. Namun dengan komitmen Kemenag Jabar, Bey optimis semua akan lancar.

“Kami juga siap support, tergantung permintaan dari Kementerian perlu apa. Kami inginnya (asrama) dirapihkan, termasuk jalan, masjid, supaya jemaah nyaman, dan nantinya pada saatnya, tidak hanya untuk jemaah haji saja tapi juga bisa untuk kegiatan-kegiatan lainnya,” sebut Bey.

Kepala Kanwil Kemenag Jabar Ajam Mustajam membenarkan Bandara Kertajati kembali akan dijadikan titik keberangkatan dan kepulangan jemaah haji. Tidak hanya itu, Asrama Haji Indramayu pun akan siap.

“Insyaallah tahun 2025 Asrama Haji dan

Bandara Kertajati akan memberangkatkan seluruh jemaah haji Jawa Barat melalui bandara Kertajati dengan jumlah 60 kloter,” kata Ajam.

Ajam mengapresiasi Pemda Provinsi Jabar yang membantu Kanwil Kemenag sehingga ibadah haji bisa tetap sukses. Salah satunya bantuan hibah Rp18 miliar untuk Asrama Haji Indramayu.

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap jemaah haji, telah dibangun di Asrama Haji Indramayu tower tiga asrama pada 2024. Rencananya pada 2025, juga akan dibangun tower 4, dapur asrama haji, serta klinik kesehatan.

“Pada musim haji 2024, kuota Jabar sebanyak 38.260 jemaah dengan jumlah kelompok terbang (kloter) 93 kloter, yang sebagian kloternya telah berangkat melalui Bandara Kertajati, di Majalengka,” katanya. ♦

MEMISAHKAN PENYELENGGARA DAN PENYUSUN KEBIJAKAN HAJI

Penyelenggaraan negara di Abad XXI lazim memisahkan antara regulator (penyusun kebijakan atau aturan) dan operator (pelaksanaan kebijakan). Badan Penyelenggara Haji adalah salah satu contoh lembaga pelaksana kebijakan yang kelak terpisah dari Kementerian Agama dan jajarannya semisal Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji meskipun memiliki hubungan kerja.

Nah, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan pada akhir Desember 2024 melantik 35 pejabat sebagai timnya. Mereka adalah ASN berbagai institusi yang menduduki jabatan eselon II hingga IV. "Kita memang untuk tim kita ini, kita melibatkan banyak pihak. Ada dari Kejaksaan, ada Kepolisian, bahkan juga ada dari Kementerian Hukum dan HAM, ada KPK, ada TNI juga," ujar Gus Irfan di Masjid Al Ikhlas, Kantor Kementerian Agama, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 30 Desember 2024.

Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Penyelenggara

Haji Nomor: B-146 s.d. 180/KP.07.6/12/2024 tentang Mutasi Jabatan Eselon pada Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia Tahun 2024, berikut adalah daftar lengkap pejabat yang mendapatkan mutasi jabatan di lingkungan BP Haji:

1. H. M. NOER ALYA FITRA, SE., MM

Jabatan lama: Kepala Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji Reguler Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Jabatan baru: Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi pada Sekretariat



Utama Badan Penyelenggara Haji

2. TUTI RIANINGRUM, S.H., M.H.

Jabatan lama: Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya pada Kementerian Hukum Republik Indonesia

Jabatan baru: Kepala Biro Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Haji

3. H. SLAMET S.Ag

Jabatan lama: Perencana Ahli Madya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Jabatan baru: Kepala Biro Keuangan dan Umum pada Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Haji

4. Drs. ABD HARIS M.Pd.I

Jabatan lama: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan

Jabatan baru: Direktur Dukungan



Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi pada Deputy Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri Badan Penyelenggara Haji

5. H. AHMAD ABDULLAH, S.Ag., M.A.P

Jabatan lama: Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jabatan baru: Direktur Dukungan Fasilitas Kerjasama dan Layanan Masyarakat pada Deputy Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Luar Negeri Badan Penyelenggara Haji

6. H. RUDI NURUDIN A., S.Ag, MA

Jabatan lama: Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jabatan baru: Direktur Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Dalam Negeri pada Deputy Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji Badan Penyelenggara Haji

7. BUDI AGUNG NUGROHO, S.I.K., S.H.

Jabatan lama: Analis Hukum Ahli Madya PNS Divkum Polri

Jabatan baru: Direktur Pengawasan,

Jabatan Baru: Direktur Penyusunan Strategi dan Tata Kelola pada Deputy Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji Badan Penyelenggara Haji

9. H. MOH. HASAN AFANDI. S.Si., M.Sc

Jabatan lama: Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu Direktorat Pengelolaan Biaya Operasional Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Jabatan baru: Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi pada Badan Penyelenggara Haji

10. ZAINAL ABIDIN, S.H., M.H.

Jabatan lama: Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Jabatan baru: Inspektur pada Badan Penyelenggara Haji

11. Hj. RINA NURMALIA, S.S

Jabatan lama: Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah



Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Luar Negeri pada Deputy Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji Badan Penyelenggara Haji

8. CHANDRA SULISTIO

REKSOPRODJO, S.Psi., M.M.

Jabatan lama: Analis SDM Aparatur Ahli Madya PNS pada SSDM Polri

Kementerian Agama

Jabatan baru: Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana dan Evaluasi Program pada Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Haji

12. H. YUSUF PRASETYO, S.Si

Jabatan lama: Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Subdirek-



torat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji Reguler Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Jabatan baru: Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Haji

13. HJ. MARLIZA, S.T., M.M

Jabatan lama: Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Jabatan baru: Kepala Subdirektorat Verifikasi Dokumen dan Fasilitas Jemaah Berkebutuhan Khusus pada Direktorat Dukungan Administrasi dan Dokumen Haji Reguler Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri Badan Penyelenggara Haji

14. H. NURCHALIS ST, MM

Jabatan lama: Kepala Sub Direktorat pada Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Pe-

nyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Jabatan baru: Kepala Subdirektorat Dokumen Haji Reguler pada Direktorat Dukungan Administrasi dan Dokumen Haji Reguler Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri Badan Penyelenggara Haji

15. H. ABDILLAH, S.Pd.I

Jabatan lama: Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Jabatan baru: Kepala Subdirektorat Dukungan Akomodasi dan Konsumsi pada Direktorat Dukungan Akomodasi, Konsumsi, Transportasi Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri Badan Penyelenggara Haji

16. HJ. EDAYANTI S.IP, M.I.Kom

Jabatan lama: Analis Kebijakan Ahli Muda pada Subdirektorat Bina Petugas Haji Direktorat Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Jabatan baru: Kepala Subdirektorat Dukungan Layanan Transportasi pada Direktorat Dukungan Akomodasi, Kon-

sumsi, Transportasi Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri Badan Penyelenggara Haji

17. DR. H. KHALILURRAHMAN, M.A.

Jabatan lama: Kepala Subdirektorat Bimbingan Jemaah Haji Direktorat Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Jabatan baru: Kepala Subdirektorat Dukungan Bina Jemaah Haji pada Direktorat Dukungan Bina Haji dan Petugas Haji Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri Badan Penyelenggara Haji

18. Dr. H. IHSAN FAISAL BR ROHMAN, S.Th.I, M.Ag

Jabatan lama: Analis Kebijakan Ahli Muda pada Subdirektorat Bina Petugas Haji Direktorat Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Jabatan baru: Kepala Subdirektorat Dukungan Bina Petugas Haji pada Direktorat Direktorat Dukungan Bina Haji dan Petugas Haji Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri Badan Penyelenggara Haji



19. H. ABDUH DHIYA'UR RAHMAN, S.Kom, M.Si

Jabatan lama: Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggara-



raan Haji dan Umrah Kementerian Agama
Jabatan baru: Kepala Subdirektorat Dukungan Layanan Akomodasi Haji pada Direktorat Dukungan Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Luar Negeri Badan Penyelenggara Haji

20. Hj. INDRI HAPSARI, S.IP, M.Si

Jabatan lama: Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Jabatan baru: Kepala Subdirektorat Dukungan Layanan Konsumsi Haji pada Direktorat Dukungan Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Luar

Negeri Badan Penyelenggara Haji

21. H. BENY DARMAWAN, S.Si. M.Si

Jabatan lama: Analis Kebijakan Ahli Muda pada Subdirektorat Katering Haji Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Jabatan baru: Kepala Subdirektorat Dukungan Layanan Masyair pada Direktorat Dukungan Fasilitas Kerjasama dan Layanan Masyair Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Luar Negeri Badan Penyelenggara Haji

22. H. SUVIYANTO S.Sos

Jabatan lama: Kepala Sub Direktorat pada Subdirektorat Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Pe-



nyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Jabatan baru: Kepala Subdirektorat Dukungan Pengendalian Pergerakan Petugas Haji Masyair pada Direktorat Dukungan Fasilitas Kerjasama dan Layanan Masyair Deputy Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Luar Negeri Badan Penyelenggara Haji

23. H. SYARIF RAHMAN S.E

Jabatan lama: Analis Kebijakan Ahli Muda pada Subdirektorat Transportasi Haji Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Jabatan baru: Kepala Subdirektorat

Dukungan Kerjasama Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji pada Direktorat Dukungan Fasilitas Kerjasama dan Layanan Masyair Deputy Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Luar Negeri Badan Penyelenggara Haji

25. NURUL HUDA, S.Kom., M.T.

Jabatan lama: Bhayangkara Administrasi Penyelia Bagian Renmin PNS Divtik Polri

Jabatan baru: Kepala Subdirektorat Pengawasan dan Pemantauan Layanan Haji Reguler di Dalam Negeri pada Direktorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Dalam Negeri Deputy Bidang Pengawasan, Peman-

Negeri pada Direktorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Dalam Negeri Deputy Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji Badan Penyelenggara Haji

27. MARCH FALENTINO, S.H., MTCP

Jabatan lama: Analis Kebijakan Ahli Madya pada Sahli Kapolri PNS Sahli Kapolri

Jabatan baru: Kepala Subdirektorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Layanan Haji Reguler di Luar Negeri pada Direktorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Luar Negeri Deputy Bidang Pengawasan, Pe-



Dukungan Pemetaan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji pada Direktorat Direktorat Dukungan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Deputy Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Luar Negeri Badan Penyelenggara Haji

24. H. AGUS MIROJI, S.Ag, M.Si

Jabatan lama: Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Jabatan baru: Kepala Subdirektorat

tauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji Badan Penyelenggara Haji

26. H. TREE AGUNG NUGROHO, S.Sos, M.I.Kom

Jabatan lama: Pranata Humas Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Jabatan baru: Kepala Subdirektorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Layanan Haji Khusus di Dalam

mantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji Badan Penyelenggara Haji

28. Dr. H. DENNY, SE., M.Si

Jabatan lama: Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Operasional dan Pengelolaan Aset Haji Direktorat Pengelolaan Biaya Operasional Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Jabatan baru: Kepala Subdirektorat Pengembangan Tata Kelola Penyeleng-

garaan Haji pada Direktorat Penyusunan Strategi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Luar Negeri Badan Penyelenggara Haji

29. HARUMANTYO WIDIGDO, S.Sos.

Jabatan lama: Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Jabatan baru: Kasubbag Tata Usaha Kepala dan Wakil Kepala Badan pada Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Haji

30. Hj. LILI FITRIANI, SE

Jabatan lama: Penyusun laporan Keuangan pada Bagian Umum dan Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Jabatan baru: Kasubbag Tata Usaha Sekretariat Utama pada Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Haji

31. H. JULIAN MUHAMMAD ISA TANJUNG, ST

Jabatan lama: Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pengelolaan Biaya Operasional Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Jabatan baru: Kasubbag Tata Usaha Deputy Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri pada Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Haji

32. Hj. MAKKATUL MUKARROMAH, SE

Jabatan lama: Pengelola Surat pada Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji Reguler Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Jabatan baru: Kasubbag Tata Usaha Deputy Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Luar Negeri pada Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Haji

33. IVAN CHOERUDIN SENTANA, S.Sos

Jabatan lama: Penyusun Rencana

Keuangan dan Barang Milik Negara pada Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Jabatan baru: Kasubbag Tata Usaha Deputy Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji pada Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Haji

34. H. MUHAMMAD HENIKAM NURZAMAN, S.Kom

Jabatan lama: Pranata Komputer Ahli Muda pada Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu Direktorat Pengelolaan Biaya Operasional Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Jabatan baru: Kas-

ubbag Tata Usaha Pusat Data dan Teknologi Informasi pada Pusat Data dan Inspektorat Badan Penyelenggara Haji

35. H. DIAZ ISMAYA ABADI SE

Jabatan lama: Penyusun Standar Pelayanan pada Subbagian Tata Usaha Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Jabatan baru: Kasubbag Tata Usaha pada Inspektorat Pusat Data dan Inspektorat Badan Penyelenggara Haji. ♦



REMITANSI

GUNAWAN EFFENDI

Jika ada anggota keluarga atau sanak-saudara yang bekerja di luar negeri mengirimkan uang ke Indonesia, itulah remitansi. Pengertian baku remitansi (remittance) adalah transfer uang nonkomersial, bukan bisnis, yang dilakukan oleh pekerja migran, anggota komunitas diaspora, atau warga negara yang memiliki keluarga di luar negeri, untuk pendapatan rumah tangga di negara asal atau tanah air.

Menyimak pengertian remitansi, mudah bagi kita mengaitkannya dengan pekerja migran yang pernah disebut tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja wanita (TKW). Namun pengertian itu sudah dibakukan dengan frasa pekerja migran Indonesia. Malah kini lembaga yang menanganinya sudah berbentuk kementerian. Ya Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang semula bernama Badan P2MI.

Kementerian P2MI berfungsi lebih kepada memfasilitasi penempatan atau pengiriman (dulu pernah disebut pengerahan). Itu baru sebagian. Sebagian lagi, yang lebih penting adalah fungsi pelindungannya. Harap maklum bekerja di rantau negeri orang memang lebih berisiko dibandingkan dengan mencari nafkah di negeri sendiri. Namun, risiko yang lebih tinggi biasanya berbanding lurus atau sebanding dengan imbalan atau penghasilannya.

Begitulah maka ihwal pekerja migran ini memang sangat berkaitan dengan remitansi. Yang mencatat data remitansi untuk Indonesia adalah bank sentral, Bank Indonesia, karena data remitansi dari semua bank (milik pemerintah atau swasta) tercatat di sana.

Nah, persoalan kita bersama adalah jumlah atau nilai remitansi sebelum wabah Covid-19 melanda, amat sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan setelah pandemi yang disebabkan virus corona itu mereda. Jadi, remitansi Indonesia sejak 2021 hingga 2024 jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka 2020 dan 2-3 tahun sebelumnya, meskipun ada kenaikan selama dua tahun terakhir.

Data Bank Indonesia menunjukkan, angka remitansi pada 2018 mencapai 10,97 miliar dolar AS. Pada tahun berikutnya, 2019, angkanya naik lagi menjadi 11,43 miliar dolar. Nah, saat Covid-19 merajalela pada 2020, mulailah angka remitansi menurun menjadi 9,42 miliar dolar. Angka itu turun lagi pada 2021 menjadi 9,16 miliar dolar.

Tingkat remitansi terendah dalam 5-6 tahun terakhir tercatat pada 2021, hanya 2,32 miliar dolar AS. Setelah itu memang terjadi kenaikan, namun belum sampai separuh dari rekor 11,43 miliar dolar pada 2019.

Angka remitansi pada 2022 tercatat baru mencapai 3,35 miliar dolar AS. Selanjutnya, pada 2023 naik menjadi 3,68 miliar dolar. Kecenderungan meningkatnya angka remitansi sudah terlihat pada semester I (Januari-Juni) 2024 senilai 3,88 miliar dolar.

Maka upaya untuk memulihkan angka remitansi seperti masa sebelum Covid-19 merajalela agaknya memang perlu menjadi salah satu prioritas dalam pemerintahan yang sedang berganti. Jadi, pembentukan Kementerian P2MI memang relevan sebagaimana kajian yang pernah dipublikasikan Dana Moneter Internasional (IMF, International Monetary Fund) pada 2022.

Kajian itu mencatat, remitansi merupakan komponen penting dari arus neraca pembayaran lintas negara dan mencapai \$559 miliar bagi negara-negara berpendapatan rendah dan menengah pada 2019. Bagi beberapa negara berkembang, ungkap kajian itu, remitansi merupakan sumber arus modal internasional yang paling penting pun dapat memberikan dampak penting pada pembangunan ekonomi serta pengentasan kemiskinan, meskipun remitansi sering kali hanya digunakan untuk konsumsi –bukan untuk investasi atau membuka usaha misalnya.

Soal remitansi, untuk negara-negara kawasan Asia Tenggara, Filipina memang paling banyak disebut sebagai jawaranya. Dari nominal saja, angka resmi Bank Sentral Filipina menunjukkan total remitansi negeri jiran itu pada 2021-2024 selalu di atas 30 miliar dolar AS. Pada 2021, 31,41 miliar dolar, naik menjadi 32,53 miliar dolar per 2022.

Angka remitansi Overseas Filipino Workers, begitu para pekerja migran di negeri jiran itu disebut, naik lagi pada 2023 menjadi 33,49 miliar dolar. Untuk 2024, pada periode Januari-September, angka remitansi Filipina tercatat 25,22 miliar dolar, dengan rata-rata bulanan tiga miliar dolar, maka angka remitansi 2024 akan melampaui yang tercatat pada 2023.

Sekadar catatan ringkas, Filipina relatif lebih rajin serta rinci mencatat informasi dan data. Bukan sekadar remitansi, melainkan juga, misalnya, angka kelahiran dan kematian ibu dan bayi, maupun tingkat kekerdilan (stunting) anak. Untuk remitansi, misalnya, Filipina sudah memisahkan angka remitansi dari overseas worker yang bekerja di darat dan di laut secara terbuka. Pekerjaan di laut itu sebenarnya bukan hanya sebagai nelayan atau penangkap ikan. Nakhoda dan anak buah kapal tanker minyak dan gas juga termasuk. Indonesia pun sebenarnya memiliki pekerja migran yang tak sekadar menjadi penangkap ikan. Namun, itulah, catatannya belum jelas.

Memang, dari sisi jumlah penempatan saja, Filipina jauh lebih banyak mengirimkan pekerja migrannya ke luar negeri. Kisarannya sekitar 2,5 juta pekerja migran per tahun. Sedangkan Indonesia baru memang belum seberapa.

Data BP2MI menunjukkan, pada 2022, Indonesia menempatkan 200.717 pekerja migran. Tahun berikutnya, 2023, jumlahnya naik menjadi 297.107 orang. Nah, pada 2024, hingga November 2024, jumlah penempatan masih bertengger di angka 258.381 pekerja migran. Sedangkan Menteri P2MI optimistik penempatan pekerja migran Indonesia hingga tutup tahun akan mencapai 274 ribu orang, masih lebih rendah dari angka

yang tercatat pada 2023.

Melihat angka-angka penempatan itu, masih banyak yang perlu dipelajari dari Filipina soal remitansi dan pekerja migrannya. Namun, satu hal, sumber terbanyak pekerja migran Filipina adalah kawasan Metropolitan Manila dan sekitarnya, semacam Jabodetabek di Indonesia, juga wilayah sekitarnya di Pulau Luzon. Ini mengindikasikan kualitas sumber daya manusia yang relatif lebih tinggi dan lebih bersesuaian dengan tuntutan global maupun pasar kerjanya.

Di Indonesia, wilayah serupa Jabodetabek yang lebih mengglobal mungkin Bali. Namun Bali pun tampak cenderung turun angka penempatan pekerja migrannya dalam dua tahun terakhir. Yang juga turun adalah Sulawesi Selatan pada periode yang sama. Pekerja migran Indonesia dominan berasal dari Jawa Timur, Tengah, dan Barat. Namun, yang paling banyak justru berasal dari Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon di Jawa Barat. Sementara agen penempatan tenaga kerja yang terbanyak justru di Kota Bekasi meski Jawa Barat juga.

Pada 2010, Cristina Sergio meminta Mary Jane pergi ke Yogyakarta dari Malaysia dan memberinya sebuah koper dengan upah US\$500. Setibanya di Bandara Yogyakarta, Mary Jane ditangkap karena di bagian lapisan dalam koper titipan Cristina terdapat heroin seberat 2,6 kilogram.

Masalah pekerja migran yang terkait dengan tindak pidana memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga seperti kepolisian dan imigrasi. Meskipun bukan ranah Kementerian P2MI, soal ini tetap memerlukan perhatian karena dapat berdampak terhadap pandangan negara penempatan terhadap para pekerja migran Indonesia.

Toh soal pekerja migran secara global merupakan keniscayaan sebagaimana perhatian lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dana Moneter Internasional, maupun Bank Dunia. Di tingkat regional, Badan PBB untuk kerja sama sosial dan ekonomi kawasan seperti UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) saja mencurahkan perhatian terhadap pekerja migran diawasannya.



Tambahan masalah mungkin pekerja migran yang terkait dengan judi online yang marak menjadi sorotan belakangan ini. Belum lagi pekerja migran yang terkait dengan pengiriman narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). Juga penempatan ilegal yang dapat meluas menjadi masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Perkembangan aktual pengembalian terpidana mati kasus penyelundupan narkotika asal Filipina Mary Jane Veloso ke negara asalnya adalah salah satu kasus yang juga dapat menjadi pelajaran penting tentang pekerja migran. Perempuan Filipina itu adalah seorang pekerja migran yang memiliki dua anak. Ia pernah bekerja di Dubai, Uni Emirat Arab.

Untuk Indonesia yang berada di kawasan Asia Pasifik, tentu saja UN ESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) yang menjadi lembaganya. Terlebih Sekretaris Eksekutif UN ESCAP adalah Armida S Alisjahbana yang pernah menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Akhirnya, akan banyak pekerjaan penting Kementerian P2MI pada tahun pertamanya. Apapun, kita layak memberi ucapan selamat bekerja untuk Pak Menteri Karding, dan dua wakilnya: Bang Dzulfikar dan Mbak Christina Aryani yang mengemban amanat untuk melindungi dan melayani para pejuang remitansi. Sungguh bukan pekerjaan ringan. ♦



MERETAS MASA DEPAN ZAKAT DAN WAKAF INDONESIA

Untuk 2024 saja, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (Baznas RI) menargetkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat mencapai Rp41 triliun. Itu hanya dari Baznas wilayah dan lembaga amil zakat (LAZ) tingkat provinsi dan kabupaten-kota. Bagaimana dampak penerapan Pajak Pertambahan Nilai 12 persen?

Dari pengalaman sebelumnya, para muzakki (yang wajib membayar zakat), tak terpengaruh oleh kondisi ekonomi di luar nilai-nilai syariah seperti penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 12 persen. Dengan pengalaman itu Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (Baznas RI) meyakini bahwa pengaruh kenaikan tarif PPN 11 menjadi 12 persen mulai Januari 2025 sedikit saja pengaruhnya pada penerimaan zakat.

Ketua Baznas RI Noor Achmad mengemukakan berdasarkan pengalaman saat COVID-19 melanda Indonesia, awalnya pengumpulan zakat dikhawatirkan akan berkurang. Namun, COVID-19 justru membuat penerimaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bertambah.

Bercermin pada pengalaman itu, Noor optimistik kebijakan PPN 12 persen tidak akan mengurangi keshalehan sosial masyarakat Indonesia dalam berzakat.

"Ada sesuatu yang luar biasa mereka (masyarakat) tidak terganggu apapun, karena zakat, infak, dan sedekah adalah amal keagamaan yang tidak terganggu," katanya, di Bandung, Rabu, 18 Desember 2024.

Begitu pula dengan potensi menurunnya angka kelas menengah akibat berbagai faktor. Ia yakin hal tersebut tidak akan mempengaruhi masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. "Orang mengatakan kelas menengah turun dan dikhawatirkan perolehan ZIS akan turun. Kami merasa ada problem semacam itu, tapi kami tidak pernah terganggu dengan hal semacam itu," kata Noor.

Toh Noor Achmad mengakui Baznas baru mengumpulkan sekitar Rp30 triliun sepanjang 2024. Meski begitu, angka tersebut diprediksi akan terus bertambah mengingat Baznas masih menunggu laporan dari pengelola zakat wilayah dan LAZ.

"Pengumpulan secara nasional itu dari



seluruh daerah hingga kini Rp30 triliun. Target kami Rp41 triliun, tapi baru lapor ke kami Rp31 triliun, dan sampai sekarang laporan masih berjalan. Mungkin awal tahun 2025 sudah terkumpul semua laporannya,” ujar Noor Achmad.

Ia mengatakan untuk Baznas RI sendiri hingga kini berhasil mengumpulkan zakat sebesar Rp1 triliun lebih dengan target Rp1,2 triliun. Sama seperti skala nasional, target tersebut bisa terealisasi hingga akhir 2024.

Pada sisi penyaluran, kata dia, penyaluran zakat paling besar dialokasikan untuk mengentaskan masyarakat miskin sebesar 40 persen dari total pencapaian lewat berbagai program pemberdayaan. Sedangkan sektor lainnya termasuk kesehatan menjadi salah satu prioritas Baznas sesuai dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk menekan angka stunting di Indonesia.

“Ini jadi program bersama, kolaborasi. Kita tahu bahwa infak dan sedekah itu inklusi biasa digunakan untuk siapa saja di Indonesia,” katanya.

Ia mengaku tingkat kesadaran masyarakat Indonesia untuk berzakat sangat tinggi. Bahkan setiap tahunnya minat masyarakat berzakat meningkat hingga

30 persen. “Rata-rata 30 peningkatannya setiap tahun. Papua itu malah 60 persen kemarin-kemarin saya datang ke sana,” kata dia.

Terkait dengan itu, Pemerintah Indonesia melalui berbagai instansi terkait terus berupaya mendorong penguatan ekonomi syariah dengan fokus pada sektor zakat dan wakaf.

“Pertumbuhan zakat dan wakaf sangat menggembirakan, tetapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Kita perlu mengejar potensi yang ada dan meningkatkan aktualisasi zakat dan wakaf agar lebih berdampak bagi masyarakat,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam, Kementerian Agama (Kemenag) RI Kamaruddin Amin di Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.

Kamaruddin mengatakan zakat dan wakaf memainkan peran yang sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan.

Ia mengungkapkan pengumpulan zakat saat ini mencapai antara Rp1 hingga Rp10 triliun setiap tahunnya. Ia optimistis dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang, jumlah tersebut dapat mencapai

Rp100 triliun. “Ini bukan hanya capaian Baznas dan LAZ, tetapi capaian kolektif seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kita harus terus memperbaiki kualitas pendistribusian dan pemberdayaannya,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI Waryono Abdul Ghafur menjelaskan penguatan sumber daya manusia (SDM) pengelola zakat dan wakaf menjadi fokus utama. “Kami sedang menyusun roadmap pengembangan SDM yang kompeten dalam mengelola zakat dan wakaf. Pengelola harus memiliki kecakapan di bidang akuntansi, manajerial, dan digital,” ujar Waryono.

Untuk mendukung peningkatan kapasitas ini, Kemenag juga telah menerjemahkan regulasi zakat dan wakaf dalam dua bahasa internasional, yaitu bahasa Arab dan Inggris. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman masyarakat internasional tentang sistem regulasi zakat dan wakaf di Indonesia.

“Mulai 2025, kami melakukan pembinaan tidak hanya kepada lembaga zakat dan wakaf, tetapi juga kepada masyarakat umum melalui modul digital untuk memperkuat pemahaman dan praktik zakat serta wakaf di Indonesia,” tambahnya.

Selanjutnya, Direktur Keuangan Sosial Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Dwi Irianti Hadiningdyah menekankan pentingnya memperkuat ekonomi syariah melalui zakat, wakaf, infak, dan sedekah.

"Potensi dana zakat dan wakaf sangat besar, namun tantangan yang kita hadapi juga tidak sedikit. Kita perlu strategi yang lebih baik, serta sinergi yang lebih erat antara sektor keuangan syariah dan industri halal," kata Dwi.

Dwi menggarisbawahi pentingnya sinergi antara sektor keuangan syariah dan industri halal untuk menciptakan rantai nilai halal yang solid, yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Melalui berbagai upaya ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjadikan zakat dan wakaf sebagai instrumen yang semakin kuat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Di lingkup akademisi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dwi Putri Cahyawati menyoroti capaian pengumpulan zakat nasional di Indonesia yang saat ini dinilai jauh dari potensi yang dikemukakan. Misalnya,

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menyebutkan pada 2024 ini potensi zakat Indonesia mencapai Rp327 triliun, dengan target pengumpulan tahun ini mencapai Rp41 triliun, dan realisasi zakat yang telah diperoleh hingga Desember 2024 ini mencapai lebih dari Rp31 triliun.

"Ini persoalan menarik, karena target kita sekian triliun itu, tapi kok tidak bisa

dicapai? Ini persoalannya di mana? Sehingga, perolehan zakat yang ditargetkan itu tidak sesuai harapan," kata Dwi dalam diskusi publik bertajuk "Masa Depan Gerakan Zakat: Reformasi atau Stagnansi?" di Tangerang Selatan, Banten, Senin, 23 Desember 2024.

Dwi mempertanyakan hal tersebut, sebab berbagai upaya telah dilakukan banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia, namun capaian dana yang diperoleh hingga kini masih jauh dari yang diharapkan.

Salah satu yang menjadi sorotan, ungkapnya, adanya hukum positif yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU Pengelolaan Zakat), dimana di dalamnya terdapat regulasi yang mengatur pembentukan LAZ, yang kini tidak semua pihak bisa mengelola zakat.

Dwi mengungkapkan hal ini berbeda dengan era sebelum adanya regulasi berupa hukum positif ini. Sebelumnya pada 1951, 1968, 1989, 1991, negara telah memiliki batasan-batasan soal tata kelola zakat, namun hanya berupa Surat Edaran, Keputusan, dan Peraturan Menteri yang bukan sebagai hukum positif.

Terkait hal tersebut Deputi Direktur



Orang mengatakan kelas menengah turun dan dikhawatirkan perolehan ZIS akan turun. Kami merasa ada problem semacam itu, tapi kami tidak pernah terganggu dengan hal semacam itu.



Dana Sosial Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Urip Budiarto mengatakan adanya UU Pengelolaan Zakat merupakan upaya pemerintah yang menyadari tentang pentingnya peraturan dalam hal ini. Latar belakangnya, zakat merupakan hal yang berdampak kepada hajat banyak masyarakat "Pemerintah sadar ada tantangan regulasi yang perlu dikuatkan. (Zakat) ini dinamis, tidak bisa sederhana, sehingga semua jalan yang ditempuh pada hari ini bisa memperkuat tata kelola zakat ke depannya," ujarnya.

Urip menekankan eksistensi UU Pengelolaan Zakat ada untuk meregulasi pelaporan dan pengawasan terhadap tata kelola zakat. Pada gilirannya, tata kelola zakat yang akuntabel dan terpercaya akan terwujud.

Adapun terkait capaian zakat yang belum mencapai potensinya, ia menjelaskan capaiannya terus menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, dimana pada 2021 jumlahnya mencapai Rp14 triliun, dan pada penghujung tahun ini mencapai lebih dari Rp31 triliun, yang menunjukkan adanya peningkatan lebih dari dua kali lipat.

Ia menyebutkan tata kelola zakat yang

baik akan menjadikan masyarakat akan lebih percaya untuk menyalurkan hartanya untuk berzakat, dimana zakat berperan dalam memberdayakan umat, serta meningkatkan daya beli masyarakat. "Jika banyak masyarakat yang sejahtera, daya beli masyarakat meningkat, akhirnya akan lebih banyak lagi orang yang akan membayar zakat," kata Urip.

Berkaitan dengan itu Baznas RI bersama Kementerian Agama bersinergi meluncurkan Peta Jalan Zakat 2045 sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

"Dalam rangka memaksimalkan peran strategis zakat, Baznas bersama Kementerian Agama Republik Indonesia telah menyusun Peta Jalan Zakat 2045," ujar Ketua Baznas RI Noor Achmad dalam acara International Conference on Zakat (ICONZ) ke-8 di Bandung, Kamis, 19 Desember 2024.

Menurut Noor, Peta Jalan Zakat 2045 tersebut menjadi pedoman penting dan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan sistem pengelolaan zakat yang profesional, modern, dan berdaya saing global.

Ia mengatakan pemerintah menempatkan pengelolaan zakat sebagai salah satu strategi penting dalam mencapai visi Indonesia 2045. "Sebagai instrumen keuangan sosial Islam, zakat memiliki potensi besar untuk mendukung pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan ekonomi umat," kata dia.

Noor berharap Peta Jalan Zakat 2045 ini dapat dijadikan acuan oleh seluruh pemangku kebijakan, pelaku industri, serta lembaga pengelola zakat dalam merancang dan melaksanakan berbagai program strategis peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM serta optimalisasi pengelolaan zakat.

"Semoga Allah SWT. senantiasa meridhoi segala upaya kita dalam memajukan pengelolaan zakat sebagai salah satu instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan keberlanjutan pembangunan bangsa," katanya.

Noor Achmad menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Peta Jalan Zakat 2045. "Kolaborasi yang baik ini menjadi fondasi kuat bagi keberhasilan pengelolaan zakat yang lebih terarah, terukur dan berdampak luas," kata dia. ♦



Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi

LANTIK ANGGOTA KOMISI INFORMASI SUMSEL PERIODE 2024-2028

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H., M.S.E, resmi melantik Anggota Komisi Informasi (KIM) Provinsi Sumsel Periode 2024-2028 di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (23/12/2024) sore.

Pelantikan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam sambutannya Pj Gubernur Elen Setiadi mengucapkan selamat kepada anggota Komisi yang telah dilantik atas amanah yang telah diberikan. Menurut Elen, tugas yang diemban sangatlah mulia, yakni menjadi pengawal keterbukaan informasi publik di daerah. Kepercayaan ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus tantangan yang harus dihadapi dengan penuh dedikasi dan integritas.

"Dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki, kami yakin bapak-bapak akan mampu menjalankan tugas dengan baik," jelasnya.

Lebih jauh Elen mengatakan, Komisi Informasi memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik terpenuhi. Melalui kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa, Ia optimis Komisi Informasi akan semakin berkontribusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam kesempatan ini pula, Elen mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan/apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak/Ibu anggota Komisi Informasi periode

2020-2024 atas dedikasi dan pengabdian yang luar biasa selama masa jabatannya.

Keberhasilan Provinsi Sumatera Selatan meraih penghargaan sebagai Badan Publik "Informatif" dalam Penganugerahan Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 yang diselenggarakan oleh

Komisi Informasi Pusat merupakan buah dari kerja keras kita bersama, khususnya peran penting Komisi Informasi.

"Bapak/Ibu telah berhasil mendorong terciptanya budaya terbuka dan transparan dalam pemerintahan, serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik. Sehingga Pemer-





intah Provinsi Sumatera Selatan meraih nilai yang cukup istimewa yaitu 97,33 sebagai Badan Publik yang Informatif. Selain itu pada ajang bergengsi Komisi Informasi Pusat lainnya, yaitu Apresiasi



Dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki, kami yakin bapak-bapak akan mampu menjalankan tugas dengan baik.

Desa tahun 2022, Bapak/Ibu anggota komisi Informasi telah mengantarkan Desa Bukit Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan menerima penghargaan sebagai Desa Terbaik Peringkat ke-5 (lima) se-Indonesia dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik," paparnya.

Dalam menjalankan tugas, Elen berharap Komisi Informasi dapat:

1. Menjadi mediator yang efektif antara pemohon informasi dan badan publik dalam penyelesaian sengketa informasi;
2. Melakukan sosialisasi dan edukasi ke-

pada masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi publik;

3. Menjadi mitra kerja pemerintah dalam menyusun kebijakan dan peraturan daerah yang mendukung keterbukaan informasi;
4. Mendorong inovasi dalam pengelolaan informasi publik.

Selain itu, Elen juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penuh kinerja Komisi Informasi.

"Mari kita bersama-sama membangun budaya terbuka dan transparan di Provin-

si Sumatera Selatan," ujarnya mengakhiri sambutan.

Adapun kelima anggota Komisi Informasi yang dilantik yakni Muhammad Fathony S.E.S.H, MH. C. Med, Dr. Hadi Prayogo, M.I.Kom, Yoppy Van Houten E. Psi, Joemarthine Chandra, SH. MH. C. Med, Haidir Rohimin, SE. MM.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumsel Hj. Meilinda, S.Sos, MM, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumsel, M. Adrian Agustiansyah, S.H. M.Hum, ♦



PJ GUBERNUR ELEN SETIADI DAMPINGI MENAG RI RESMIKAN MASJID AL-ABDUH SEMATANG BORANG

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H., M.S.E mendampingi Menteri Agama Republik Indonesia (RI) Prof. Dr. K.H Nasaruddin Umar, MA meresmikan Masjid Al-Abduh yang didirikan oleh Kapolda Riau Irjen. Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., MH yang berlokasi di Jl. Sunama No 01, RT 16, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang Palembang, beberapa waktu lalu.

Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Agama RI, Prof. Dr. K.H Nasaruddin Umar.

Dimana dalam sambutannya, K.H Nasaruddin Umar mengapresiasi atas pembangunan Masjid Al-Abduh yang berdiri megah di Kota Palembang. Ia berharap para pejabat yang lainnya ikut memban-

gun rumah ibadah.

"Kegiatan hari ini luar biasa ada seorang Kapolda yang mendirikan masjid yang megah ini di Kota Palembang, dan ini kita harapkan para-pejabat muslim yang mempunyai kemampuan bisa ikut membangun rumah ibadah masjid. Masjid ini adalah akan menjadi rumah kita di surga nanti dan menjadi modal amal

kita menuju surga," katanya.

Ia berharap Masjid yang dibangun ini menjadi tempat segala kebaikan dan digunakan sesuai fungsinya. Masjid tidak saja harus bersih tapi juga diatur manajemennya.

"Mari kita merawat toleransi di dalam masjid jangan sampai masjid ini menjadi tempat untuk memaki ataupun memarahi



orang. Karena masjid ini dibangun untuk menghimpun segala kebaikan, berbuat kebaikan inilah fungsi masjid," ujarnya.

Menag mengimbau pekarangan masjid bisa digunakan sebagai tempat ekonomi baru bagi masyarakat disekitarnya.

"Pemberdayaan masjid ini ada banyak sekali itu bisa kita manfaatkan termasuk bisnis centernya, sebagai lembaga pendidikan. Oleh karena itu masyarakat harus bisa memberdayakan masjid dan masjid harus memberdayakan masyarakat," harapnya.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen. Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., MH mengatakan Masjid yang dibangun oleh pihak keluarganya dibangun atas nama orang tuanya dan diharapkan menjadi amal jariyah.

"Alhamdulillah masjid ini telah diresmikan, masjid ini adalah masjid keluarga dibangun atas niat menjadi amal jariyah untuk ibu saya dari anak, mantu, cucunya kita bersama membangun dari tiga tahun lalu dan Alhamdulillah sudah rampung dan menjadi berkah untuk semua," uca-

pannya.

Kapolda Riau ini berharap masyarakat dapat memakmurkan Masjid Al-Abduh.

"Saya dan keluarga mengajak

masyarakat untuk memakmurkan masjid ini sebagai tempat ibadah, syiar agama Islam, pendidikan dan kegiatan keagamaan yang lainnya," tandasnya. ♦





Pj Gubernur Elen Setiadi Apresiasi Forkopimda dan Lembaga Terkait MENDUKUNG PENGENDALIAN INFLASI DI SUMSEL

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H., M.S.E menyampaikan ucapan terima kasihnya atas dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), OJK, BI, Instansi dan lembaga lainnya yang telah banyak membantu dalam pengendalian inflasi di Sumsel, sehingga mendapatkan apresiasi dari Presiden RI Prabowo Subianto.

// "Ini berkat kerjasama kita semua sehingga program pengendalian inflasi kita mendapatkan apresiasi dari Pak Presiden RI," kata Elen saat menghadiri Evaluasi dan Apresiasi Program Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Sumsel bertempat di Ballroom Kantor OJK Regional 7 Sumbagsel, Rabu (18/12/2024) malam.

Dikesempatan ini Elen mengatakan kerjasama ini terus dilakukan apalagi potensi yang ada di Sumsel itu sangat besar.

"Mari kita bersama-sama, kita punya potensi yang besar kalau dikerjakan dengan baik saya yakin potensi ekonominya akan baik," ujarnya.

Elen mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama





ini, dengan dukungan yang ada serta potensi yang sangat baik dia yakin kesejahteraan juga akan semakin baik.

"Saya apresiasi yang telah memberikan dukungannya terhadap kemajuan Sumsel," tambahnya.

Di Kesempatan itu Elen menyambut baik di launchingnya buku

pencegahan pinjol dan judi online.

"Kita menyambut baik buku ini, OJK telah banyak melakukan pencegahan dan perlu dukungan

terus," tutupnya.

Sementara itu Kepala Kantor OJK Regional 7 Sumbagsel, Arifin Susanto mengatakan Sumsel memiliki potensi yang besar salah satunya adalah komoditas kopi, dimana Provinsi Sumsel merupakan daerah penghasil kopi terbesar nasional.

"Kami berinisiasi bersama dinas yang kita rencanakan mengeksplor kopi ke negara Malaysia dan Australia. Artinya satu program kerja yang digagas oleh pak Gubernur ini semoga ini menjadi kenyataan," harapnya.

Selain itu ada

juga pihaknya memberikan apresiasi kepada instansi/lembaga yang mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan daerah di Provinsi Sumsel dalam program pengembangan keuangan daerah. Diantaranya diberikan kepada : Biro Perekono-



Kita menyambut baik buku ini, OJK telah banyak melakukan pencegahan dan perlu dukungan terus.

mian Provinsi Sumsel, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel, Dinas Perindustrian Sumsel, Dinas Perdagangan Sumsel, Dinas Perkebunan Sumsel serta lembaga keuangan dan instansi lainnya. Di Kesempatan ini juga bersamaan dengan di Launching Buku Saku Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal. ♦

Bahu Membahu, Pj Gubernur bersama Forkopimda

JAMIN KEAMANAN DAN KETERSEDIAAN LOGISTIK SELAMA NATARU DI SUMSEL

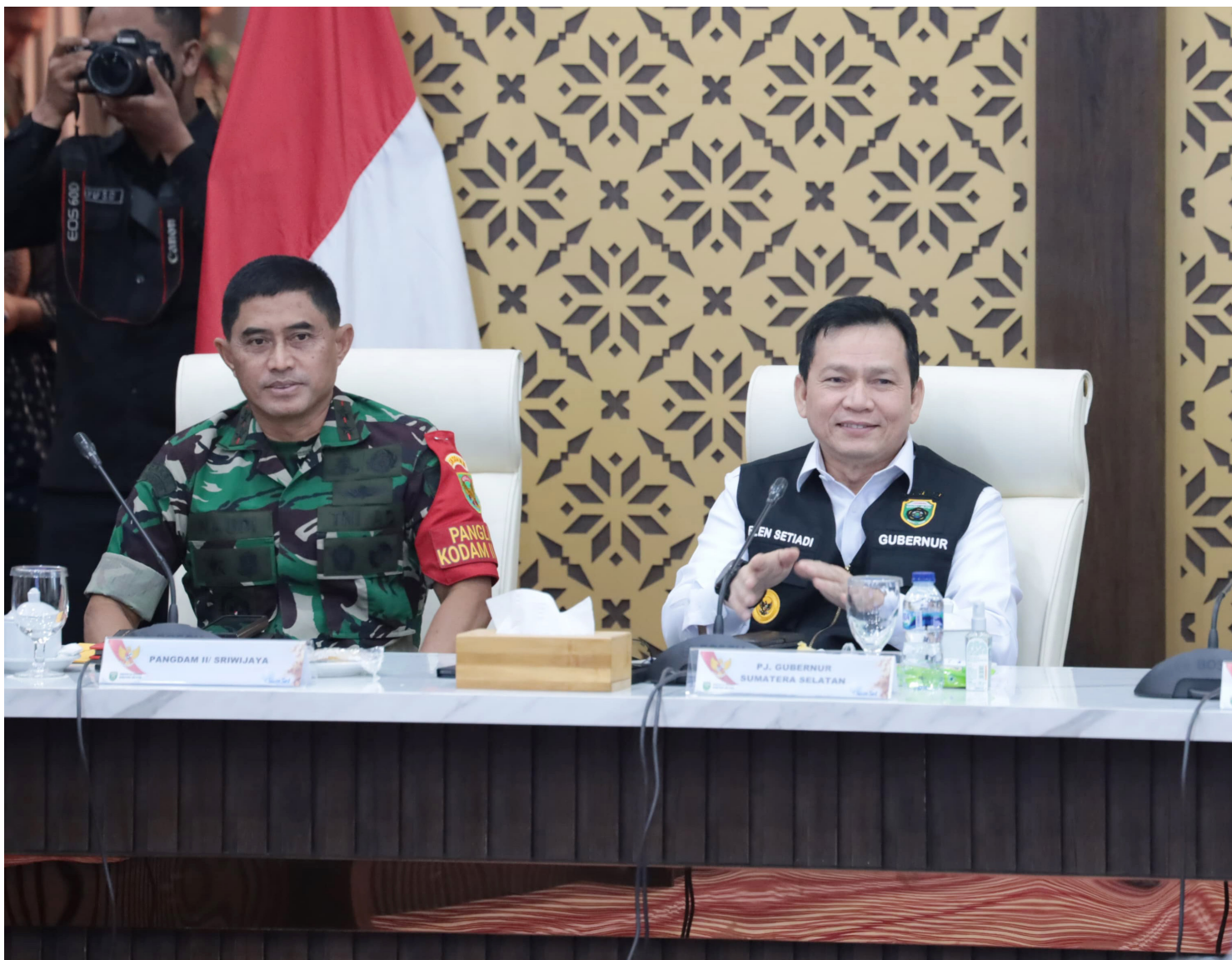
Penjabat (Pj) Gubernur Elen Setiadi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Selatan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor dalam rangka Kesiapan Pelaksanaan Operasi Lilin Musi-2024 diselenggarakan oleh Polda Sumsel di Griya Agung, Jumat (20/12/2024).

Rakor dihadiri Pj Gubernur dan Forkopimda bersama jajaran masing-masing, bertujuan memastikan kesiapan penga-

manan menyeluruh menjelang Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Menurut Pj Gubernur, Pengamanan Nataru merupakan gabungan dari ber-

bagai macam pengamanan. Baik pengamanan terhadap perjalanan mudik dan balik, pengamanan kegiatan ibadah, malam pergantian tahun, dan tempat



wisata.

"Berdasarkan hasil laporan pada rakor ini, kita relatif siap dalam mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan jelang Nataru sampai Januari awal," ujar Gubernur Elen.

Menurutnya, rakor ini penting dilakukan. Mulai dari optimalisasi pemanfaatan fasilitas umum bagi masyarakat selama Nataru, terutama cuaca pada bulan Desember yang diperkirakan BMKG memiliki curah hujan yang tinggi.

"Karena berdasarkan pengalaman apabila terjadi banjir yang terlalu lama akan mempengaruhi infrastruktur jalan. Jadi dinas dan instansi terkait harus siaga, mengantisipasi perawatan infrastruktur," tandas Gubernur.

Selain itu, Pertamina juga diminta untuk mengantisipasi antrian pembelian BBM agar tidak mempengaruhi kepadatan lalu lintas. Untuk mendukung hal tersebut, Pertamina juga diminta untuk

buka layanan 24 jam.

"Kita juga sudah menggelar rapat untuk memastikan kestabilan harga dan pasokan pangan selama Nataru dengan menggelar pasar murah. Distribusi kita harus tetap di cek terus supplynya," ujarnya.

Selain itu, juga perlu disiapkan kan-



Berdasarkan hasil laporan pada rakor ini, kita relatif siap dalam mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan jelang Nataru sampai Januari awal.

mati lampu," tandasnya.

Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian R Djajadi katakan operasi Musi lilin 2034 dilakukan untuk menjamin keamanan masyarakat sesaat, sedang dan setelah nataru.

"Operasi lilin Musi 2024 juga tetap bersamaan dengan mantap praja untuk antisipasi residu hasil keputusan Pemilu. Juga kita akan tetap siaga terhadap tindak kejahatan bagi tempat tinggal masyarakat yang tengah melakukan mudik," ujarnya.

Kapolda berharap, sinergi dan komunikasi antar semua pihak untuk pengamanan tempat wisata dan tempat ibadah selama perayaan nataru.

"Dan juga potensi cuaca dan wilayah-wilayah yang punya objek wisata yang berkaitan dengan alam perlu diantisipasi jangan sampai terjadi hal yang buruk. Dan antisipasi dan dipersiapkan.

"Kita perlu penguatan patroli gangguan," katanya.

Selain pengamanan di Polda dan Kepolisian Resort (Polres), terdapat 77 pos di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Mantan Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) ini mengajak semua pihak, untuk mengedepankan sinergi antar instansi



tong-kantong parkir tambahan dan kesiapsiagaan tenaga kesehatan pada pos-pos pengamanan.

"Kita juga perlu antisipasi kepadatan lalu lintas akibat kereta babaranjang, dan juga dukungan PLN Agar tidak terjadi

guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Rakor ini dihadiri pula oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel. ♦

Cek Kesiapan Pelaksanaan Operasi Lilin Musi 2024

PJ GUBERNUR ELEN SETIADI PIMPIN APEL GELAR PASUKAN

Penjabat (Pj) Gubernur Elen Setiadi bertindak selaku pimpinan apel pada Apel Gelar Pasukan dalam rangka Kesiapan Pelaksanaan Operasi Lilin Musi 2024, Pengamanan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025.

Pj Gubernur memimpin Apel Gelar Pasukan yang diselenggarakan oleh Polda Sumatera Selatan (Sumsel) di Halaman Griya Agung, Palembang, pada 20 Desember 2024.

Dalam amanat Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang disampaikan, Gubernur Elen Setiadi, bahwa Apel Gelar Pasukan ini merupakan bentuk komitmen tugas, untuk mengecek kesiapan personel maupun sarana dan prasarana dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, sehingga seluruhnya dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

"Sebagaimana penekanan Bapak

Presiden Prabowo Subianto dalam Apel Kasatwil Polri bahwa, "Nataru di depan mata. Saudara akan sibuk, Saudara akan capek, jadi laksanakan tugas pengamanan dengan baik". Untuk itu, kita harus mempersiapkan seluruh rangkaian pengamanan dengan sebaik-baiknya", kata Gubernur Elen.

Terlebih lagi, Pengamanan Nataru kali ini bersamaan dengan Pengamanan Sisa Tahapan Pilkada Serentak, sehingga perlu diantisipasi adanya potensi gangguan lainnya yang dapat terjadi.

"Perayaan Natal dan Tahun Baru merupakan salah satu agenda nasional yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Perayaan Nataru menjadi momen penting bagi masyarakat untuk beribadah,



bersuka cita, berlibur dan berkumpul bersama keluarga, sehingga akan berdampak pada meningkatnya mobilitas serta aktivitas masyarakat secara masif di berbagai daerah,” katanya.

Pengamanan Melibatkan 141.605 Personel

Apel Gelar Pasukan ini dihadiri Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI M. Naudi Nurdika, dan Unsur Forkopimda lainnya. Apel menandai dimulainya Operasi Pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di wilayah Sumatera Selatan.

Operasi besar-besaran ini melibatkan kekuatan gabungan yang signifikan dengan 141.605 personel. Jumlah ini merupakan merupakan personel gabungan dari TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubun-

berikan pelayanan prima dan pengamanan optimal kepada masyarakat.

Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada tanggal 21 dan 28 Desember 2024, sementara puncak arus balik diprediksi pada tanggal 29 Desember 2024 dan 1 Januari 2025.

Masyarakat diimbau untuk menin-

si tempat ibadah, deteksi dini, dan upaya preventif akan dilakukan secara intensif. Keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan juga dimaksimalkan untuk menciptakan suasana yang aman dan toleran.

Antisipasi terhadap kejahatan konvensional, bencana alam, dan ketersediaan



**Terlebih lagi,
Pengamanan Na-
taru kali ini ber-
samaan dengan
Pengamanan Sisa
Tahapan Pilkada
Serentak, sehing-
ga perlu diantisipasi
adanya potensi
gangguan lainnya
yang dapat terjadi.**

gan (Dishub), dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Personel ini bertanggung jawab mengamankan 61.452 objek vital di seluruh Sumatera Selatan. Yaitu gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, dan tempat-tempat wisata yang diprediksi akan ramai dikunjungi masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru.

Untuk mendukung kelancaran operasi, didirikan 2.794 posko pengamanan di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Posko-posko ini diharapkan dapat mem-



gkatkan kewaspadaan dan mematuhi seluruh protokol keamanan yang telah ditetapkan.

Pj Gubernur juga memberikan perhatian khusus pada keamanan ibadah Natal dan pencegahan aksi terorisme. Sterilisa-

pangan serta BBM juga menjadi fokus utama dalam operasi ini. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BMKG dan instansi terkait, akan terus ditingkatkan untuk memastikan kesiapan menghadapi berbagai potensi ancaman. ♦

219 Titik di PT Hindoli Jadi Ajang Illegal Drilling PJ GUBERNUR: TERPENTING, DASAR HUKUM UNTUK PENYELESAIAN MASALAHNYA

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi memimpin Rapat Lanjutan Penyelesaian Masalah Illegal Drilling di lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Hindoli di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Senin (23/12/2024).

Pada Rapat di Hotel Santika Premiere Bandara, Palembang, terungkap bahwa PT Hindoli selama bertahun-tahun mengalami kerugian akibat Illegal Drilling. Saat ini setidaknya ada 219 titik aktivitas illegal drilling di lahan HGU perusahaan perkebunan sawit tersebut. Tak bisa dilakukan penertiban, karena perlawanan rakyat.

Pj Gubernur Elen Setiadi menekan-

kan pentingnya dasar hukum yang kuat dalam menindaklanjuti permasalahan ini.

"Empat bulan yang lalu sudah kita bahas. Satgas akan kita tertibkan kembali, dan nanti kita diskusikan lagi dengan Kapolda serta Pangdam," ujarnya.

Ia menegaskan tindakan yang diambil harus memperhatikan penyelesaian masalah utama, yakni aktivitas illegal

drilling.

"Kita tidak sedang membela PT. Hindoli, tetapi fokus menyelesaikan persoalan illegal drilling. Mau tidak mau, penegakan hukum harus dilakukan," tegasnya.

Dan, kegiatan Illegal Drilling di manapun yang ada di wilayah Provinsi Sumsel harus diselesaikan bukan hanya di lahan PT Hindoli, namun secara keseluruhan.



"Saya setuju untuk segera ada tindakan, kami akan minta semua dukungan ke stakeholder,

"Namun nanti akan segera dikoordinasikan kembali terkait penindakannya seperti apa, pada intinya kita akan tindak kegiatan Illegal Drilling di wilayah kita," ungkapnya.

Gubernur menggarisbawahi pentingnya perencanaan waktu dan pembiayaan yang matang dalam proses penertiban ini.

"Dukungan dari pemerintah dan pihak lain sangat diperlukan. Pendampingan masyarakat juga harus terus dilakukan," tandasnya.

Sangat Membahayakan tapi Penertiban Terkendala

Dalam kesempatan ini, Pj Bupati Musi Banyuasin Sandi Pahlevi mengungkapkan bahwa aktivitas illegal drilling di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Muba, telah berlangsung lama dan menimbulkan kerusakan lingkungan serius.

"Illegal drilling mengganggu aktivitas perkebunan, merusak lingkungan, bahkan menyebabkan kebakaran. Banyak tanaman sawit mati, biota rusak, dan pencemaran lingkungan luar biasa," katanya.

Terdapat 219 titik sumur minyak ilegal di lahan HGU PT Hindoli. Upaya penegakan hukum sudah dilakukan, termasuk pengawasan oleh PT Hindoli bersama Pemerintah Kabupaten dan Forkopimda Pemkab Muba. Namun, penertiban terkendala aksi perlawanan masyarakat pemilik sumur ilegal.

Karena itu Bupati Sandi meminta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Forkopimda Sumsel untuk menuntaskan permasalahan ini. Karena dalam kurun waktu 6 bulan sudah

sebanyak 6 kali terjadi kebakaran lahan.

"Kami meminta agar adanya penyempitan ruang gerak berupa pembuatan parit gajah dan adanya penertiban secara tegas," ungkapnya

Sementara itu Perwakilan dari PT Hindoli Saiful menyampaikan bahwa masyarakat masuk dan menambang secara ilegal di lahannya, secara bebas sehingga PT Hindoli mengalami kerugian dan kerusakan kebun.

"Telah dilakukan penertiban namun ada perlawanan dan intimidasi dari masyarakat, sehingga estimasi kerugian hingga Desember sekitar Rp12 miliar," papar Saiful.

Turut Hadir Kapolres Musi Banyuasin AKBP Listiyono Dwi Nugroho SIK MH dan Forkopimda lainnya. ♦



DIAPRESIASI PRESIDEN RI PRABOWO SUBIANTO ELEN SETIADI PAPARKAN KOLABORASI PENGENDALIAN INFLASI SUMATERA SELATAN

Penjabat (Pj) Gubernur Elen Setiadi memimpin Rapat Sekretariat Bersama Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Kantor Bank Indonesia Sumsel, Rabu (18/12/2024).



Gubernur Elen pun mengungkapkan spesifikasi pertumbuhan ekonomi di Sumsel dinilai baik, dengan inflasi yang terjaga. Terkait hal tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan apresiasi. Presiden bahkan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk melaporkan semua kegiatan yang



Kami laporkan semua kegiatan kita diminta langsung sama Bapak Presiden. Saya yakin ini adalah sesuatu yang memang kita lakukan terus menerus dan itu sudah ada dampaknya.

dilakukan Sumatera Selatan dalam rangka mengendalikan inflasi.

"Kami laporkan semua kegiatan kita diminta langsung sama bapak Presiden. Saya yakin ini adalah sesuatu yang memang kita lakukan terus menerus dan itu sudah ada dampaknya," kata Gubernur.



Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga mendukung Pemantauan Harga dan Ketersediaan Stok Komoditi Barang Kebutuhan Pokok di Pasar Tradisional dan Ritel Modern.

"Semua ketersediaan stok komoditi di pasar tradisional dan pasar modern yang telah dilakukan pemantauan cukup. Komoditi yang mengalami kenaikan di pasar-pasar tradisional tersebut adalah: Minyak Goreng dan Telur Ayam, sementara harga komoditi lainnya relatif stabil," jelasnya.

Bahkan telah dilakukan Operasi Pasar Murah sebanyak 6 kali sejak 5 November 2024 sampai dengan 18 Desember 2024.

Waspada! Risiko Kenaikan Harga

PJ Gubernur Elen di bagian lain menegaskan TPID Sumsel perlu mewaspada! risiko kenaikan harga beras, bawang merah, cabai merah, telur ayam ras, dan

daging ayam ras menjelang akhir tahun berdasarkan prognosa neraca konsumsi dan historis perkembangan harga bulanan 3 tahun terakhir.

"Namun demikian, perkembangan terkini menunjukkan tekanan harga pada M1 Desember tercatat stabil bahkan melandai dibandingkan November (kecuali Minyak goreng dan telur ayam)," tandasnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel Ricky Perdana Gozali mengatakan, perkembangan inflasi di Sumsel hingga terakhir November 2024 adalah 0,73 persen year on year yaitu dibawah inflasi nasional. Inflasi Sumsel menempati posisi inflasi provinsi terendah kedua se-Pulau Sumatera dan ketiga se-Indonesia.

Terdapat beberapa upaya pengendalian inflasi menjelang akhir tahun 2024 antara lain Ketersediaan Pasokan, dengan cara melakukan monitoring kondisi pasokan secara berkala dan melakukan sidak serta quick action apabila terdapat gejolak harga seperti pelaksanaan

GSMP.

"Upaya pengendalian inflasi di Sumsel yaitu memastikan Keterjangkauan Harga, distribusi, dan menjalin komunikasi yang efektif," ujarnya.

Perlu dilakukan pemantauan harga di pasar secara berkala dan melakukan quick action apabila terdapat gejolak harga seperti pelaksanaan GPISS melalui pasar murah, optimalisasi Toko Penyelimbang, serta melakukan assesmen sebelum menaikkan harga.

"Kita juga harus memastikan Kelancaran Distribusi, dengan cara optimalisasi Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP sertaantisipasi titik-titik rawan banjir jelang puncak musim hujan," tambahnya.

Semua juga perlu didukung Komunikasi yang efektif pada berbagai sektor antara lain dengan cara kampanye bijak berbelanja, publikasi upaya pengendalian inflasi, serta koordinasi antar pemerintah daerah, asosiasi petani, pedagang, dan sektor swasta guna memastikan kelancaran produksi dan distribusi komoditas pangan. ♦

OLEH KEMENDAGRI, ELEN SETIADI DINOBATKAN PJ GUBERNUR TERBAIK SE-INDONESIA

Hanya Terpaut 1 Poin dari Prof Zudan Fakhrrulloh

Elen Setiadi, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), meraih predikat Penjabat Gubernur Terbaik II Seluruh Indonesia Periode Juni-Desember 2024.

Sukses Elen Setiadi ini diumumkan dalam pengumuman yang disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat dalam pengarahannya virtual kepada seluruh Pj Kepala Daerah (KDH) pada Rabu 4 Desember 2024.

"Setelah dilakukan evaluasi, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi menjadi salah satu penjabat gubernur kepala daerah terbaik," kata Mendagri Tito.

Dari data evaluasi yang dipaparkan, Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakhrulloh, berada di peringkat pertama

dengan nilai 85 (baik), disusul oleh Elen Setiadi dengan nilai 84 (baik), dan Pj Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, di peringkat ketiga dengan nilai 83 (baik).

Peringkat keempat ditempati Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, dengan nilai 81,60 (baik), sementara posisi kelima diduduki Pj Gubernur Papua Selatan, Rudy Sufahriadi, dengan nilai 80,68 (baik).

Lima kepala daerah tersebut mendapatkan nilai di atas 80, yang masuk dalam kategori "baik". Sementara itu, pejabat gubernur di posisi keenam hingga ke-23 masuk kategori "cukup" dengan nilai



antara 74 hingga 79.

Sebelumnya, saat evaluasi kinerja di Gedung Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Rabu (25/9/2025), Elen menyampaikan bahwa kinerjanya selama menjabat sebagai Pj Gubernur Sumsel sejak akhir Juni 2024 mendapat apresiasi dari para evaluator.

"Alhamdulillah, para evaluator memberikan catatan positif dan apresiasi. Tinggal kita lengkapi beberapa data yang masih diperlukan. Namun, secara teknis, banyak kemajuan di Sumsel yang sudah diapresiasi," ujar Elen.

Ia juga mengungkapkan bahwa paparan terhadap 10 indikator kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian mendapatkan kesan positif dari para penilai.

Masuk Kategori Cukup

Selain lima Kepala Daerah Terbaik, Mendagri Tito Karnavian juga mengumumkan Penjabat Gubernur yang Masuk Kategori Cukup.

Mereka adalah:

- * Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya di peringkat keenam dengan nilai 79,69;

- * Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana (79,09);
- * Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono (78,25);

- * Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat Hassanuddin (78,25);
- * Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin (77,81). ♦



Syukur Suksesnya Pilkada Serentak dan Kafilah MTQ XXX PEMPROV SUMSEL GELAR TABLIG AKBAR DAN BAGI BONUS

Wujud syukur dan apresiasi Kafilah Sumatera Selatan yang jadi Peringkat 5 MTQ Tingkat Nasional Tahun 2024, Pj Gubernur Elen Setiadi memberikan bonus senilai Rp1.025.000.000 kepada 13 pemenang.



Penyerahan bonus tersebut dilakukan secara simbolis pada saat diselenggarakannya Tablig Akbar Akhir Tahun 2024 di Griya Agung Palembang, Rabu (11/12/2024).

Dalam rangkaian Tablig Akbar tersebut, Gubernur Elen Setiadi mengajak untuk meningkatkan iman dan taqwa



Berkat tangan dingin pak Pj Gubernur Sumsel (Elen Setiadi), pak Sekda dan seluruh pelatih sehingga ini merupakan prestasi pertama yang selama ini belum pernah terjadi.

kepada Yang Maha Esa. Juga mengungkapkan rasa syukur atas yang dianugerahkan-Nya kepada semua, termasuk Provinsi Sumsel berupa Zero Konflik hingga terlaksananya Pilkada Serentak 2024 yang lancar, aman, dan damai.

Gubernur Elen mengungkapkan,



apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para Qori dan Qoriah yang telah mengharumkan nama Sumsel sehingga mendapatkan Peringkat 5 Nasional.

"Insya Allah Bonus ini akan memacu para peserta untuk berprestasi dimasa depan tentu dengan dukungan kita semua, kami mengajak dan mengimbau Bapak/Ibu untuk terus mendukung kehidupan umat beragama," kata Gubernur.

Tangan Dingin Pj Gubernur dan Sekda

Pada kegiatan tersebut Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dr. Drs. H. Sunarto, M.Si dalam sambutannya mengatakan prestasi yang diraih pada tahun 2024 kali ini sungguh membanggakan.

Sumsel mengirimkan sebanyak 54 peserta seluruh cabang. Dan dari seluruh caban, Sumsel masuk 7 cabang yang mengikuti final dan pada akhirnya mendapatkan Peringkat 5 Nasional.

"Berkat tangan dingin pak Pj Gubernur Sumsel (Elen Setiadi), pak Sekda dan seluruh pelatih sehingga ini merupakan

prestasi pertama yang selama ini belum pernah terjadi" tuturnya

Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga memberikan bantuan Sosial kepada anak yatim sebanyak 105 orang dan tau-

siah agama.

Turut hadir Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra, Pj Ketua TP PKK Sumsel Melza Elen Setiadi dan para Forkopimda Sumsel. ♦





11

REKOMENDASI DESTINASI WISATA HALAL DI AMERIKA SERIKAT DARI MASJID 96 STREET HINGGA PESANTREN

Amerika Serikat, merupakan salah satu negara maju yang selalu jadi impian banyak orang untuk bisa jalan-jalan atau sekadar rekreasi ke negeri Paman Sam tersebut, termasuk bagi wisatawan Muslim yang ingin menikmati wisata halal di Amerika.

Namun, sangat disayangkan masih banyak wisatawan Muslim yang kesulitan saat berwisata ke Amerika, karena minimnya fasilitas yang ramah Muslim. Namun, saat ini, para wisatawan Muslim yang ingin menikmati liburan ke Amerika, tak perlu khawatir lagi, karena Amerika saat ini mulai menawarkan wisata ramah Muslim, terutama untuk wisatawan Indonesia.

Sejak tahun 2000-an, sudah banyak Masjid hingga restoran halal yang bisa dipilih wisatawan Muslim. Terlebih lagi, sudah ada travel profesional yang berpengalaman dalam menjalankan tour wisata halal ke mancanegara, salah satunya ke Amerika Serikat.

Berikut 11 Destinasi Wisata Ramah Muslim di Amerika Serikat:

1. Patung Liberty

Merupakan bangunan setinggi hampir 100 meter ini, terletak di Pulau Liberty, di muara Sungai Hudson, New York Harbor, AS. Patung Liberty ditetapkan UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia pada 1984.

Patung Liberty salah satu destinasi wisata unggulan yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing. Terlebih lagi Patung Liberty telah ditetapkan sebagai monumen nasional AS oleh Presiden Calvin Coolidge.

2. Pulau Ellis

Pulau Ellis merupakan bekas stasiun

pemeriksaan imigrasi yang terletak di Pelabuhan New York. Antara tahun 1892 dan 1954, lebih dari 12 juta imigran melewati pulau ini dalam perjalanan mereka ke Amerika Serikat. Pulau Ellis merupakan museum yang banyak menceritakan kisah imigran di Amerika.

Selama berada di Pulau Ellis, pengunjung bisa menjelajahi Gedung Utama, yang merupakan tempat para imigran diproses saat mereka tiba di Amerika. Selain itu, Pengunjung juga dapat melakukan tour berpemandu di pulau itu, atau naik feri ke Patung Liberty.

3. Museum 9/11

Museum 9/11 terletak di Ground Zero di Lower Manhattan, New York City. Museum ini dibangun untuk mengenang peristiwa 11 September 2001 dan dampaknya pada dunia.

Museum ini menyimpan koleksi lebih dari 21.000 bukti-bukti otentik peristiwa, termasuk bukti material, pernyataan saksi mata, serta rekam sejarah insiden 11 September 2001.

Koleksi museum ini meliputi kartu-kartu ucapan yang dibuat oleh keluarga para korban, puing pesawat yang terselamatkan, peninggalan para korban yang diberikan oleh keluarganya, serta karya seni yang dibuat khusus mengenang tragedi tersebut.

4. Masjid 96 Street

Bagi wisatawan muslim, saat ke Amerika juga bisa singgah ke Masjid 96 Street untuk melaksanakan ibadah atau mengenal Islam di Amerika. Masjid 96 Street juga dikenal sebagai Pusat Kebudayaan Islam New York (ICCNY). Masjid yang juga pusat budaya nirlaba ini terletak di 1711 Third Avenue, antara East 96th dan 97th Streets di Manhattan, New York City. Ini adalah masjid yang dibangun khusus pertama di New York City dan tetap menjadi salah satu yang terbesar di kota ini.

Masjid 96 Street adalah landmark penting bagi komunitas Muslim di New York City. Ini adalah tempat ibadah, pendidikan, dan layanan sosial. Masjid ini juga merupakan pusat budaya yang mempromosikan pemahaman dan toleransi antar budaya.

5. Grand Central Terminal

Grand Central Terminal adalah stasiun kereta api bersejarah yang terletak di Midtown Manhattan, New York City. Ini adalah salah satu landmark paling terkenal di kota dan merupakan salah satu stasiun kereta api tersibuk di dunia. Terminal ini dinamai menurut nama perusahaan kereta api New York Central Railroad, yang memban-

gunnya pada tahun 1913.

Terminal ini terkenal dengan aula utamanya yang besar, yang memiliki langit-langit setinggi 120 kaki yang dicat dengan mural yang menggambarkan zodiak. Terminal ini juga memiliki sejumlah fitur ikonik lainnya, termasuk jam Tiffany yang terkenal, tangga utama yang megah, dan

ruang berbisik. Grand Central Terminal menjadi tujuan wisata populer.

6. Times Square

Times Square merupakan persimpangan jalan utama dan kawasan pejalan kaki di Midtown Manhattan, New York City. Ini terkenal dengan papan reklame yang



Pulau Ellis



Museum 9/11



Masjid 96 Street

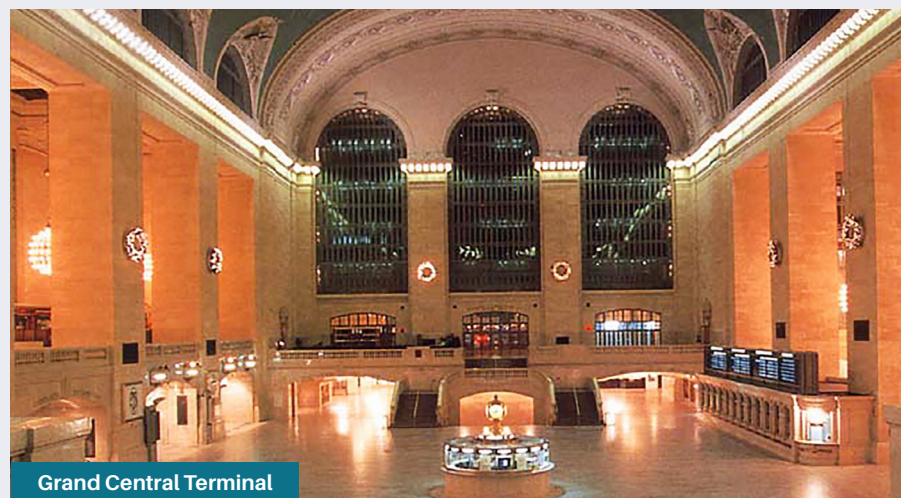
terang benderang, pertunjukan jalanan, dan teater Broadway. Times Square adalah salah satu tujuan wisata paling populer di dunia, dengan puluhan juta orang mengunjunginya setiap tahun.

Saat mengunjungi Times Square, pengunjung juga bisa melihat Broadway, yang menampilkan berbagai pertunjukan, dari

musikal klasik hingga drama kontemporer. Begitu juga bisa menjelajahi toko-toko. Ada juga museum lilin yang menampilkan patung selebriti, pemimpin dunia, dan tokoh sejarah.

7. Central Park

Central Park adalah taman kota seluas



Grand Central Terminal



Times Square



Central Park

843 hektar (341 ha) yang terletak di Manhattan, New York City. Central Park merupakan taman kota paling banyak dikunjungi di Amerika Serikat, dengan perkiraan 40 juta pengunjung setiap tahun. Central Park adalah oasis yang indah di tengah hiruk-pikuk New York City. Ini adalah tempat yang bagus untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati alam luar.

Taman ini memiliki berbagai fitur, seperti The Reservoir yaitu danau buatan manusia yang digunakan sebagai sumber air minum bagi kota New York. Ada juga taman Hutan, Taman Konservatori, dan Taman Bethesda Terrace. Begitu juga ada beberapa tanah lapang, termasuk Great Lawn, Oval, dan Sheep Meadow.

8. Taman Washington Square

Taman Washington Square adalah taman umum seluas 9,75 hektar (24,1 are)



Taman Washington Square

yang terletak di Greenwich Village, Manhattan, New York City. Taman ini adalah taman kota paling terkenal di antara 1.900 taman umum di New York City.

Taman ini dinamai menurut nama George Washington, yang diresmikan di New York City sebagai presiden pertama Amerika Serikat pada 30 April 1789. Dulu merupakan rawa yang diberi makan oleh Minetta Brook, yang terletak di dekat desa India Sapokanikan. Taman ini dirancang ulang pada tahun 1826 oleh arsitek landscape dan surveyor kota New York, Egbert Ludovicus Viele, dalam gaya pedesaan Inggris.

9. Masjid Al-Hikmah

Masjid Al-Hikmah di Astoria, Queens. Masjid ini terletak di 48-01 31st Avenue, Astoria, NY 11103. Masjid ini dikelola oleh Diaspora Muslim Indonesia dan memiliki jamaah warga Indonesia dan warga muslim perantau dari berbagai negara.

Masjid ini dibangun dari dana yang di-himpun dari komunitas muslim Indonesia di New York, juga dari para pengusaha muslim di Indonesia dan donasi dari berbagai pihak. dahulu upaya yang dilakukan adalah menggelar pengajian dari rumah ke rumah. Hingga akhirnya komunitas Muslim bisa membeli tanah dan mendirikan masjid ini.

10. Pesantren Nur Inka Nusantara Madani

Pesantren Nur Inka Nusantara Madani (PINM) adalah pesantren pertama di



Amerika Serikat yang terletak di Moodus, Connecticut. Pesantren ini didirikan oleh Imam Shamsi Ali, seorang cendekiawan Muslim Indonesia-Amerika, dengan tujuan untuk: Mengembangkan dakwah global dan mendukung perdamaian dunia.

Pesantren Nur Inka Nusantara Madani adalah tempat yang bagus bagi siswa Muslim untuk belajar tentang Islam dan budaya mereka. Pesantren ini juga merupakan tempat yang bagus bagi siswa dari semua latar belakang untuk belajar tentang perdamaian dan toleransi.

11. IMAAM Center

IMAAM Center merupakan masjid dan

pusat komunitas bagi Muslim Indonesia di Amerika Serikat. Terletak di Silver Spring, Maryland, IMAAM Center menawarkan berbagai program dan layanan, termasuk: Sholat berjamaah, pendidikan Islam, kegiatan budaya Indonesia dan layanan sosial.

IMAAM Center terbuka untuk umat Islam yang ingin berkunjung untuk mendirikan sholat berjamaah atau acara publik

lainnya. Masjid terbuka untuk para wisatawan muslim yang menjadwalkan tur atau mempelajari lebih lanjut tentang program dan layanan mereka.

Itulah 11 destinasi wisata halal di Amerika Serikat yang bisa dikunjungi oleh Wisatawan Muslim, sebenarnya masih banyak lagi destinasi yang bisa dijadikan target untuk liburan bersama keluarga.

♦sumber:cheriatravel



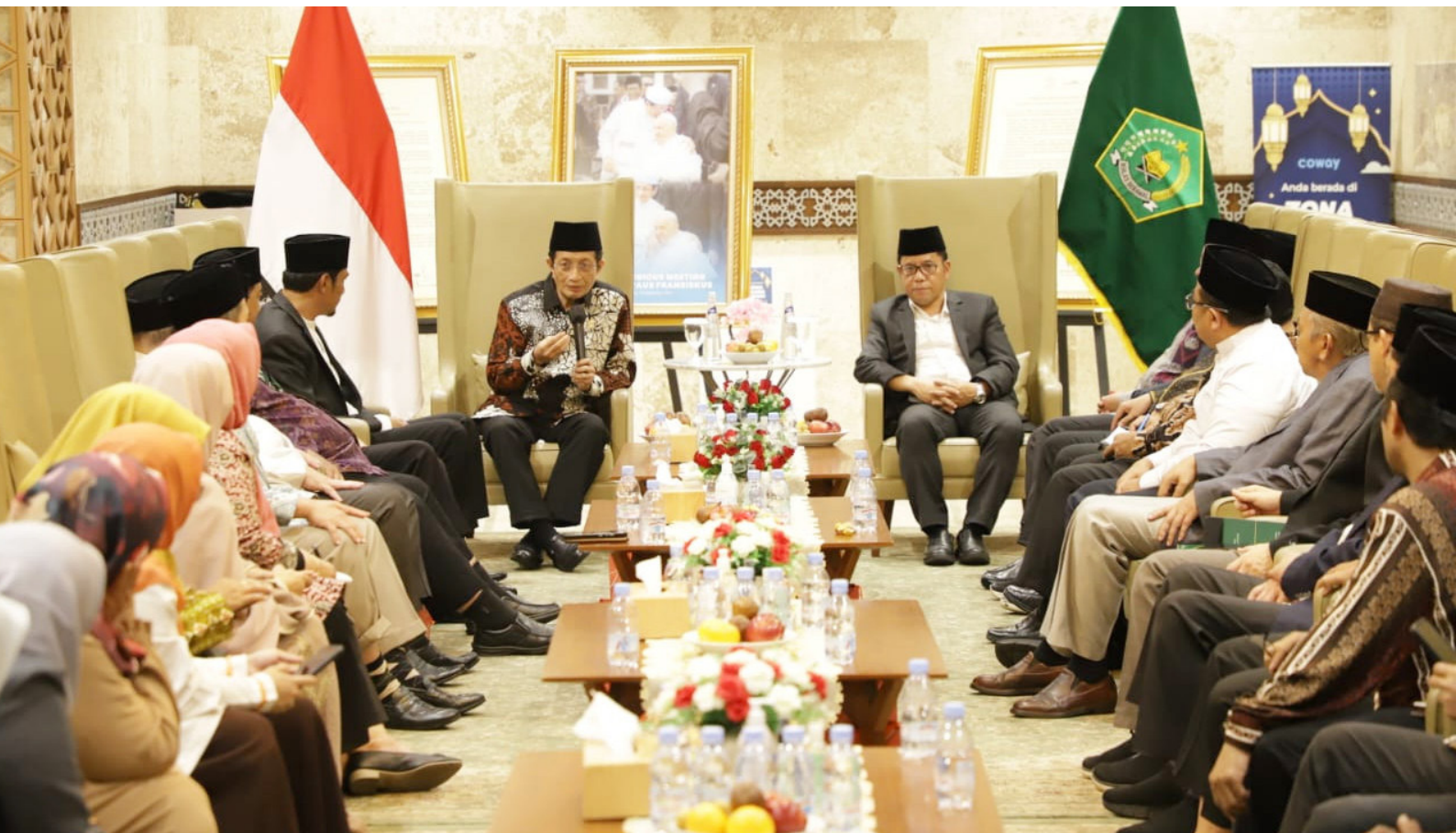
Masjid Al-Hikmah



Pesantren Nur Inka Nusantara



IMAAM Center



MENAG NASARUDDIN AJAK ORMAS KEAGAMAAN SOLID BANGUN UMAT DAN BANGSA

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengajak tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan agar selalu solid dalam membina dan membangun kehidupan keagamaan yang lebih baik untuk kemaslahatan bangsa.

"Saya mengajak para tokoh agama dan seluruh ormas agar selalu solid, abaikan perbedaan yang mengahar perpecahan. Saya senang dan bahagia bertemu dengan para tokoh agama malam ini. Para tokoh agama memikirkan bangsa ini siang malam tanpa kenal lelah," kata Menag Nasaruddin Umar, Kamis (19/12/2024).

Menag menambahkan, dan berharap semoga para tokoh agama tidak bosan melihat dirinya.

"Karena, saya akan sering mengundang para bapak/ibu. Semakin banyak kepala yang memikirkan persoalan bangsa, maka akan semakin baik dari pada satu kepala yang memikirkannya. Kita solid dan

bersama-sama memecahkan persoalan keumatan," tambah Menag Nasaruddin Umar.

Menag juga menyampaikan, bahwa saat ini banyak tempat yang bisa dijadikan ruang pertemuan. Gedung dan ruangan di Istiqlal, gedung MH Thamrin, dan gedung Kementerian Agama Lapangan Banteng.

"Saya sengaja memilih tempat pertama untuk pertemuan malam ini di Masjid Istiqlal untuk keberkahan perjumpaan ini," kata Menag.

Lebih lanjut, Menag mengatakan, untuk ke depannya, pertemuan dengan para tokoh-tokoh agama, akan semakin sering dilakukan. Di Masjid Istiqlal, setiap malam jumat banyak kegiatan, seperti membaca Yasin, Tafsir, mengaji, shalat sunnat, dan

muhasabah.

"Alhamdulillah, sampai saat ini berjalan lancar dan semakin banyak yang mengikutinya dari berbagai daerah. Di Masjid ini juga sebagai tempat untuk curhat kepada Tuhan. Ini rutin kita lakukan. Dan banyak orang-orang hebat dan terpandang yang hadir," imbuh Menag

Menag Nasaruddin Umar, juga berpesan kepada seluruh tokoh agama yang hadir, agar tidak sungkan ketika ada hal-hal yang perlu dilakukan.

"Saya dan Dirjen Bimas Islam siap membantu. Kita sama. Apa yang kita miliki di Kemenag, akan kita share. Apa yang bisa kami bantu, mohon disampaikan," ungkap Menag.

Seperti misalnya, ada persoalan perkawinan, pelecehan seksual, asusila

dan lain-lain. Kementerian Agama concern untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan.

"Saya mohon kita bersama-sama dan solid menyelesaikan persoalan keumatan. Ini menjadi concern bersama. Banyak persoalan global, kalau kita tidak solid, maka akan semakin parah. Jangan sesama kita saling fitnah," tegas Menag.

Menag Nasaruddin Umar juga mengajak seluruh tokoh agama untuk menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan bersama untuk mencari solusi persoalan yang ada.

"Masjid juga bisa kita jadikan sebagai tempat pemberdayaan ekonomi

ide sertifikasi bagi muballigh. Menurut Menag, ide tersebut sudah bergulir sejak lama. Sebagai sebuah ide, Menag minta hal tersebut dikaji secara komprehensif dan tidak reaktif.

"Kita tidak bisa juga reaktif, ketika ada masalah langsung sertifikasi dan lainnya. Itu namanya reaktif, Apakah itu menye-

dakwah, yaitu: Materi Dakwah, Metode Dakwah, Media Dakwah, Objek Dakwah, dan ada Pendakwah.

"Jadi mubaligh hanya satu di antara lima faktor. Tidak mungkin bisa selesai persoalan kalau hanya menyelesaikan satu faktor; harus komprehensif. Siapa pendakwahnya? Siapa yang akan didakwahi?



Saya sengaja memilih tempat pertama untuk pertemuan malam ini di Masjid Istiqlal untuk keberkahan perjumpaan ini.

masyarakat. Spirit kebersamaan harus terus dibangun. Insya Allah, kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan besar lewat masjid ini," imbuh Menag.

Menag juga mengatakan, bahwa Masjid Istiqlal, telah memiliki program kader ulama yang sepenuhnya dibiayai oleh negara.

"Semakin sering ke Istiqlal, maka semakin banyak diplomasi yang kita dapatkan. Istiqlal akan menjadi tempat perubahan dan perkembangan umat yang lebih baik," terangnya.

Sementara itu, Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin, menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, yang telah meluangkan waktu untuk pertemuan dengan para tokoh agama.

"Terima kasih Pak Menteri. Peserta yang hadir di sini adalah para pimpinan ormas, dan tokoh agama yang terdiri dari 38 Ormas. Semoga kehadiran kita di sini membawa berkah," kata Kamaruddin Amin dalam sambutannya.

Terkait Sertifikasi Muballigh, Menag Bicara Pentingnya Lima Unsur Dakwah

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar memberikan pandangannya terkait



lesaikan persoalan? Apakah nanti tidak menimbulkan persoalan baru?," kata Menag Nasaruddin Umar, di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Menag menjelaskan, bahwa dirinya sependapat dengan pandangan sejumlah kalangan, termasuk DPR, bahwa kompetensi dalam dakwah sangat penting. Dan apabila berbicara tentang dakwah, maka itu tidak hanya terkait dengan pendakwah (sertifikasi muballigh).

Menurut Menag, paling tidak ada lima hal yang harus diperhatikan dalam

Bagaimana metodenya? Apa materinya? Dan media apa yang digunakan untuk berdakwah? Jadi komprehensif," ungkap Menag.

Menag menilai kelima unsur dakwah ini, harus digarap secara profesional, bukan hanya satu tentang sertifikasi. Sekalipun ada sertifikasi, tapi jika materinya tidak diatur, media dakwahnya tidak diatur, audiensnya yang akan mendengarkan juga tidak terpolakan, dan alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan dakwah juga tidak teratur, itu tidak berkontribusi aktif.

"Kita ingin komprehensif. Ini yang menurut hemat saya itu, yang profesional. Bukanlah suatu gagasan profesional itu berkonsentrasi hanya pada satu unsur, tapi unsur lainnya tidak. Ini agak sedikit lebih sistematis, komprehensif," tegasnya.

Menag pun yakin dan percaya bahwa masyarakat Indonesia saat ini sudah matang.

"Kita berterima kasih kepada para Founding Father's kita. Mereka tidak hanya bicara tapi mengamalkan apa yang mereka bicarakan. Kita harus belajar banyak dari

Menag menambahkan, MTQ untuk imam masjid ini adalah bagian dari upaya memberdayakan imam-imam di masyarakat. Menurut Menag, jika umat Islam ingin maju, maka harus mulai dari memberdayakan imam masjidnya.

"Selain untuk memperkenalkan dan menyiarkan Al-Quran, juga untuk mengkader imam kita supaya nanti tampil sebagai imam yang percaya diri, dan punya keterampilan-keterampilan dalam bidang Al-Quran," ujar Menag menjelaskan.

Menag menekankan bahwa MTQ ini

awal yang baik dan terus berkembang menjadi ajang yang memperkuat ikatan umat serta memajukan kualitas imam di Indonesia," tutup Menag.

Sementara itu, Ketua Panitia MTQ, Mas'ud Halimin, dalam laporannya menyampaikan bahwa MTQ imam masjid pertama ini, diikuti oleh hampir 400 peserta.

"Karena antusias dari para peserta sangat besar, terbukti dari jumlah pendaftar yang mencapai hampir 400 orang," kata Mas'ud.

Turut hadir dalam acara tersebut, Pe-



para Founding Father's kita, dari Sabang sampai Merauke, kelapangdadaannya menerima perbedaan itu dahsyat," pungkaskan Menag.

Menag Buka MTQ Antarimam Masjid Pertama di Indonesia

Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) khusus untuk imam masjid se-Jabodetabek digelar untuk pertama kalinya di Kota Bekasi. Untuk gelaran pertama ini, dibuka langsung oleh Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar.

"MTQ untuk para imam sendiri baru pertama kali ya ini ada di Indonesia. Kita berharap tahun-tahun berikutnya itu bisa meningkat ke tingkat nasional. Ini masih di Jabodetabek, tahun berikutnya insya Allah tingkat Nasional," kata Menag Nasaruddin Umar, di Bekasi, Jumat (20/12/2024).

juga menjadi wadah untuk menyiapkan kader-kader imam muda seiring dengan makin bertambahnya jumlah masjid di Indonesia.

"Sekarang ada sekitar 850.000 masjid, belum termasuk mushala dan langgar. Semua itu membutuhkan imam, dan ini adalah satu wadah untuk melahirkan imam-imam yang berkualitas," ungkap Menag.

Indonesia, lanjut Menag, sangat diminati oleh banyak negara untuk mengirimkan imam. Beberapa negara, seperti Amerika, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab, bahkan meminta imam dari Indonesia untuk memimpin shalat dan kegiatan keagamaan mereka.

"Ini adalah kebanggaan tersendiri. Setiap kali ada MTQ Internasional di negara-negara Arab, yang menonjol adalah kualitas Indonesia. Semoga ini menjadi

nasehat DWP Kemenag, Helmi Halimatul Udhmah.

Haul Gus Dur, Menag: Gus Dur Tetap Hidup dalam Doa

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan pesan mendalam di acara Haul Presiden Keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ke-15. Menag menegaskan, bahwa Gus Dur tidak benar-benar 'mati' dalam arti total, melainkan hanya berpindah ke terminal berikutnya dalam perjalanan kehidupan.

"Gus Dur sekarang ini sedang menikmati parcel doa yang dikirimkan oleh kita semua. Doa yang kita panjatkan untuk beliau, untuk orang-orang yang telah mendahului kita, merupakan bentuk kasih sayang yang akan terus hidup," kata Menag Nasaruddin Umar dalam acara

Haul yang digelar di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12/2024).

"Jadi semoga Bapak-Ibu sekalian, kita semuanya mendoakan Gus Dur, dzuriatnya, doakan orang-orang yang penting dalam hidup kita," imbuh Menag di hadapan para jamaah yang hadir.

Dalam kesempatan tersebut, Menag juga membagikan pengalamannya bersama Gus Dur saat berziarah Bersama ke makam Syekh Jamaluddin di Tosora, Wajo, yang diyakini Gus Dur sebagai guru sejati Wali Songo.

Parawansa.

Sementara itu, Ketua panitia, sekaligus putri Gus Dur, Yenny Wahid menekankan prinsip hidup Gus Dur yang selalu menajamkan nurani dan membela kaum lemah.

"Banyak dari kita yang mengenang Gus Dur sebagai sosok yang tidak bisa melihat secara fisik. Tetapi nuraninya begitu tajam. Dengan nuraninya itulah Gus Dur mampu melihat ketidakadilan. Mampu mendengar jeritan hati rakyat kecil di tengah kebisingan kekuasaan," ungkap Yenny.

anak tersebut, kalau ingin menghafal (seluruh) Al-Quran, harus jujur sejujurnya dan tidak berbohong. Menag kemudian bercerita tentang Imam Syafi'i. Menurutnya, Imam Syafi'i sudah hafal Al Quran pada usia lima tahun.

"Resepnya adalah tinggalkan dosa. Berbakti kepada orangtua/guru. Dan mulutnya dipelihara jangan berbohong," kata Menag Nasaruddin Umar.

Selain itu, Menag juga berkisah tentang Syekh Abdul Qodir Jailani yang hafal Al-Quran pada umur lima tahun. Ketika itu,



Menurut Menag, Gus Dur memiliki kepekaan luar biasa yang melampaui pengetahuan konvensional.

"Gus Dur adalah pribadi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sementara banyak di antara kita yang masih bergulat dengan ego masing-masing. Kita patut meneladani beliau, meski hanya sebagian kecil dari keikhlasan dan keberaniannya," ungkapnya.

Acara haul yang berlangsung khidmat ini, turut dihadiri oleh Istri Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid, dan keluarga besar almarhum. Sejumlah tokoh penting juga hadir, di antaranya Menteri Sosial, Saifullah Yusuf; Menteri PPPA, Arifah Choiri Fauzi; Wamen PPPA, Veronica Tan, serta figur publik seperti Pramono Anung, Mustofa Bisri, Mahfud MD, Sujiwo Tejo, Rano Karno, dan Khofifah Indar

Hadiri Wisuda 2.032 Santri Hafal Juz 30 Al Quran, Menag Berpesan Jaga Kejujuran

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menghadiri wisuda 2.032 santri Madrasah Ibtidaiyah se-Jombang yang hafal Juz 30 Al Quran. Ribuan wisudawan ini berasal dari 21 kecamatan di Jombang, Jawa Timur. Menag mengaku terharu dan berpesan tentang kejujuran sebagai kunci menghafal Al Quran

"Saya bangga melihat anak-anakku, ribuan santri, anak bangsa yang hafal Al-Quran, dan diwisuda hari ini," kata Menag Nasaruddin Umar, di Masjid Agung Baitul Mukminin, Jombang, Jawa Timur. Minggu (22/12/24).

Menag juga berpesan kepada anak-

Syekh Abdul Qodir Jailani disuruh Ibunya untuk nyantri ke Kota Bagdad yang jaraknya 2.500 KM dari Makkah. Perjalanannya ditempuh dengan menaiki seekor unta. Di tengah perjalanan, Syekh Abdul Qodir Jailani dan rombongan saudagar dirampok.

"Syekh Abdul Qodir Jailani ditanya sang perampok, mana harta dan uangmu. Syekh Abdul Qodir Jailani menjawab, saya tidak punya harta, saya ingin nyantri ke Bagdad, tapi uangku ada di jahitan bajuku ditaruh oleh Ibu. Sang rampok pun tercengang, karena kejujuran Syekh Abdul Qodir Jailani. Dan perampokpun akhirnya tau bat," terang Menag.

Dari kisah ini, menurut Menag, dapat diambil hikmah bahwa seorang perampok bisa tobat gegara kejujuran anak kecil yakni Syekh Abdul Qodir Jailani. ♦



KEMENAG UNGKAP PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH TUMBUH PESAT DI 2024

Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Forum Capaian Kinerja, Outlook Zakat, dan Wakaf Tahun 2025 di Auditorium H.M. Rasjidi, Kemenag, Jakarta pada Selasa (24/12/2024).

Dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenag, yang juga Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kamaruddin Amin, mengatakan, bahwa pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) mengalami pertumbuhan pesat. Penyalurannya juga meningkat.

"Pada 2024, pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) semester kedua mencapai Rp26,13 triliun, tumbuh 68,2% dibanding tahun sebelumnya. Jumlah penerima manfaat juga meningkat, mencapai lebih dari 75 juta jiwa," kata Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Menurut Kamaruddin, sektor zakat dan wakaf terus menunjukkan kontribusi dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia. Kamaruddin juga menyebut, bahwa pengumpulan ZIS-DSKL diperkirakan melampaui target Rp 41 Triliun. Sementara itu, aset wakaf uang mencapai Rp 2,7 Triliun, meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Hal yang sama juga diungkapkan Direktur Keuangan Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Dwi Irianti Hadiningdyah. Ia mengatakan, bahwa Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL), serta wakaf uang mengalami pertumbuhan pesat sepanjang 2024.

Dwi Irianti pun lalu memaparkan, total pengumpulan ZIS-DSKL secara nasional mencapai Rp 26,13 Triliun hingga kuartal kedua (Q2) 2024. Jumlah ini mencatat kenaikan 68,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Dana tersebut berasal dari 711 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang meliputi BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

"Lonjakan ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana sosial syariah semakin tinggi. Dana ini telah disalurkan kepada 75,54 juta jiwa penerima manfaat di seluruh Indonesia," tambah Dwi Irianti.

Selain ZIS-DSKL, akumulasi aset wakaf uang juga menunjukkan kinerja impresif. Menurut nya, hingga Oktober 2024, total



aset wakaf uang mencapai Rp 2,7 Triliun, tumbuh 229% sejak peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada Januari 2021. Pertumbuhan ini didorong oleh penerbitan 13 seri Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) dengan nilai akumulasi Rp1,159 Triliun atau 42,9% dari total aset wakaf.

Dwi Irianti menambahkan, peningkatan ini tidak terlepas dari penguatan ekosistem wakaf, termasuk sertifikasi 4.646 nazhir (pengelola wakaf) dan partisipasi 50 bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS PWU).

"Wakaf dan ZIS-DSKL kini menjadi instrumen strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis syariah dan pemberdayaan masyarakat. Kami juga memperkuat tata kelola dengan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," jelasnya.

Lebih lanjut, Dwi Irianti menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengelola zakat, dan masyarakat untuk menjaga momentum ini di 2025. Ia optimistis bahwa dana sosial syariah akan terus berkembang dan menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Menurut Dwi, keberhasilan ini menjadi

bukti ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang dan memiliki peran strategis mendorong kesejahteraan sosial serta pemerataan ekonomi. Pihaknya berkomitmen untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah dengan memperluas edukasi, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Kami optimistis bahwa wakaf uang dan dana sosial keagamaan lainnya akan menjadi instrumen yang semakin vital dalam membangun kemandirian ekonomi umat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis syariah," tegasnya.

MENGHASILKAN 4 REKOMENDASI

Acara Forum Overview dan Outlook Zakat dan Wakaf 2025 menghasilkan empat (4) rekomendasi. Rumusan rekomendasi ini bertujuan memperkuat peran zakat dan wakaf dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kemenag, Waryono Abdul Ghafur menyebut, rekomendasi ini mencakup empat (4) aspek utama, yaitu kolaborasi tata kelola, penguatan tata kelola, partisipasi muzaki dan wakif, serta ketepatan sasaran zakat dan wakaf.

Pada aspek kolaborasi tata kelola, Waryono menyebut, pentingnya sinergi antara

pemerintah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan lembaga zakat serta wakaf lainnya.

"Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mendukung penanggulangan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi pemanfaatan wakaf produktif juga menjadi prioritas, termasuk pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan," ungkap Waryono.

Berikut 4 Rekomendasi yang Dihasilkan:

A. Kolaborasi Tata Kelola Zakat dan Wakaf

1. Zakat: Penguatan kolaborasi sektor zakat dengan pemerintah, meliputi aspek perencanaan, kolaborasi program, serta integrasi data penerima manfaat, dengan program perlindungan sosial dan satu data kemiskinan.
2. Kolaborasi lintas stakeholder akan dapat berdampak dalam mendukung tujuan zakat dan wakaf, yaitu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Sinergi program antara Kemenag, BWI, dan BAZNAS dalam berbagai wakaf produktif. Misalnya wakaf produktif di Kota Wakaf, proyeknya di lahan wakaf, dan permodalan dari LAZ.

4. Memperkuat kerja sama antara pemerintah, lembaga pengelola zakat dan wakaf, lembaga filantropi internasional, serta sektor swasta untuk menarik potensi dana filantropi.
5. Meningkatkan sinergi antara zakat dan wakaf dengan program perlindungan sosial pemerintah untuk memperluas dampak dan keberlanjutan.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf untuk pelatihan keterampilan, seperti pemberdayaan usaha, pelatihan ekonomi kreatif, dan pengembangan industri halal.
7. Kolaborasi tata kelola zakat dan wakaf untuk mendukung inovasi digital.

B. Penguatan Tata Kelola Zakat dan Wakaf

1. Penguatan sistem transparansi, komprehensif, objek zakat dan wakaf; penguatan regulasi kebijakan adaptif.
2. Meningkatkan transparansi dan kedisiplinan dalam pelaporan zakat dan wakaf melalui sistem digital yang terintegrasi, termasuk pemanfaatan Big Data Regsosek untuk penyaluran dana yang tepat sasaran.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada pengelola zakat (amil) dan wakaf (nazir) guna meningkatkan kapasitas dan profesionalitas.
4. Mendorong optimalisasi pemanfaatan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).
5. Mengarahkan kontribusi zakat dan wakaf untuk mendukung transformasi ekonomi dalam RPJPN 2025–2045 melalui pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.
6. Penguatan fondasi transformasi: sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, kepemimpinan yang responsif, ketahanan sosial budaya serta ekologi.
7. Peningkatan posisi keuangan syariah Indonesia di tingkat global.
8. Penguatan ekosistem industri halal melalui pengembangan fashion muslim, industri kosmetik dan obat-obatan, pariwisata dan ekonomi kreatif, penguatan rantai nilai industri, kewirausahaan, dan UMKM industri halal.
9. Harmonisasi lembaga pemerintah seperti ATR BPN terkait aset wakaf.
10. Indonesia Special Mission Vehicle (ISNV).

C. Partisipasi Muzaki, Wakif, dan Pihak Lainnya

1. Wakaf: Penumbuhan partisipasi wakaf yang berbasis pendekatan *„wealth management“* dan komunitas (ormas

dan perguruan tinggi). Penumbuhan aset wakaf komersial berbasis kolaborasi nazir, pelaku usaha, dan creative financing/blended financing.

2. Penguatan muzaki bagi objek zakat selain pendapatan dan jasa.
 3. Penguatan wakif deposito dengan produk inovasi CWLD.
 4. Penguatan partisipasi masyarakat Muslim untuk wakaf dan Gerakan Ekonomi Syariah.
 5. Sinergi dan konvergensi program zakat dan wakaf.
- D. Tepat Guna dan Sasaran Zakat dan Wakaf
1. Mengintegrasikan para pengelola zakat dan lembaga penyalur dana filantropis agar tepat sasaran dan tidak double count.
 2. Penguatan basis data terpadu akses zakat dan wakaf dengan ekonomi atau P3KE.
 3. Pengelola wakaf memiliki pengukuran dampak wakaf untuk bidang sosial dan ekonomi.
 4. Optimalisasi objek wakaf selain uang.

Kemenag Luncurkan 8 Buku Panduan dan Strategi Pengelolaan Zakat Wakaf

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama (Kemenag), Waryono Abdul Ghafur, meluncurkan 8 Buku Strategi Pengelolaan Zakat dan Wakaf. Peluncuran tersebut dilaksanakan dalam acara “Overview dan Outlook Zakat dan Wakaf 2025” di Aula HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

Berikut 8 Buku Strategi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama:

1. Kamus Kompetensi SDM Amil Zakat
Buku ini dirancang sebagai panduan untuk menetapkan standar kompetensi bagi amil zakat.
“Buku ini mengelompokkan tiga kompetensi amil, yaitu kompetensi inti, manajerial, dan teknis. Harapannya, buku ini mampu meningkatkan profesionalisme serta transparansi dalam pengelolaan zakat,” kata Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono Abdul Ghafur, di Jakarta, Selasa (24/12/2024).
2. Cetak Biru Pengembangan SDM Amil Zakat 2025-2029
Buku ini disusun sebagai peta jalan pengembangan SDM amil zakat di era digital. Selain itu, buku tersebut menyoroti pentingnya pelatihan digital dan manajerial untuk menjawab kebutuhan zaman.
“SDM amil harus memiliki kecakapan kontemporer di bidang akuntansi,

manajerial, dan teknologi digital,” ungkap Waryono.

3. Profiling Pemetaan SDM BAZNAS dan LAZ

Buku ini mengidentifikasi tantangan utama dalam pengelolaan SDM amil zakat, seperti kekurangan tenaga kerja, rendahnya profesionalisme, serta kebutuhan pelatihan berkelanjutan. “Buku ini menekankan pentingnya digitalisasi, peningkatan remunerasi,



dan sinergi lintas lembaga,” jelas Waryono.

4. Kumpulan Permasalahan Hukum Wakaf Tanah Kontemporer
Tidak hanya tentang zakat, Waryono juga meluncurkan buku bertema wakaf. Buku ini menjadi buku yang ke-4 yang diluncurkan.

“Buku ini membahas isu-isu hukum, termasuk konflik administratif, kenaziran, dan tantangan ruislag, dengan pendekatan fikih dan hukum positif. Buku ini diharapkan menjadi acuan utama dalam memperkuat pengelolaan wakaf tanah di Indonesia,” jelas

- Waryono.
5. Modul Pembinaan Penyelenggara Zakat Wakaf
Sebuah buku panduan praktis berbasis pendekatan andragogi dan metode Proses U.
"Modul ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas Penyelenggara Zakat Wakaf (PZW) di bidang regulasi, advokasi, kepemimpinan, dan pengelolaan dana sosial keagamaan,"

7. Terjemahan Regulasi Zakat dan Wakaf ke dalam Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.
Buku ini disusun untuk memperkenalkan praktik baik pengelolaan zakat dan wakaf Indonesia di tingkat global sekaligus menjadi acuan standar bagi

- 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011,
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Lembaga Amil Zakat.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-



6. Zakat dan Wakaf: Inspirasi, Inovasi, dan Tantangan di Era Modern
Buku ini berisi kumpulan opini dan kebijakan strategis yang dirancang untuk mendukung pengelolaan zakat dan wakaf secara lebih efektif. Buku tersebut berfokus pada inovasi program, sertifikasi tanah wakaf, serta literasi berbasis teknologi.
Waryono mengatakan, buku ini bertujuan mengarahkan sinergi antar lembaga guna mempercepat transformasi sektor zakat dan wakaf di Indonesia.
"Buku ini menekankan pentingnya in-

- ovasi program, sertifikasi tanah wakaf, dan penguasaan teknologi sebagai pilar utama transformasi sektor zakat dan wakaf," tambahnya.
- 8. Terjemahan Regulasi Zakat dan Wakaf ke dalam Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.
Buku ini disusun untuk memperkenalkan praktik baik pengelolaan zakat dan wakaf Indonesia di tingkat global sekaligus menjadi acuan standar bagi

- 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011,
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Lembaga Amil Zakat.
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
8. Modul Praktis dan Pedoman Pembinaan Pengelolaan Zakat dan Wakaf
Buku ini dirancang untuk membantu pengelola zakat dan wakaf memahami regulasi, fikih kontemporer, dan tata kelola yang profesional.
"Dengan format yang mudah dipahami, buku ini diharapkan menjadi referensi utama bagi amil dan nazir di Indonesia," ungkap Waryono. ♦



WAMENDAGRI PUJI PERAN KPU DAN BAWASLU PADA PEMILU 2024

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyukseskan Pemilu 2024, baik di pusat maupun daerah. Selain itu, penghargaan diberikan kepada Bawaslu atas perannya dalam memastikan transparansi dan integritas selama pelaksanaan Pemilu.

Hal tersebut disampaikan dalam Launching Satu Peta Data Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 dan Perjalanan Pemilih Pemilu Tahun 2024 di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Kegiatan ini dirangkaikan dengan Pemberian Penghargaan terhadap Dukungan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

Ribka menegaskan pentingnya Pemilu sebagai tonggak demokrasi bangsa.

"Pemilu tidak hanya menjadi wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel," kata Wamendagri, Ribka Haluk di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Ribka menambahkan, komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

dalam mendukung Pemilu 2024. Kemendagri telah melaksanakan tugasnya, mulai dari pembinaan pemerintahan daerah agar tetap kondusif selama pemilihan, hingga fasilitasi data kependudukan yang akurat untuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

"Semua ini dilakukan sebagai bagian dari upaya kita untuk memastikan Pemilu berlangsung aman, jujur, adil, dan demokratis," tambahnya.

Selain itu, Ribka pun mengapresiasi sinergi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Menurutnya, keberhasilan Pemilu tidak hanya bergantung pada satu pihak. Namun, kesuksesan ini berkat kolaborasi banyak pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), KPU, Bawaslu, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan masyarakat.

Kolaborasi ini menjadi bukti nyata se-



mangat kebersamaan untuk menjaga demokrasi dan melindungi hak politik rakyat.

"Keberhasilan Pemilu ini tentu bukan hasil kerja satu pihak saja. Ini adalah buah



Pemilu tidak hanya menjadi wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel

dari kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak di tingkat pusat dan daerah," tegasnya.

Ribka mengakhiri sambutannya dengan menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan setelah pelaksanaan Pemilu 2024. Ia pun berharap, momentum tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia sekaligus memperkuat persatuan bangsa.

"Momentum ini harus kita manfaatkan untuk memperkuat stabilitas nasional

Bima menambahkan, selain sikap tegas melawan korupsi, Presiden juga mengimbau kementerian/lembaga termasuk Pemda untuk melakukan langkah efisiensi dan mengutamakan kepentingan rakyat. Tak hanya itu, dirinya juga menjelaskan banyak target besar yang harus diprioritaskan Pemda di seluruh Indonesia. Program besar tersebut seperti swasembada pangan, hilirisasi, pengembangan desa, dan reformasi birokrasi.

"Nah itu target-target yang besar dan dahsyat Bapak/Ibu sekalian," imbuh Bima.



dan mendukung keberlanjutan pembangunan demi terciptanya Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera," pungkasnya.

Wamendagri Bima Arya Imbau Pemda Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Melayani

Pemerintah Daerah (Pemda) diimbau agar mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih dan melayani. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto di awal masa pemerintahannya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto pada Rapat dan Pengarahan Sinkronisasi Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Graha Sawunggaling Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur

"Target dari Bapak Presiden itu clear sekali kalau kita rangkum semua [arahannya yaitu mewujudkan] pemerintahan yang bersih dan melayani, itu intinya bersih, beliau ini tidak main-main, tegas sekali tidak ada korupsi," kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Graha Sawunggaling Pemerintah Kota Surabaya, Kamis (19/12/2024).

Lebih lanjut, Wamendagri mengatakan, untuk mencapai target besar tersebut, ada beberapa hal yang harus dicermati. Pertama, terkait dengan efisiensi anggaran. Menurutnya, semangat efisiensi harus satu frekuensi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Yang kedua Bapak/Ibu sekalian ini [target] pertumbuhan ekonomi delapan persen, ini tidak akan mungkin terwujud tanpa didukung oleh peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)," ungkap Bima.

Ia pun optimis kota Surabaya mampu mendukung berbagai target pertumbuhan tersebut dengan cara menjadi bagian dari mesin utama penggerak ekonomi. Ini terutama di sektor ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan PAD.

"Diminta agar dibentuk Dinas Ekonomi Kreatif, nah ini memang kita masih mencoba melakukan harmonisasi," tambah Bima

Di sisi lain, Bima juga mengaku banyak belajar dari kota Surabaya, terutama saat dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Bogor. Menurutnya, Kota Surabaya memberikan banyak inspirasi dalam hal keberhasilan.

"Saya belajar bagaimana Surabaya berkolaborasi dengan media membuat lomba kebersihan dari tingkat RT, saya tidak malu, saya balik lagi ke Bogor kita jiplak, kita duplikasi [inovasi kebersihan] Surabaya 100 persen, hasilnya Piala Adipura setelah 28 tahun kembali karena terinspirasi dari Surabaya," pungkas Bima.

Kepala BPSDM Kemendagri Tutup Diklat PKA-PKP Tekankan Pentingnya Skill Kepemimpinan

Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) secara resmi ditutup oleh Sugeng Hariyono, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Misalnya perang tarif, perang harga, perang investasi, perang insentif. Itu kan basically adalah perang.

(BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung F Kantor BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta.

Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) tersebut, diikuti 80 peserta yang merupakan pejabat aparatur di lingkup Kemendagri.

Wamendagri Sugeng dalam sambutannya, menekankan pentingnya skill kepemimpinan bagi pejabat aparatur. Menurutnya, keahlian tersebut akan membantu aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban.

Sugeng menambahkan, dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menulis buku berjudul "Paradoks Indonesia dan Solusinya". Salah satu poin yang termuat dalam buku tersebut yakni perlunya semua pihak untuk ber-



siap menghadapi perang. Adapun perang dalam konteks tersebut dapat dimaknai secara luas.

"Misalnya perang tarif, perang harga, perang investasi, perang insentif. Itu kan basically adalah perang, berkompetisi. Maka kita harus siap diri untuk berkompetisi dengan berbagai negara di dunia, termasuk kalau di daerah ya antara pemerintah daerah," kata Kepala BPSDM, Sugeng Hariyono di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Sugeng menambahkan, sebagai bangsa yang besar, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pangsa pasar komoditas. Berbagai kekayaan alam yang dimiliki Indonesia semestinya dapat dikelola dengan baik secara mandiri oleh bangsa.

Karena itulah, tambah Sugeng, kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan swasembada pangan menjadi relevan.

"Di situlah peran para pemimpin. Baik itu dilihat dari [pejabat] pengawas, administrator, apalagi bagi pimpinan kita. Kita punya tugas untuk membuat organisasi yang kita pimpin memahami beberapa situasi tadi, permasalahan. Memahami apa yang kita hadapi dan ancaman ke depan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sugeng mengatakan, dalam waktu dekat Indonesia memiliki momentum berharga dalam memajukan pembangunan nasional. Pasalnya, pada 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sugeng dalam konteks ini, meminta

para aparatur di lingkup Kemendagri untuk turut serta dalam memastikan kebijakan nasional terselenggara dengan baik di daerah.

"Kita harus memastikan bahwa agenda besar kita sampai 2045. Tentu upaya itu membutuhkan sekali lagi kesadaran kolektif dan kita semua di Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan tugas kewenangan kita masing-masing," tegasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Hyronimus Rowa; Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Suryawan Hidayat; Sekretaris Korpri Kemendagri Belly Isnaeni, dan Plh. Kepala Pusat (Kapus) Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan BPSDM Kemendagri, Tutik Lestari. ♦





PASTIKAN NATARU AMAN, MENDAG BUSAN PANTAU STABILITAS HARGA BAPOK DI BERBAGAI DAERAH

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso atau Mendag Busan, menyatakan komitmen Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk tetap menjaga stabilitas harga dan kelancaran pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Kemendag secara rutin memantau harga dan pasokan bapok, baik ke pasar maupun distributor di berbagai wilayah.

"Kami di Kemendag berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bapok menjelang Nataru (Natal dan Tahun Baru), agar masyarakat Indonesia dapat merayakannya dengan nyaman," kata Mendag Budi Santoso, di Jakarta.

Menjelang Nataru, Mendag Busan telah memantau harga ke pasar di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Manado, Medan, Surabaya, Malang, Yogyakarta, dan Bandung. Dalam waktu bersamaan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, juga turut memantau distributor MINYAKITA dan mengawasi Harga Eceran Tertinggi (HET)-nya ke berbagai wilayah.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Kemendag, untuk memastikan dan menjamin ketersediaan pasokan dan kestabilan harga bapok bagi masyarakat. Selain itu, Kemendag bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan pemerintah daerah untuk rutin menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Program tersebut menyediakan bapok dengan harga terjangkau, khususnya di wilayah yang mayoritas penduduknya merayakan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Upaya lain yang dilakukan Mendag Busan dalam menjaga stabilitas harga dan stok bapok adalah dengan memantau rutin harga bapok secara real-time melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikelola Kemendag.

Data harga di SP2KP ini diperbarui se-

cara harian oleh kontributor dinas yang membidangi perdagangan di seluruh wilayah Indonesia.

SP2KP Kemendag dapat diakses melalui tautan <https://sp2kp.kemendag.go.id/>.

"Sebagai sistem peringatan dini, kami secara rutin juga memantau SP2KP, termasuk pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), seperti Natal ini. Kemendag dapat mengambil langkah intervensi yang diperlukan apabila ditemukan fluktuasi di lapangan sehingga masyarakat Indonesia dapat menyambut Nataru dengan nyaman," kata Mendag Busan.

Mendag Ajak Pelaku UMKM Kota Bandung Manfaatkan Fasilitas Perluasan Pasar dari Kemendag

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso mengajak para pelaku UMKM, khususnya di Kota Bandung, untuk memanfaatkan program pening-



Kemendag terus mendukung usaha-usaha dan industri kita dengan berbagai cara agar mereka dapat terus meningkatkan kemampuan ekspor.

katan ekspor dari Kementerian Perdagangan.

Mendag Budi Santoso berharap, program tersebut menjadi pendorong bagi UMKM untuk menjadi eksportir dan menasar pasar global. Hal tersebut diungkapkan Mendag saat mengunjungi dua pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bandung, Jawa Barat.

Kedua UMKM tersebut adalah Tegep Boots & Accessories yang memproduksi alas kaki dan aksesoris berbahan kulit, serta Machine 56 yang memproduksi helm produksi terbatas berkonsep collectable art. Keduanya menjadi kisah sukses UMKM yang telah mampu merambah pasar ekspor.

"Kemendag berkomitmen mendorong agar UMKM, termasuk di Kota Bandung, mampu bersaing di pasar internasional. Salah satu upayanya, melalui pem-

berian fasilitas peninjauan kerja sama bisnis (business matching) setiap bulan untuk mempertemukan UMKM dengan pembeli internasional," kata Mendag Budi Santoso, di Bandung, Jawa Barat, Senin (23/12/2024).

Mendag Budi menekankan pentingnya membuka akses pasar bagi UMKM. Menurutnya, kerja sama dengan perwakilan perdagangan RI dan agregator di luar negeri dapat memperluas peluang pelaku usaha Indonesia untuk masuk pasar ekspor dengan cara mengikuti sertakan pada setiap ajang pameran internasional.

Mendag juga mengajak UMKM bergabung dalam salah satu program Kemendag, yakni UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor). Program ini adalah pendampingan

Bandung ini. Ia mengajak UMKM ini untuk memanfaatkan business matching Kemendag agar dapat memperluas pasar ke mancanegara.

"Tegep Boots ini karya asli Bandung dengan desain yang sangat bagus dan sesuai permintaan (custom). Kami akan bantu memperluas akses ke pasar global melalui program business matching, termasuk ke Milan, Italia," ujarnya.

Founder Tegep Boots & Accessories, Etnawati Melani, mengungkapkan UMKM ini telah merambah pasar Amerika Serikat, Prancis, dan Australia. UMKM ini juga membuat produk sepatu untuk merek Boho dari Inggris untuk model sepatu bot.

"Kami terus berinovasi dan tampil beda agar mudah mendapatkan pasar. Kami selalu berkomitmen terhadap pel-



UMKM untuk meningkatkan kapasitas produk serta pemasarannya. UMKM BISA Ekspor juga menawarkan fasilitas pelatihan sehingga UMKM peserta mampu beradaptasi dalam menghadapi tantangan pasar global.

"Kemendag terus mendukung usaha-usaha dan industri kita dengan berbagai cara agar mereka dapat terus meningkatkan kemampuan ekspor. Namun demikian, hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah peningkatan daya saing," tambah Mendag.

Dalam kunjungan ke Tegep Boots & Accessories, Mendag Budi sempat melihat-lihat beberapa produk, sekaligus mencoba dan membeli sepatu boot asli

anggan dan menjaga kontrol kualitas untuk pembeli," ungkap Etnawati.

Mendag Budi juga menyoroti keberhasilan Machine56, produsen helm collectable art yang 95 persen produknya diperuntukkan ekspor.

"Hal Ini menunjukkan bahwa Bandung memiliki potensi besar di pasar internasional," kata Mendag Budi.

Dalam kunjungannya ini, Mendag Budi didampingi Pj. Gubernur Jawa Barat, Bayu Machmudin; Pj. Wali Kota Bandung, A. Koswara; dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih. Turut mendampingi pula, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Moga Simatupang. ♦

PEMERINTAH SIAPKAN RP 20 TRILIUN UNTUK KREDIT INVESTASI PADAT KARYA

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri nasional, Pemerintah meluncurkan skema kredit/ pembiayaan baru yakni Kredit Investasi Padat Karya.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Skema Kredit Investasi Padat Karya ini dirancang khusus guna mendukung revitalisasi mesin dan peningkatan produktivitas di sektor industri padat karya. Melalui skema ini, pelaku industri dapat mengakses pembiayaan untuk memodernisasi peralatan dan meningkatkan efisiensi produksi. Skema kredit ini menawarkan sejumlah fitur menarik, antara lain plafon pinjaman di atas Rp500 juta hingga

Untuk mendapatkan kredit ini, calon penerima harus memenuhi sejumlah syarat, di antaranya:

- 1) Memiliki usaha yang produktif dan layak;
- 2) Memiliki pengalaman usaha minimal 2 tahun; dan
- 3) Memiliki paling sedikit 50 tenaga kerja yang diharapkan dapat meningkatkan seiring peningkatan kapasitas produksi karena revitalisasi mesin yang dilakukan.

"Pemerintah menyediakan anggaran subsidi bunga/ marjin yang cukup untuk proyeksi penyaluran Skema Kredit Investasi Padat Karya ini mencapai target penyaluran sebesar Rp 20 Triliun pada tahun



Rp10 miliar, suku bunga/ marjin yang lebih rendah dari kredit komersial, dan jangka waktu pinjaman fleksibel antara 5-8 tahun.

Skema kredit ini ditujukan untuk sektor-sektor industri padat karya, seperti pakaian jadi, tekstil, furnitur, kulit, barang dari kulit, alas kaki, mainan anak, serta makanan dan minuman.

2025. Hal ini merupakan bukti konkret keseriusan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing industri padat karya nasional dan menciptakan lapangan kerja baru," kata Menko Ekonomi, Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Peluncuran skema kredit ini, merupa-

kan salah satu dari paket kebijakan Pemerintah yang lebih luas untuk menyelamatkan dan memperkuat industri di Indonesia.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong transformasi industri melalui berbagai instrumen, seperti insentif fiskal, kemudahan perizinan, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan riset dan inovasi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Resmi! Target KUR 2025 Naik Menjadi Rp300 Triliun

Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali mencatatkan kinerja positif di tahun 2024. Dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (24/12/2024), mengungkapkan sejumlah capaian program KUR, sekaligus merumuskan kebijakan strategis untuk optimalisasi KUR di tahun 2025, yang salah satunya mengakomodir penerapan Innovative Credit Scoring (ICS) sebagai salah satu opsi dalam menentukan kualitas calon debitur KUR.

Penyaluran KUR Tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dengan penyaluran di sektor produksi mendominasi, bahkan sebelum akhir tahun 2024.

Realisasi penyaluran KUR hingga 23 Desember 2024 mencapai Rp280,28 Triliun, atau 100,10% dari target tahun 2024. Angka ini tumbuh sebesar 7,8% (yoy) dan disalurkan kepada 4,92 juta debitur. Komposisi penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi yang mencapai 57,8% dari total penyaluran, menunjukkan keberhasilan KUR dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dan UMKM.

Meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global maupun domestik, kualitas penyaluran KUR tetap terjaga dan ditunjukkan melalui tingkat Non-Performance Loan (NPL) KUR sebesar 2,19% terjaga di bawah NPL nasional sebesar 2,21%. Peningkatan kualitas penyaluran KUR juga ditunjukkan melalui jumlah total debitur baru KUR per 31 Oktober 2024 mencapai 2,52 juta debitur atau 107,65% dari target debitur baru KUR tahun 2024 paling sedikit 2,34 juta debitur.

Hal tersebut dilihat juga dari peningkatan akses pembiayaan, debitur KUR yang bergraduasi di tahun 2024 mencapai lebih dari 1,30 juta debitur atau 111,24% dari target debitur graduasi KUR yang telah

ditetapkan paling sedikit 1,17 juta debitur.

"Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan program KUR di Tahun 2025. Target penyaluran KUR tahun depan akan dioptimalkan sampai dengan Rp300 Triliun, agar program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian," tambah Menko Airlangga.

Sedangkan untuk tahun 2025, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR maksimal sampai dengan Rp300 Triliun dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga/ subsidi marjin KUR Tahun Anggaran 2025.

Dengan penetapan target penyaluran KUR tersebut, diharapkan penyaluran KUR tahun depan mampu menjangkau lebih dari 2 juta debitur KUR baru dan 1 juta debitur KUR yang bergraduasi.



Fokus penyaluran KUR kepada debitur baru diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM tanah air, sementara program pendampingan untuk mendorong graduasi debitur KUR akan mendorong mereka naik kelas baik secara kapasitas usaha maupun peningkatan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya.

Rapat koordinasi kali ini, juga menghasilkan sejumlah keputusan strategis untuk penguatan ekosistem KUR, antara lain:

1) Penataan kelembagaan termasuk sekretariat komite yang masih berjalan baik di unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan penetapan kembali KPA KUR akibat perubahan

nomenklatur susunan organisasi di masing-masing kementerian/ lembaga anggota Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, yakni Kementerian UMKM dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

2) Menyetujui usulan perubahan Permenko Pedoman Pelaksanaan KUR untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyaluran KUR pada tahun 2025;

3) Menyetujui penyesuaian kebijakan Program Kredit Usaha Alsintan sebagai dukungan menyukseskan program ketahanan pangan;

4) Rakor juga menyetujui untuk meningkatkan dukungan pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), antara lain melalui skema linkage dan serta memperluas lembaga keuangan yang dapat menyalurkan KUR PMI sehingga KUR semakin

mudah diakses;

5) Menyetujui skema kredit/ pembiayaan investasi padat karya.

Program Kredit Usaha Rakyat dioptimalkan sebagai salah satu instrumen ekonomi dalam mewujudkan Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Keputusan strategis yang dihasilkan dalam rapat ini, merupakan langkah konkret untuk memperkuat sektor riil dan menyejahterakan UMKM di Indonesia.

Dengan dukungan seluruh stakeholders, KUR diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dan pemulihan ekonomi nasional, sehingga mampu mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. ♦



LIBUR NATARU, KEMENKES SIAPKAN 1.574 POSKO KESEHATAN

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyiapkan 1.574 posko kesehatan di seluruh Indonesia untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

"Kami ingin memastikan masyarakat dapat bepergian dengan aman dan sehat selama liburan ini. Posko kesehatan yang tersebar di berbagai lokasi strategis akan memberikan layanan kesehatan dasar, penanganan darurat, dan fasilitas rujukan yang cepat jika diperlukan," kata Menkes Budi G. Sadikin, di Karawang, Jawa Barat, Selasa (24/12/2024).

Jajaran Kemenkes melakukan pemantauan secara langsung ke salah satu posko kesehatan di KM 57 Karawang, Jawa Barat, pada Selasa (24/12/2024), untuk mengecek persiapan dan penyediaan fasilitas kesehatan, serta sumber daya manusia yang bertugas di posko tersebut.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, dr. Azhar Jaya, mengungkapkan bahwa tenaga kesehatan, termasuk dokter dan perawat, akan berjaga dalam tiga shift sehingga pelayanan tetap berjalan selama 24 jam.

Untuk wilayah Jawa Barat, sebanyak 97 rumah sakit telah disiapkan sebagai rujukan, termasuk 9 rumah sakit di daerah Karawang yang lokasinya dekat dengan Posko Kesehatan KM 57.

"Selama liburan Nataru, kami juga memastikan puskesmas di jalur Pantura dan jalur arteri tetap buka 24 jam. Tidak ada cuti bagi tenaga kesehatan di fasilitas tersebut," kata Dirjen Azhar.

Menurut dr. Azhar Jaya, posko kesehatan telah didirikan di berbagai lokasi strategis seperti jalan tol, tempat istirahat (rest area), persimpangan jalan arteri, tempat wisata, bandara, terminal, dan pelabuhan.

"Khusus untuk Jawa Barat, tersedia 266 posko yang akan memberikan pelayanan kesehatan terpadu untuk masyarakat yang melakukan perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru," ungkap Dirjen Azhar.

Layanan posko kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan dasar seperti cek tensi dan gula darah, serta penanga-

nan gawat darurat. Posko-posko ini juga dilengkapi ambulans roda empat dan roda dua untuk menjangkau lokasi-lokasi sulit, terutama jika terjadi kemacetan panjang.

Fasilitas yang tersedia di setiap posko kesehatan meliputi tempat tidur pasien, alat pemeriksaan seperti tensimeter, stetoskop, infus set, cairan infus, obat-obatan, tabung oksigen, perlengkapan gawat darurat (emergency set), meja konsultasi, kursi, tempat penyimpanan obat, form pencatatan pasien, serta mobil ambulans.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri sebelum bepergian, termasuk memastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan baik.

"Istirahat yang cukup, patuhi rambu

yang tersebar di tiga pelabuhan utama. Di Pelabuhan Feri Merak, terdapat tiga, posko BKK Kelas I Banten di Dermaga 5, Poskes Terminal Terpadu Merak, dan Poskes ASDP di Dermaga Eksekutif.

Sementara itu, satu posko berada di Pelabuhan Pelindo Ciwandan, dan satu lagi di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Bojonegara.

"Posko hanya memberikan layanan dasar dan emergensi saja karena kita sudah berkoordinasi dengan puskesmas terdekat, yaitu Puskesmas Pulomerak yang berjarak sekitar lima menit dan RS Krakatau Medika yang berjarak 25 menit dari sini," tambah Menkes Budi.

Layanan kesehatan di Posko Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan Bojonegara mendapat dukungan dari tiga puskesmas, yaitu Puskesmas Pulomerak, Puskesmas Ciwan-

pasien-pasien dengan kasus hipertensi dan ISPA," kata Dirjen Azhar.

Sebelum posko didirikan, Balai Karantina Kesehatan (BKK) Kelas I Banten telah melaksanakan sejumlah kegiatan pra-pos, termasuk pengawasan sanitasi lingkungan pelabuhan, sanitasi kapal, rumah makan, serta pengendalian vektor dan binatang pengganggu.

Selain itu, BKK juga memeriksa obat-obatan dan P3K di kapal serta memberikan pelatihan kedaruratan kepada ABK Kapal.

Layanan kesehatan di posko meliputi pemeriksaan dan konsultasi kesehatan, pemantauan faktor risiko lingkungan, penanganan darurat ringan, dan edukasi kesehatan. BKK Banten juga menyediakan vitamin dan obat-obatan untuk



Selama liburan Nataru, kami juga memastikan puskesmas di jalur Pantura dan jalur arteri tetap buka 24 jam.

lalu lintas, dan memanfaatkan posko kesehatan jika merasa lelah atau membutuhkan bantuan," pungkas Dirjen Azhar.

Antisipasi Libur Nataru, 100 Personel Posko Kesehatan Pelabuhan Wilayah Banten Disiagakan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyediakan layanan Posko Kesehatan di sejumlah titik strategis, seperti Pelabuhan Merak, untuk menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Posko ini beroperasi mulai 15 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

"Kita sudah menugaskan Balai Karantina Kesehatan Kelas I Banten untuk mendirikan pos kesehatan di sini. Ini didirikan tanggal 15 Desember dan akan beroperasi sampai 5 Januari. Ada 2 shift, jadi 2 kali 12 jam," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin, dalam konferensi pers di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten, Selasa (24/12/2024).

Sebagai jalur utama penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatra, Provinsi Banten memiliki lima posko kesehatan



dan, dan Puskesmas Bojonegara. Selain itu, fasilitas rujukan juga tersedia di RS Krakatau Medika Cilegon, RS Hermina Cilegon, dan RS Bethsaida.

Selama libur Nataru, Posko Kesehatan Pelabuhan Banten diperkuat oleh 100 personel, yang terdiri dari 10 dokter, 13 perawat, 67 sanitarian & surveilans, serta 10 pengemudi.

Hingga 23 Desember 2024, Posko di Pelabuhan Merak, Bojonegara, dan Ciwandan telah melayani 53 pasien. Kasus terbanyak adalah hipertensi (11 orang), ISPA (5 orang), dan gastritis (3 orang). Dari jumlah tersebut, 52 pasien ditangani melalui rawat jalan, sementara satu pasien dirujuk ke RS Krakatau Medika.

"Sampai dengan hari ini, kita hanya ada 53 pasien. Sebagian besar adalah

masyarakat.

Untuk mendukung operasionalnya, BKK Kelas I Banten dilengkapi dengan tiga unit tenda pelayanan, empat unit mobil ambulans, dan empat unit motor ambulans. Petugas kesehatan juga dibekali dengan emergency kit, Automated External Defibrillator (AED), oksigen konsentrat, tensimeter digital, serta alat kesehatan (alkes) lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, didampingi Menkes Budi Menhub, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Kepala BNPB, Kapolri, dan Panglima TNI dalam konferensi pers. Menkes mengimbau pemudik untuk menjaga kesehatan selama perjalanan dan segera mengunjungi pos kesehatan jika mengalami keluhan. ♦

MENHUB DUDY DAN MENKO AHY RESMIKAN STASIUN KERETA CEPAT KARAWANG

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, meresmikan Stasiun Kereta Cepat Karawang di Karawang, Jawa Barat.

Menhub Dudy menyatakan bahwa kehadiran Stasiun Kereta Cepat Karawang akan menciptakan efisiensi waktu, dengan perjalanan Jakarta-Karawang hanya sekitar 15 menit dan Karawang - Bandung sekitar 20 menit. Dampaknya berpotensi menggerakkan serta meningkatkan ekonomi daerah Karawang dan sekitarnya.

"Karawang sebagai salah satu pusat industri terbesar, kini memiliki akses transportasi modern yang menghubungkan kawasan industri, destinasi wisata, pusat bisnis, hingga perumahan. Efeknya akan meningkatkan perekonomian daerah Karawang dan sekitarnya," kata Menhub Dudy Purwagandhi, di Karawang, Jawa Barat, Selasa (24/12/2024).

Dengan adanya Stasiun Kereta Cepat Karawang, Menhub Dudy berharap akan

semakin banyak masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Pengurangan penggunaan kendaraan pribadi pada akhirnya dapat membantu mengatasi kemacetan dan menekan emisi karbon dan mendukung visi transportasi ramah lingkungan.

"Pembangunan Stasiun Kereta Cepat Karawang adalah bukti nyata kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak dalam menghadirkan solusi transportasi yang modern, cepat, dan berkelanjutan," imbuh Menhub.

Sementara itu, Menko AHY menyatakan, dengan hadirnya Stasiun Kereta Cepat Karawang ini, dapat menambah jumlah penumpang, serta bisa membantu transportasi masyarakat dari dan ke Jakarta, termasuk ke Bandung.

"Adanya Stasiun Kereta Cepat Karawang diharapkan menambah jum-



lah penumpang kereta cepat, baik dari Jakarta maupun Bandung. Dan mudah-mudahan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat serta memperluas potensi pertumbuhan ekonomi, bukan hanya untuk Karawang, tetapi juga secara nasional,” kata Menko AHY.

Dengan beroperasinya Stasiun Kereta Cepat Karawang, Kereta Cepat Whoosh kini akan berhenti di 4 stasiun. Sejak awal operasional pada Oktober 2023, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) telah menunjukkan perkembangan yang mengembirakan.

Rata-rata penumpang harian yang pada awal pengoperasian hanya sekitar 13.700 orang kini meningkat pesat menjadi sekitar 19.000 penumpang per hari di hari kerja dan 21.000 penumpang per hari saat akhir pekan. Bahkan, volume



Karawang sebagai salah satu pusat industri terbesar, kini memiliki akses transportasi modern yang menghubungkan kawasan industri, destinasi wisata, pusat bisnis, hingga perumahan.

tertinggi pernah mencapai 23.400 penumpang per hari pada momen liburan.

Pada tahap pertama pengoperasian, Stasiun Karawang akan melayani 20 perjalanan Whoosh per hari, dari total 48 perjalanan kereta cepat Jakarta - Bandung. Lalu pada tahap kedua yang direncanakan mulai awal Februari 2025, perjalanan Whoosh akan ditambah menjadi 62 kereta per hari, dengan 31 perjalanan berhenti di stasiun Karawang.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Duta Besar Tiongkok, Wang Lutong; Wakil Menteri BUMN, Kartiko Wirjoatmodjo; Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti; Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan dan Direktur Utama KCIC, Dwiyan Slamet Riyadi.

Kemenhub Berangkatkan Mudik Gratis Angkutan Jalan Nataru 2024/2025

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam rangka libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) telah secara resmi mem-berangkatkan perjalanan mudik gratis angkutan jalan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, pada Selasa (24/12/2024).

Pelepasan mudik gratis ini dilakukan di dua titik, yakni Terminal Terpadu Pulogebang dan Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur.

Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, terdapat potensi pergerakan masyarakat pada masa libur Nataru 2024/2025 secara nasional sebanyak 110,67 juta orang, dimana pergerakan dengan moda angkutan bus sebesar 6,54 juta orang. Hal ini menunjukkan animo

jumlah tujuan mudik sebanyak 11 kota, yakni Malang, Surabaya, Kediri, Madiun, Yogyakarta, Solo, Semarang, Wonogiri, Wonosobo, Purwokerto, dan Cilacap.

Jumlah bus yang digunakan total sebanyak 93 bus. Sebanyak 63 bus untuk 2.392 penumpang diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulogebang, dan sebanyak 30 bus untuk 1.130 penumpang diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan.

“Untuk Ibu Bapak sekalian, tolong selama di perjalanan berhati-hati. Jaga barang bawaan dan anak-anak. Jaga kesehatan. Untuk para supir dan kenek, pesan saya patuhi aturan lalu lintas dan jaga kecepatan maksimal bus. Selamat jalan, selamat sampai tujuan, dan selamat liburan seru Nataru,” tambah Wamenhub.



masyarakat untuk menggunakan bus dan jalur darat ini masih besar.

“Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat serta untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas khususnya sepeda motor dan mengurangi kepadatan lalu lintas yang sering terjadi pada masa liburan ini, Kemenhub menyelenggarakan Mudik Gratis Angkutan Jalan,” kata Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Suntana, saat melepas Mudik Gratis Angkutan Jalan di Terminal Pulogebang.

Kegiatan Mudik Gratis Angkutan Jalan Nataru Tahun 2024 diselenggarakan Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Mudik gratis penumpang dan motor ini, memiliki total kuota mudik sebanyak 3.522 peserta, dengan

Pelepasan mudik gratis di Terminal Terpadu Pulogebang dilakukan oleh Wamenhub Suntana; Plt. Dirjen Perhubungan Darat, Ahmad Yani; Plt. Walikota Jakarta Timur, Iin Mutmainnah; Direktur Angkutan Jalan, Ernita Titis Dewi; Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, dan Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi BKT, Suranto.

Pada 24 Desember dilakukan pelepasan mudik gratis penumpang menggunakan bus, sementara sehari sebelumnya, pada 23 Desember dilakukan pemberangkatan motor gratis. Sementara, pelepasan mudik gratis di Terminal Kampung Rambutan dilakukan Sesditjen Perhubungan Darat, Tatan Rustandi dan Direktur Prasarana Transportasi Jalan Toni Tauladan. ♦

MENINGGAL KARENA KECELAKAAN LALU LINTAS APAKAH SYAHID?

Setiap manusia pasti akan meninggal, karena kematian merupakan takdir yang tak bisa dihindari. Kematian akan datang tanpa memandang waktu, tempat, atau keadaan. Dalam kehidupan, kita sering diingatkan bahwa kematian akan datang kapan saja dan dimana saja, bahkan di tengah aktivitas yang tampak biasa, seperti saat berkendara.

Sebagian orang menganggap, bahwa perjalanan di jalan raya mungkin terasa seperti rutinitas yang aman dan tanpa risiko. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa banyak nyawa yang melayang secara tiba-tiba akibat kecelakaan lalu lintas yang tak pernah diduga sebelumnya.

Peristiwa-peristiwa seperti ini, sering menimbulkan pertanyaan: Apakah orang yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas, termasuk dalam kategori mati syahid?

Dilansir dari NU online, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadits bahwa mati syahid tidak hanya tertuju kepada orang-orang terbunuh dalam peperangan agama.

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah bertanya: 'Apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian?' Para sahabat menjawab: 'Wahai Rasulullah, orang yang meninggal di jalan Allah itulah orang yang mati syahid'. Nabi bersabda: 'Kalau begitu, sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid'.

Para sahabat berkata: 'Lantas siapakah mereka wahai Rasulullah?' Nabi bersabda: 'Barang siapa terbunuh di jalan Allah, maka dialah syahid, dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid, siapa yang mati

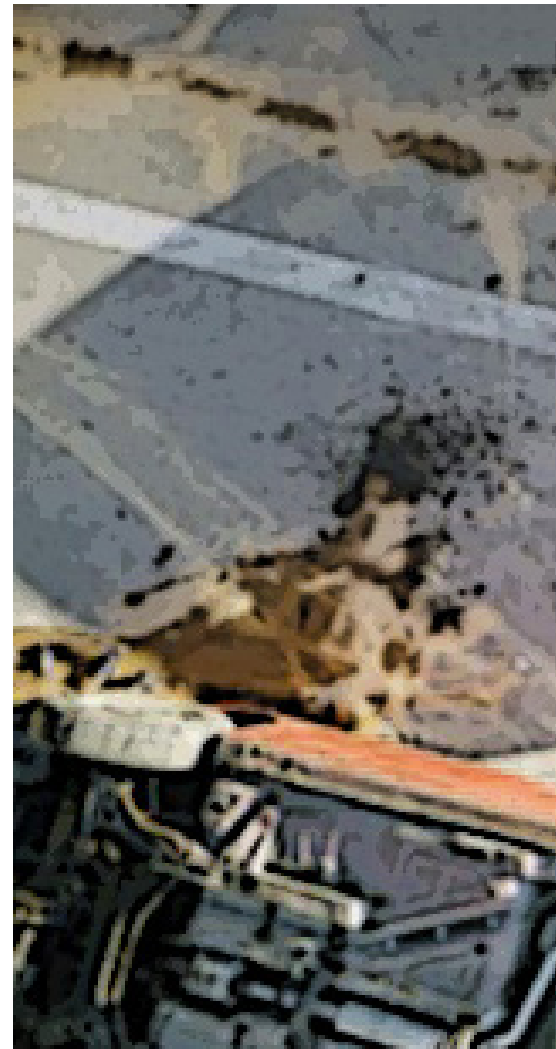
karena penyakit kolera juga syahid, siapa yang mati karena sakit perut juga syahid'. Ibnu Miqdam berkata: Saya bersaksi atas ayahmu mengenai hadits ini, bahwa Nabi juga berkata: Orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid." (HR Muslim).

Berpedoman pada hadits ini, Imam Nawawi (w. 676 H) menjelaskan bahwa syahid terbagi menjadi tiga kategori. Masing-masing dari tiga kategori tersebut memiliki kriteria dan hukum tersendiri.

Berikut detailnya: Syahid dunia dan akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam peperangan melawan orang-orang kafir, dengan niat untuk meninggikan kalimat Allah. Kategori syahid ini tidak dimandi-



**'Wahai Rasulullah, orang yang meninggal di jalan Allah itulah orang yang mati syahid'.
Nabi bersabda:
'Kalau begitu, sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid'.**



kan dan tidak dishalatkan, serta mendapatkan pahala khusus di akhirat.

Syahid di akhirat saja, tetapi tidak menurut hukum dunia. kategori ini seperti orang-orang seperti yang meninggal karena penyakit dalam (mab ūn), tenggelam, dan lain sebagainya. Mereka tetap wajib dimandikan dan dishalatkan seperti halnya orang meninggal pada umumnya. Akan tetapi mendapatkan pahala khusus di akhirat.

Syahid menurut hukum dunia saja, tetapi tidak di akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam peperangan melawan orang-orang kafir, tetapi dia berkhianat dengan mengambil harta rampasan secara tidak sah (ghulūl), terbunuh dalam keadaan melarikan diri, atau berperang dengan niat pamer (riya) dan semacamnya.

Mereka dikatakan syahid dunia, sehingga tidak wajib dimandikan dan dishalatkan, tetapi tidak mendapatkan pahala di akhirat. Kategori pertama dan ketiga khusus pada orang yang meninggal dalam peperangan melawan orang

kafir harbi.

Keduanya sama-sama tidak wajib dimandikan dan dishalatkan, tetapi memiliki kedudukan yang berbeda di akhirat. Sementara kriteria kategori syahid akhirat saja, menurut para ulama adalah setiap orang yang meninggal secara tidak wajar seperti tenggelam, terkena wabah, dan lain semacamnya. Mereka tetap wajib dimandikan dan dishalatkan sebagaimana mestinya.

"Perkataan 'dan orang kebakaran seterusnya' Syekh Zakariya al-Anshari berkata dalam kitab Syarh at-Tahriir dan al-Mahdud dan Syekh Saubari menulis tentang ini, Guru kami Syekh Ibnu Abdil Haq berkata dalam kitab Tanqihil Lubab tentang ini atau tentang batasan dan sebagian ulama mengarahkannya ketika seseorang meninggal dalam keadaan tidak wajar."

Berdasarkan kriteria ini, maka orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, maka termasuk kategori syahid akhirat, karena meninggal secara tidak wajar.

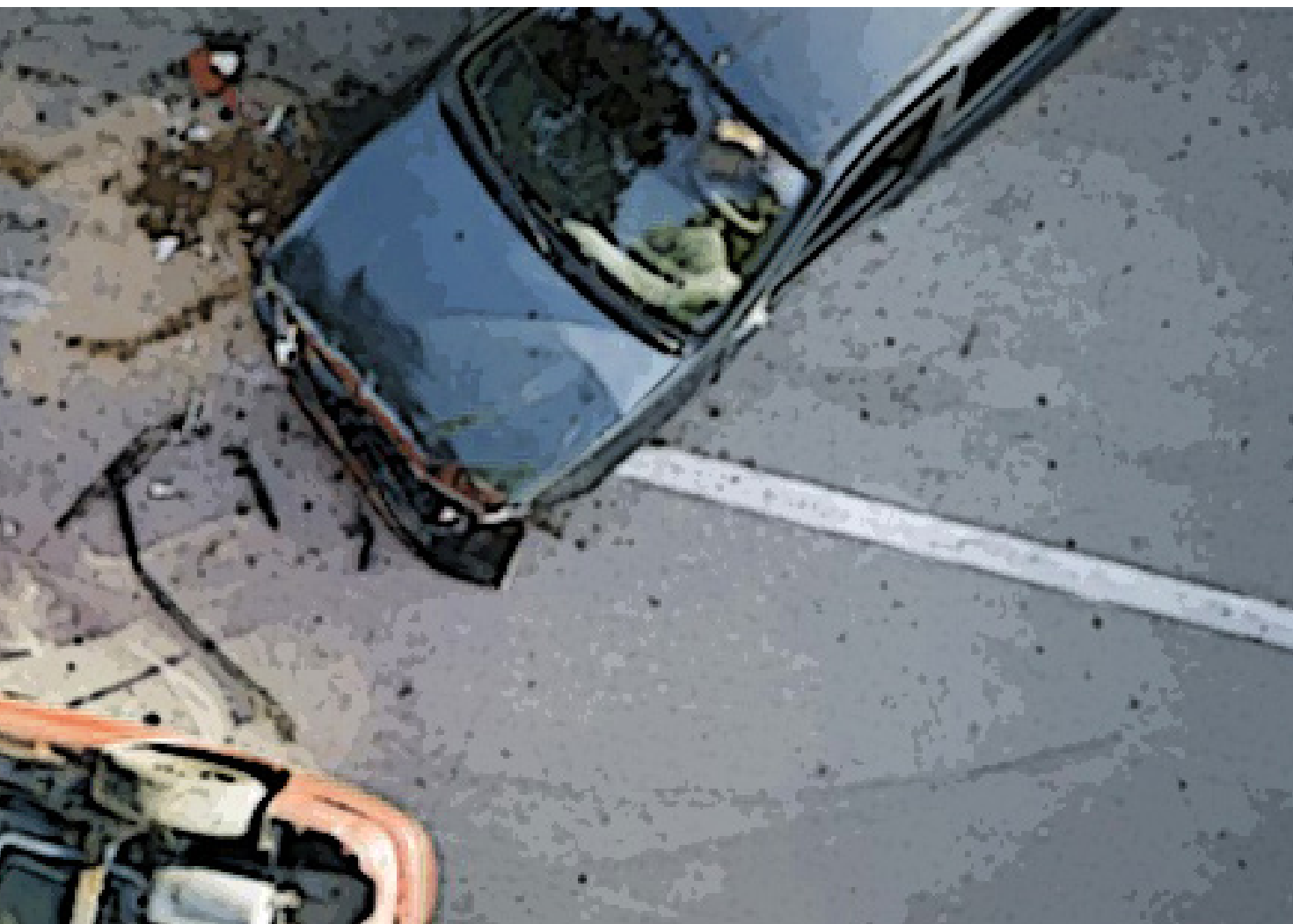
Sehingga ia tetap wajib dimandikan

dan dishalatkan selayaknya orang meninggal pada umumnya, tetapi di akhirat ia akan mendapatkan pahala mati syahid.

Merujuk pada pendapat Syekh Sulaiman al-Bujairimi (w. 1221 H), yang maksud syahid akhirat adalah mereka akan mendapatkan derajat melebihi dari orang meninggal pada biasanya, akan tetapi derajat tersebut tidak sampai pada derajat orang mati syahid karena berperang dengan orang kafir.

Lebih jauh beliau menjelaskan dalam Hasyiah al-Bujairimi Jilid II (Beirut, Darul Fikr, 1995: 280): "Makna seseorang syahid di akhirat adalah bahwa ia akan mendapatkan suatu derajat melebihi orang meninggal pada umumnya, tetapi derajat itu tidak sampai kepada derajat orang yang mati di peperangan."

Demikian penjelasan terkait kategori syahid bagi orang yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Ia akan mendapatkan derajat syahid di akhirat, namun tetap wajib dimandikan dan dishalatkan selayaknya orang meninggal pada umumnya. ♦



HUKUM ABORSI JANIN DARI HASIL HUBUNGAN DI LUAR NIKAH

Pemeriksaan merupakan tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Tindakan ini, sangat jelas akan sangat merugikan bagi pihak Perempuan. Sehingga dampak seperti trauma harus ditanggung oleh pihak perempuan.

Tak jarang pula, akibat pemerkosaan ini kemudian berbuntut panjang, karena korban yang diperkosa menjadi hamil. Lantaran psikologis yang tidak stabil, korban pemerkosaan biasanya berkeinginan mengambil tindakan aborsi (menggugurkan bayi dalam kandungan) untuk menghindari risiko yang terjadi ketika mengandung anak di luar nikah.

Secara teknis, aborsi merupakan tindakan menggugurkan anak saat masa kehamilan secara sengaja. Adapun pelaksanaan aborsi bisa secara medis atau non medis, seperti dengan mengkonsumsi obat tertentu yang dapat menggugurkan kehamilan.

Dalam pandangan hukum positif, tepatnya pada pasal 346 KUHP tertulis bagi siapa saja yang menggugurkan kandungannya secara sengaja (aborsi) akan dikenakan hukuman pidana.

Lantas, bagaimana pandangan Islam terhadap status hukum aborsi, terlebih dalam kasus pemerkosaan atau di luar nikah?

Dilansir dari NU Online, mengenai tindakan aborsi ini, para ulama terdahulu berbeda pendapat.

"Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan menggugurkan kandungan. Menurut Abu Ishaq Al-Marwazi, aborsi diperbolehkan adanya, seperti yang dikatakan Abu Hanifah. Adapun di dalam Ihya' tepatnya pada pembahasan 'azl, Al-Ghazali mengharamkan tindakan aborsi. Sebab ketika proses pembuahan terjadi dikembalikan pada persiapan ditiupkannya ruh terhadap janin, dan yang demikian tidak termasuk pada aspek 'azl." (Ibnu Hajar Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj, [Kairo, Maktabah Tijariyah Al-Kubra: 1983], juz VII, halaman 186).

Sementara itu, dari redaksi Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haitami, dapat dipetakan hukum menggugurkan kandungan sebagai berikut:

1. Tindakan aborsi hukumnya diperbolehkan dengan ketentuan tertentu.
2. Tindakan aborsi diharamkan secara mutlak, lantaran sama dengan pembunuhan.

Aborsi Janin Hasil Hubungan di Luar Nikah

Jika ditarik pada persoalan hamil di luar nikah, apakah diperbolehkan melakukan aborsi? Apakah dibenarkan kehamilan yang terjadi di luar nikah atau pernikahan yang tidak sah kemudian perempuan boleh dengan sengaja menggugurkan kandungan?

Dalam Fiqhul Islami milik Wahbah Az-Zuhaili dijelaskan, kebolehan menggugurkan kandungan saat masa kandun-



gan di bawah empat bulan atau 120 hari tanpa uzur.

Adapun yang dimaksud dari uzur tersebut berupa janin yang divonis penyakit kronis seperti kanker, tuberkulosis sehingga membahayakan janin dan ibu yang mengandung.

Selain itu, ketika seorang ibu yang mengandung tidak dapat mengeluarkan air susunya, kemudian si suami tidak mampu membayar upah pada ibu susunannya, maka yang demikian termasuk uzur yang memperbolehkan aborsi.

Apabila melanggar kriteria yang sudah disepakati oleh para ulama, kemudian tetap melakukan tindakan aborsi, maka tindakan tersebut merupakan kriminal berat.

Karena sudah menghabisi nyawa dan membunuh si janin. (Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, [Beirut Darul Fikri:1987], juz VI, halaman 2647).

Tidak ada satupun faktor yang mem-

bolehkan tindakan aborsi pada kehamilan di luar nikah. Kendatipun terjadinya pembuahan melalui proses yang diharamkan, bukan berarti hasil berupa janin tersebut menjadi sesuatu yang buruk pula.

Janin yang dikandung sebab hubungan di luar nikah atau hasil dari pemerkosaan, tetap harus dirawat sebaik mungkin. Selayaknya janin yang dihasilkan oleh ikatan pernikahan yang sah. Posisi dari anak hasil zina sama dengan umat Islam pada umumnya.

Dari sudut pandang fiqih, hubungan zina hanya berpengaruh pada warisan, penisbatan, dan perwalian ketika nikah. Selebihnya sama dengan anak-anak pada umumnya.

"Dari Waki' dari Sufyan At-Tsauri dari Yunus dari Hasan Al-Bashri berkata: "Apakah anak dari zina sama dengan anak-anak lainnya?"

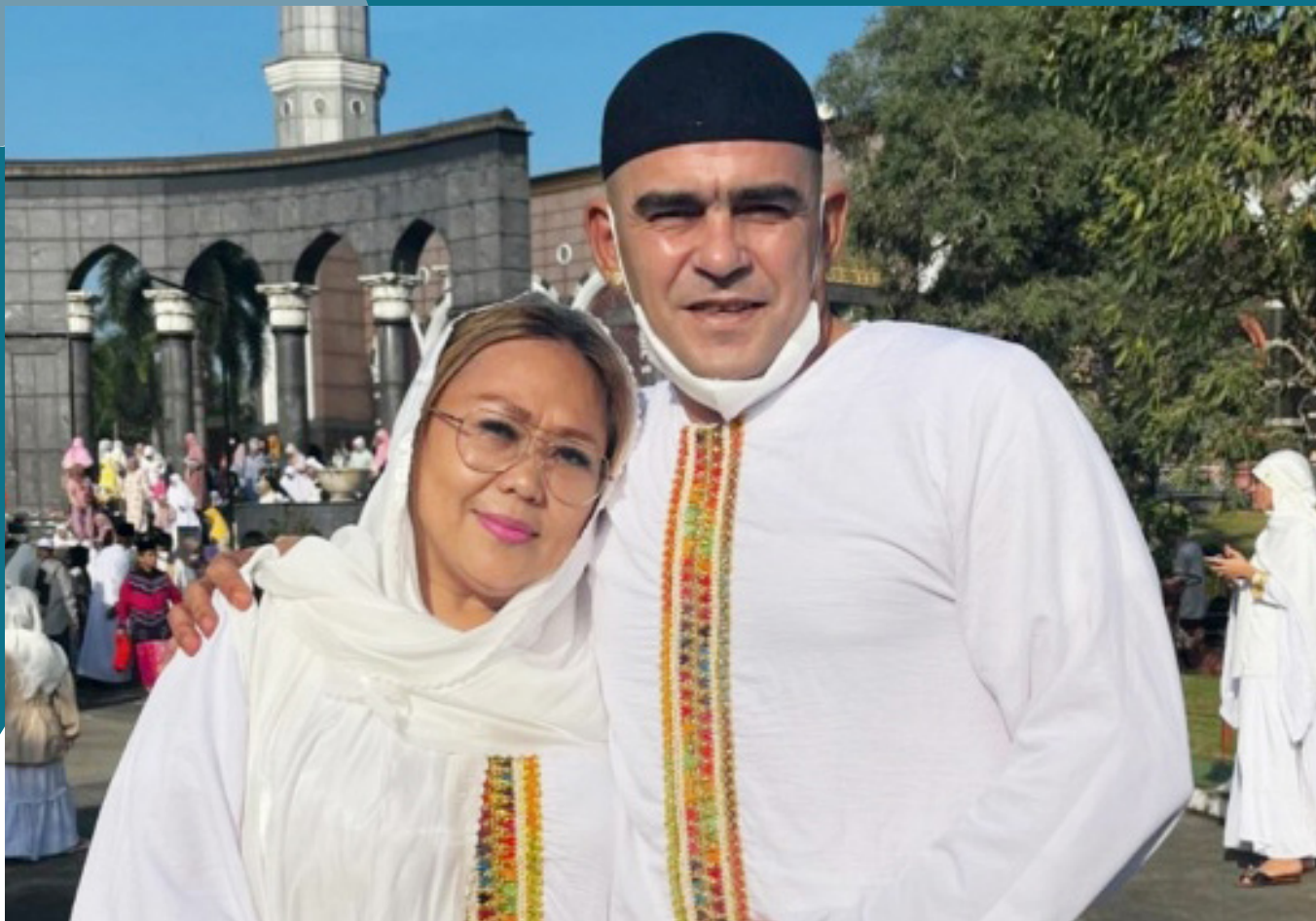
Dari Waki' dari Shubaih dari Hasan

Al-Bashri menjawab: "Anak hasil zina statusnya sama dengan umat Islam lainnya, begitu juga budak wanita, ketika dirinya dinilai adil maka boleh untuk bersaksi." (Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, [Beirut, Darul Kutub Ilmiah:2003], juz III, halaman 128).

Bisa jadi, dengan merawat kandungan dengan hasil yang diharamkan agama akan mendapatkan tekanan oleh masyarakat. Namun anak yang dikandung tersebut, memiliki hak untuk hidup selayaknya anak lainnya.

Tindakan aborsi memiliki konsekuensi dua hukum, antara boleh dan tidak dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Adapun menggugurkan kandungan yang terjadi saat di luar nikah, tetap diharamkan kendatipun prosesnya tidak disahkan oleh agama. Al-hasil, yang bersangkutan harus merawat kandungan sampai melahirkan. Wallahu a'lam. ♦





TERNYATA, CRISTIAN GONZALES MUALAF SEBELUM JADI WNI DAN BELA TIMNAS

Cristian Gonzales adalah pemain naturalisasi yang jadi salah satu legenda sepak bola Indonesia. Ia tercatat sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi, dan jadi pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang diidolakan.

Cristian Gonzales adalah pemain naturalisasi yang jadi salah satu legenda sepak bola Indonesia. Ia tercatat sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi, dan jadi pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang diidolakan.

Cristian Gonzales adalah pemain sepak bola Uruguay, yang menikahi perempuan Indonesia Eva Nuraida Siregar menikah pada 1995. Pada 2003, Eva mendapat informasi bahwa Indonesia membutuhkan pesepak bola dari Amerika Latin. Lalu Cristian Gonzales bergabung dengan PSM Makassar, dan ia bersama keluarganya

menetap di Indonesia sejak saat itu.

Pindah ke Indonesia betul-betul telah mengubah kehidupan seorang Cristian Gonzales yang di masanya dikenal dengan panggilan El Loco. Ia sering mendengar adzan, lalu dengan penuh kesadaran memutuskan masuk Islam dan menjadi seiman dengan sang istri, setelah menikah 8 tahun.

Debutnya bersama Timnas Indonesia tercatat pada 1 Desember 2010, kala itu Skuad Garuda menang 5-1 dari Malaysia di Piala AFF dan Gonzales mencetak gol pada menit ke-33.

Jarang diketahui, awal mulanya belajar

pahami Islam setelah menikah dengan Eva. Cristian Gonzales kagum saat melihat sang istri mengenakan mukena warna putih. Cristian Gonzales yang merupakan pemain bola asal Uruguay ini memutuskan mualaf karena suka mendengar suara adzan.

Diceritakan Eva, pada 2003 itu Cristian Gonzales bermain untuk di PSM Makassar. Eva bersama Cristian Gonzales dan dua anak mereka mendapat tempat tinggal di mess yang ternyata dekat dengan masjid. Jadi setiap waktu shalat tiba, Cristian mendengar adzan. Lima kali sehari.

Seringnya mendengar adzan membuat

Cristian Gonzales penasaran, karena ia awalnya mengira itu nyanyian.

"Awalnya dia pikir itu orang nyanyi, terus mulai tanya-tanya," kenang Eva.

Begitu mendengar adzan, Eva langsung bersiap shalat dimulai dengan berwudhu, yang ternyata diperhatikan dengan seksama oleh Cristian. Tapi dia belum ikut shalat, hanya menemani sang istri, dengan melihatnya shalat.

Ketika dirinya bangun dan melihat wudhu dan shalat. Hal tak terduga, kata Eva El Loco itu sering takjub melihat istrinya shalat berbalut pakaian shalat berwarna putih.

"Menurutnya Islam itu suci banget. Sebelum menghadap Allah kita harus wudhu, pakai mukena. Kalau dia ke gereja (cuma) pakai baju biasa saja. Itulah yang membuat Cristian akhirnya tertarik (mualaf)," kata Eva.

Setelah begitu yakin dengan Islam, Cristian Gonzales memutuskan untuk bersyahadat. Ia remi masuk Islam dengan mengucapkan Dua Kalimat Syahadat di Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur, dibimbing Ustadz Mustafa.

Ia pun mengubah namanya dari Cristian Gerard Alfaro Gonzales menjadi Mustafa Habibie.

Eva dan Cristian Gonzales Nikah di Chile

Cristian Gonzales dan Eva Nurida Siregar pertama kali bertemu pada tahun 1994. Keduanya bertemu di Chile, di mana kala itu Eva tengah belajar Tari Salsa di negara tersebut. Keduanya menikah pada tahun 1995 dan dikaruniai 2 orang anak.

Kendati menikah secara Islam, kala itu Eva dan Cristian Gonzales masih beda agama. Eva melaksanakan ibadah secara Islam, sedangkan Cristian masih ibadah Katolik. Kondisi itu berlangsung dari 1995 hingga 2023, saat mereka pindah ke Indonesia.

Pada tahun 2003, Eva dan Gonzales



les pindah ke Indonesia lantaran ada informasi kebutuhan pemain Amerika Latin. Gonzales kemudian menjadi pemain PSM Makassar, sementara Eva menjadi asistennya.

Eva sendiri memiliki peran besar dalam karier sepak bola sang suami di Tanah Air. Ia tak pernah absen di setiap penampilan suaminya.

Meski merupakan lulusan dari Amerika Latin, Eva memilih menjadi pendamping suaminya berkarier. Ia bahkan ikut berjuang dalam proses naturalisasi Cristian Gonzales yang baru terwujud di tahun 2010.

Eva juga kerap mendampingi suaminya kala berlaga di luar negeri sebagai asisten maupun juru bicara.

Terlebih Eva memiliki kepintaran berbahasa asing.

Eva mengakui dirinya mahair berbahasa Indonesia, Inggris, Prancis, Spanyol, dan Belanda. ♦



MULANYA KERJA DI INDONESIA, LALU TAZUKE NURIYAKI MASUK ISLAM

Tazuke Nuriyaki yang lebih dikenal dengan nama Zaki San merupakan Ketua Mualaf Center di Jepang. Perjalanan spiritualnya dalam memeluk Islam berawal saat bekerja di sebuah perusahaan peternakan di Bandung, Indonesia, yang berafiliasi dengan ITB.

Di sana, ia terkesan dengan kegigihan umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Pengalaman ini menjadi motivasi utama Zaki untuk memeluk Islam, yang kemudian membawanya untuk lebih terlibat dalam komunitas Muslim, baik di

memperkuat keinginannya untuk aktif dalam kegiatan keagamaan dan memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jepang, yang menjadi tujuan utama keterlibatannya di Mualaf Center.

Di bawah kepemimpinannya, Mualaf Center di Jepang telah menyelenggara-

keagamaan.

Zaki menyadari bahwa banyak mualaf di Jepang yang menikah dengan pasangan Muslim. Oleh karena itu, salah satu fokus Mualaf Center adalah menyediakan forum pembelajaran yang dapat membantu para mualaf memahami Islam lebih



Indonesia maupun di Jepang.

Setelah memutuskan memeluk Islam, Zaki mengalami proses adaptasi yang intensif, baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam organisasi yang diikutinya. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi tempat yang ideal baginya untuk belajar dan memahami lebih dalam tentang budaya dan praktik Islam. Pengalaman ini

rakan berbagai program studi, baik di Jepang secara umum maupun di Masjid Nusantara. Program-program ini dirancang untuk membantu para mualaf dalam memahami ajaran Islam sekaligus memberikan dukungan moral dan spiritual. Meskipun jumlah mualaf di Jepang masih relatif sedikit, Zaki dan timnya terus berupaya memperluas jangkauan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan

dalam, tidak hanya sebagai syarat pernikahan, tetapi juga sebagai iman yang sejati. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan mereka untuk memeluk Islam didasarkan pada pemahaman dan keyakinan pribadi, bukan hanya karena alasan eksternal.

Kami adalah peserta KKN Internasional Jepang 2024, yang terdiri dari Anis Nur Safarina Zaenudin, Annisa Dzakiah, Gha-



ny Fitriamara, Raffia Naila Putri, dan Yulia Rahma. Kami hadir di sini untuk mengetahui kecenderungan perkembangan umat Islam di Jepang, oleh karena itu kami mencoba menggunakan kesempatan ini untuk melakukan wawancara di Mualaf Center Jepang, ini merupakan pengalaman yang sangat berharga dalam memahami peran Islam di negeri Sakura dan menggali lebih jauh perjalanan spiritual para mualaf di sana.

Di sisi lain, interaksi sosial dengan komunitas Muslim lainnya juga menjadi bagian penting dari kegiatan Mualaf Center. Zaki telah membangun hubungan dengan beberapa masjid di Jepang, seperti Masjid Pakistan dan Bangladesh, dan terus berupaya memperluas jaringannya di luar komunitas Masjid Nusantara Indonesia. Interaksi ini diharapkan dapat menciptakan komunitas yang lebih inklusif dan mendukung para mualaf dalam perjalanan spiritual mereka.

Meskipun banyak hubungan yang telah dibangun Zaki di Indonesia, terutama dengan NU, ia tidak luput dari tantangan dan rintangan setelah memeluk Islam. Salah satu tantangan terbesarnya adalah mengatasi stigma dan keraguan dari lingkungannya, terutama karena ketaku-

tan akan terorisme yang sering dikaitkan dengan Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, Zaki berhasil membuktikan bahwa Islam adalah agama yang damai, dan ia terus tekun membangun hubungan yang harmonis dengan keluarga dan masyarakatnya.

Dalam menjalankan ibadahnya, Zaki San berusaha untuk selalu menjaga ke-disiplinan dalam beribadah, termasuk sholat tepat waktu, pengajian, Shalat Jumat,

dan berbagai kegiatan Mualaf Center lainnya. Ia juga memiliki harapan besar terhadap masa depan Mualaf Center, dengan fokus membina para mualaf agar benar-benar memahami Islam. Selain itu, Zaki terus menghadapi tantangan sehari-hari, seperti kesulitan mencari makanan halal, namun ia tetap teguh dalam keimanannya dan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat Muslim. ♦



KESEHATAN YANG BAIK DITANDAI DENGAN FLEKSIBILITAS MENTAL, BEGINI MENINGKATKANNYA!

Setiap insan mendambakan kesehatan mental yang baik agar dapat menjalani hidup dengan nyaman dan bahagia. Karena dengan kesehatan mental yang baik, seseorang akan memiliki kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi.

Kemampuan beradaptasi dengan semua kondisi dan situasi ini disebut dengan Fleksibilitas Mental, yang membantu memiliki kualitas hidup dan manajemen stres yang lebih baik.

Apa itu Fleksibilitas Mental?

Psikolog Iswan Saputro memberi penjelasan tentang Fleksibilitas Mental dilansir Klikdokter, dan bagaimana cara meningkatkannya untuk kesehatan mental yang lebih baik:

Fleksibilitas Mental yang sering disebut sebagai "cognitive flexibility" adalah kemampuan untuk berpikir tentang berbagai hal secara berbeda dan berpindah dari satu konsep ke konsep lainnya.

Fleksibilitas mental melibatkan kemampuan untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang, menghasilkan solusi kreatif untuk masalah, dan menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang tidak terduga.

Fleksibilitas ini membantu Kamu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, mengatasi rintangan dengan cara yang lebih efektif, dan menjalani hidup dengan lebih sedikit stres dan lebih sejahtera.

Mengapa Fleksibilitas Mental Penting?

Fleksibilitas mental dapat memberikan manfaat untuk kehidupan pribadi dan karir.

MANFAAT FLEKSIBILITAS MENTAL DALAM HIDUP:

1. Mengurangi stres

Membantu Kamu memiliki beragam cara memahami situasi, tidak merasa terjebak (stuck) dengan keadaan, dan percaya diri dalam menghadapi masalah.

2. Pemecahan masalah

Memiliki beragam sudut pandang dalam menyelesaikan masalah sehingga Kamu mampu mencari solusi yang efektif

dan efisien.

3. Kreativitas

Fleksibilitas dalam berpikir dapat mengasah kreativitas dalam menjalani hidup, bekerja, dan beradaptasi dengan keadaan baru.

4. Hubungan interpersonal

Mampu menyesuaikan cara berkomunikasi dan berempati kepada berbagai latar belakang budaya dan orang yang ditemui.

5. Optimisme

Fleksibilitas mental dapat membantu Kamu melihat sisi lain dari keadaan yang dinilai tidak menguntungkan dan percaya diri bisa melewatinya.

6. Manajemen ekspektasi

Bersikap fleksibel membantu Kamu tidak mudah kecewa dengan keadaan



karena mampu melihat sesuatu berbagai sudut pandang.

CARA MELATIH FLEKSIBILITAS MENTAL

Berikut adalah beberapa strategi yang dapat Kamu gunakan untuk melatih dan meningkatkan fleksibilitas mental:

1. Buka pikiran kamu terhadap pengalaman baru

Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan fleksibilitas mental adalah dengan membuka diri terhadap pengalaman baru. Cobalah kegiatan baru, belajar keterampilan baru, atau kunjungi tempat baru.

Dengan menghadapi hal-hal yang tidak biasa bagi Kamu, otak akan dipaksa untuk beradaptasi dan berpikir secara berbeda.

2. Praktikkan pemikiran positif

Mengembangkan pola pikir positif dapat membantu meningkatkan fleksibilitas mental. Cobalah untuk melihat sisi positif dari setiap situasi dan fokus pada solusi daripada masalah. Ini akan membantu Kamu untuk lebih mudah beradaptasi dengan perubahan.

3. Lakukan latihan meditasi dan mindfulness

Meditasi dan mindfulness adalah teknik yang efektif untuk meningkatkan fleksibilitas mental. Kedua praktik ini membantu Kamu untuk lebih sadar akan pikiran dan perasaan, dan memberikanmu cara untuk mengelolanya dengan langkah yang lebih adaptif.

4. Latih otakmu dengan permainan dan teka-teki

Permainan otak dan teka-teki adalah cara yang menyenangkan untuk melatih fleksibilitas mental. Cobalah permainan seperti teka-teki silang, Sudoku, atau permainan strategi yang menantang otak untuk berpikir secara kreatif dan adaptif.

5. Terlibat dalam diskusi yang beragam

Berpartisipasi dalam diskusi dengan orang-orang yang memiliki pandangan dan perspektif yang berbeda dapat membantu Kamu mengembangkan fleksibilitas mental. Ini memberi Kamu kesempatan untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda.

6. Perspektif berbeda

Cobalah untuk secara aktif mengambil perspektif orang lain dalam berbagai situasi. Misalnya, jika Kamu sedang mengalami konflik dengan seseorang, cobalah untuk

memahami sudut pandang mereka dan alasan dibalik tindakan mereka.

7. Kelola stres dengan efektif

Stres dapat menghambat fleksibilitas mental, jadi penting untuk menemukan cara untuk mengelola stres dengan efektif.

Teknik seperti relaksasi, olahraga, dan berbicara dengan teman atau terapis dapat membantu Kamu untuk tetap tenang dan berpikir secara lebih adaptif.

CONTOH FLEKSIBILITAS DALAM KEHIDUPAN

Untuk lebih memahami bagaimana fleksibilitas mental bekerja dalam kehidupan nyata, berikut adalah beberapa contoh dan studi kasus:

Kamu untuk melihat perubahan ini sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai ancaman. Belajar kemampuan baru dan keluar dari zona nyaman dapat membantu untuk mengetahui seberapa fleksibel Kamu dengan perbedaan.

2. Konflik interpersonal

Dalam hubungan pribadi atau profesional, konflik adalah hal yang umum. Dengan fleksibilitas mental, Kamu dapat melihat konflik dari perspektif orang lain, memahami alasan di balik perasaan mereka, dan mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak.

3. Perubahan lingkungan

Misalkan Kamu pindah ke kota baru



1. Perubahan karier

Bayangkan Kamu bekerja di industri yang sama selama bertahun-tahun dan tiba-tiba harus beralih ke bidang yang sama sekali baru.

Fleksibilitas mental akan membantu

atau negara baru. Fleksibilitas mental akan membantu Kamu untuk beradaptasi dengan budaya baru, membangun hubungan sosial baru, dan menemukan cara untuk merasa nyaman di lingkungan yang baru. ♦

FUNGSIONAL, REVITALISASI DAN REAKTUALISASI NILAI-NILAI KEISLAMAMAN

Buku Islam Fungsional, Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-nilai Keislaman merupakan salah satu karya Prof Dr KH Nasaruddin Umar MA, yang kini menjabat Menteri Agama RI Kaibinet Merah Putih (KMP).

Karena itu, membaca Islam Fungsional, Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-nilai Keislaman membuat pembaca serasa mendengar langsung ucapan Menag Nasaruddin Umar.

Bahwa penulis produktif ini menegaskan, Islam adalah agama yang Rahmatan lil 'Alamin, agama yang bisa diterapkan di semua zaman, agama yang membangun peradaban.

Penulis yang juga mantan Wakil Menteri Agama ini dikenal sebagai sosok yang toleran dan konsen pada keruku-

JUDUL BUKU:
ISLAM FUNGSIONAL
PENULIS:
PROF. DR. KH NASARUDDIN UMAR
PENERBIT:
PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO
TERBIT:
2024
TEBAL :
373 HALAMAN
ISBN :
978-602-02-5409-8

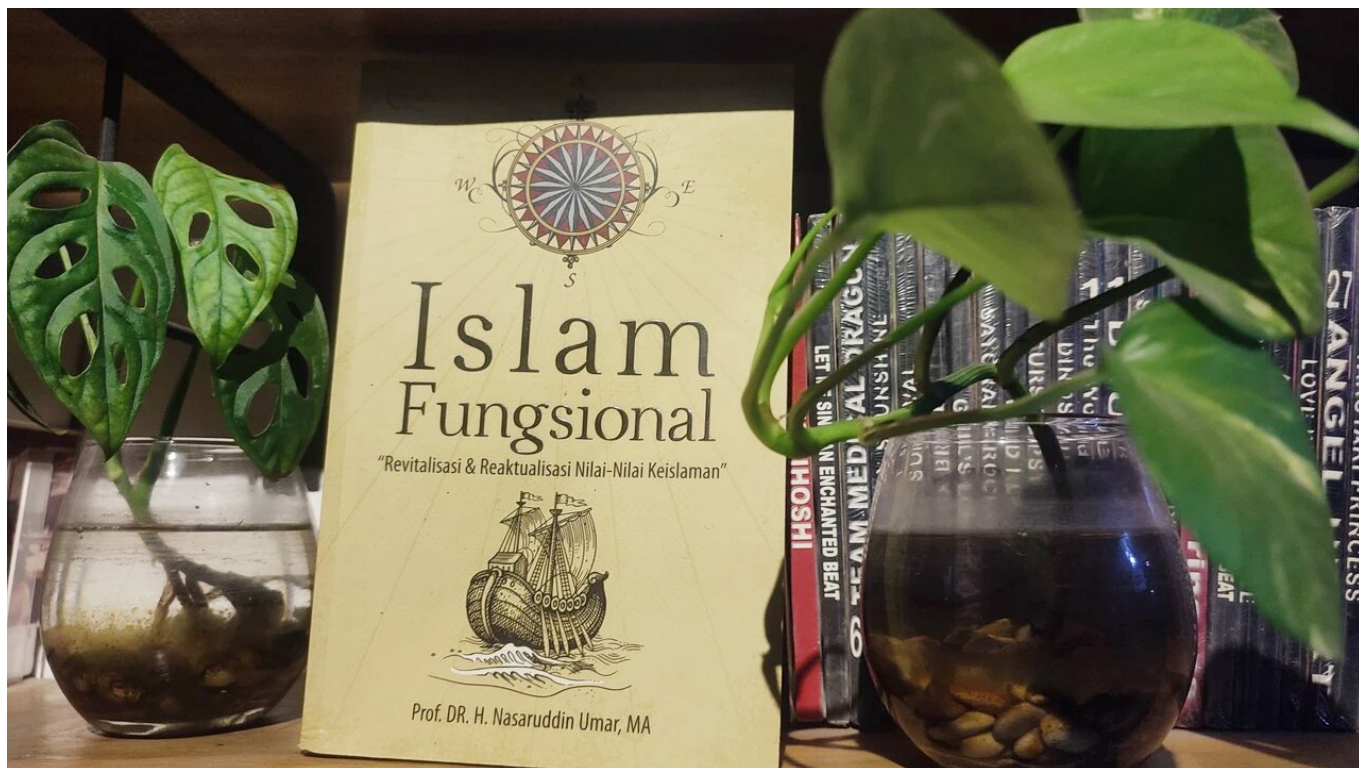
masyarakat pluralistik seperti di Indonesia mutlak diperlukan.

Buku ini penting dibaca oleh Umat Islam maupun umat-umat agama-agama lain, karena bicara tentang toleransi dalam Islam. Melalui buku ini pula Na-

saan gender dan berbagai isu seputar kaum perempuan. Termasuk soal adanya pihak-pihak yang melarang perempuan berkari di berbagai bidang.

Ditegaskan Prof Nasaruddin, Islam datang membawa misi untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Islam dipromosikan sejak awal sebagai agama pembebasan, terutama pembebasan terhadap kaum perempuan.

Sebagai cendekiawan Muslim ia juga memaparkan pemikirannya terkait masalah-masalah keumatan. Yang menarik, Nasaruddin Umar mengulas tentang Al-Qur'an dan penanggulangan epidemi. Dunia baru-baru ini baru selesai menghadapi Pandemi Covid-19 tak terkecuali Indonesia. Dalam buku ini pembaca diajak mengingat kembali pan-



nan antar umat beragama, dimana baru-baru ini ia juga punya peran penting dalam menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia.

Dalam buku ini ia menyatakan kerukunan antar umat beragama dalam

saruddin Umar ingin memangkaskan tembok-tembok tinggi yang memisahkan Islam dan Kristen. Caranya dengan melakukan verifikasi ayat-ayat Al-Qur'an dan pasal-pasal Al-Kitab yang sejenis.

Buku ini juga bicara tentang keseta-

dami yang sudah pernah melanda umat manusia. Ada tiga pandemi yang disebutkan Prof Nasaruddin Umar, peristiwa musnahnya Bani Tsamud, kasus tentara Israel dan Jalut, serta kasus pasukan gajah. ♦

ANDA INGIN BERLANGGANAN

3 EDISI (3 BULAN) RP 200.000

6 EDISI (6 BULAN) RP 400.000

12 EDISI (12 BULAN) RP 800.000



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

PT. INTER MEDIA DIGITAL

**Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750**

TELP 021-791 96781

FAX 021-791 96786

EMAIL :

moeslimchoice@gmail.com

FACEBOOK :

moeslimchoice

TWITTER :

@moeslimchoice

YOU TUBE CHANNEL:

moeslimchoice tv

KISAH NABI MUHAMMAD SAW DITEGUR ALLAH KARENA ABAIKAN SAHABAT TUNANETRA

Nabi Muhammad SAW merupakan panutan bagi umat manusia. Setiap tingkah lakunya setiap harinya mencerminkan tauladan akhlak mulia, pioner bagi siapa saja yang hendak mendapatkan kemuliaan.

Namun, siapa sangka Nabi Muhammad SAW juga pernah mendapat teguran beberapa kali dari Allah SWT. Teguran itu datang saat Nabi sedang menerima tamu para pembesar Quraisy yang diharapkan masuk Islam. Sebelum kemudian datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, meminta dibacakan al-Quran.

Nabi Muhammad SAW berpaling darinya dalam keadaan bermuka masam. Kisah ini direkam dalam Al-Quran surat Abasa ayat 1-10. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Katsir dalam kitabnya, saat itu Nabi Muhammad SAW sedang menerima tamu pembesar-pembesar Quraisy, yang di antaranya ialah Walid bin Al-Mughirah.

Nabi Muhammad SAW berharap akan keislaman mereka. Kemudian datanglah sahabat Nabi, Ibnu Ummi Maktum, sahabat nabi yang buta meminta dibacakan ayat al-Quran. Hal itu membuat Nabi sedikit kesal. Sebelum kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan teguran dari Allah SAW lewat ayat yang turun.

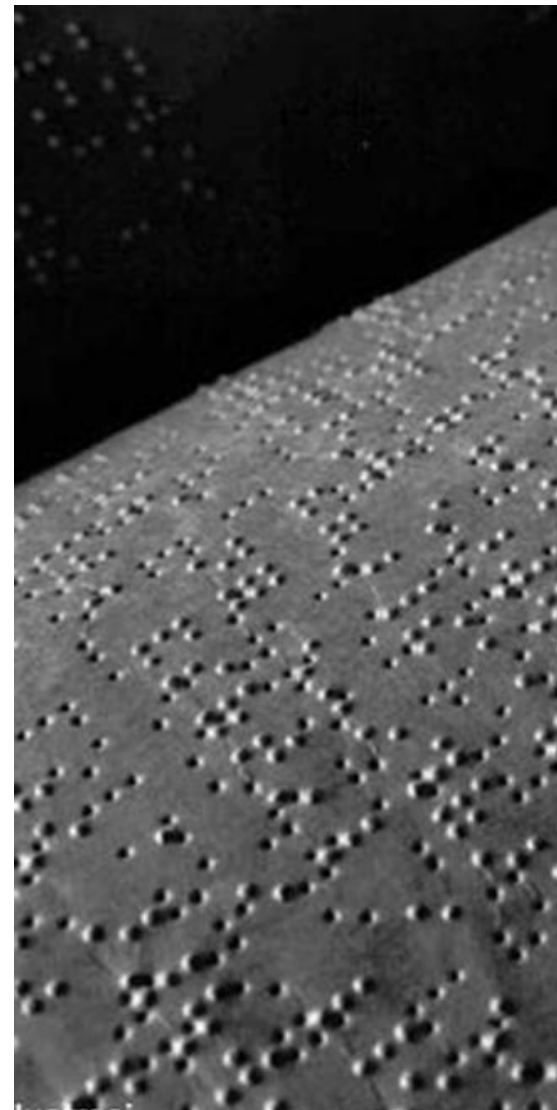
"Ibnu Ishaq berkata: Pada saat Rasulullah saw berdialog dengan Walid bin Al-Mughirah (salah satu pembesar Quraisy saat itu) yang menemuinya, sedang Nabi sangat mengharapkan keislamannya. Kemudian datanglah Ibnu Ummi Maktum yang buta meminta dibacakan al-Quran. Hal tersebut membuat Nabi sedikit kesal sebab dikhawatirkan akan mengganggu dialognya dengan Walid yang ia harapkan keislamannya. Setelah Nabi membacakan ayat, ia berpaling dengan muka yang masam dan meninggalkan Ibnu Ummi Maktum. Setelahnya Allah menurunkan ayat 'Abasa wa tawalla an jaahul a'ma' (Dia berwajah masam dan berpaling karena seorang tunanetra datang kepadanya). (Ibnu Katsir).

Dilansir dari NU Online, menurut riwayat At-Thabari dalam tafsirnya, mengutip riwayat Muhammad bin Saad yang bersumber dari Ibnu Abbas menyebutkan, bahwa pembesar Quraisy yang sedang berdialog saat itu ialah Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisyam dan Abbas bin Ab-

dul Muthalib.

"Muhammad bin Saad menceritakan kepadaku, ia berkata menceritakan kepadaku ayahku, dari pamanku yang bermuara pada Ibnu Abbas bahwa firman Allah ('Abasa wa tawalla an jaahul a'ma'), Ibnu Abbas berkata: "saat itu Rasulullah SAW sedang berdialog dengan Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisyam dan Abbas bin Abdul Muthalib". (Imam At-Thabari)

Dalam riwayat lain, Fakhruddin ar-Razi dalam tafsirnya mengisahkan bahwa Ibnu Ummi Maktum saat itu meminta dibacakan dengan mengucapkan berkali-



kali kepada Nabi, sehingga kemudian Nabi Muhammad berpaling, karena tidak mau memutuskan dialog dengan pembesar Quraisy yang diharapkan keislamannya itu, sehingga kemudian Nabi ditegur oleh Allah.

Ibnu Ummi Maktum mendatangi Rasulullah SAW ketika Nabi sedang berdialog mengajak Islam para pembesar Quraisy. Ummu Maktum ialah ibu dari ayahnya, sedang namanya ialah Abdulah bin Syuraih bin Malik bin Rabiah al-Fihri dari Bani Amir.

Pembesar Quraisy tersebut ialah Utbah dan Syaibah bin Rabiah, Abu Jahal bin Hisyam, Abbas bin Abdul Muthalin, Umayyah bin Khalaf dan Al-Walid bin Luay- Al-Mughirah.

Nabi mengharapkan keislaman mereka agar umat yang lain mengikuti. Ibnu Ummi Maktum kemudian berkata kepada Nabi SAW:

"Bacakan kepadaku dan ajarkan apa yang Allah ajarkan kepadamu", ia mengulang-ulangnya berkali-kali. Sedangkan

Nabi Saw enggan untuk memutus percakapannya dengan pembesar Quraisy. Nabi kemudian berpaling dari Ibnu Ummi Maktum dan turunlah ayat 'Abasa'. (Fakhruddin Ar-Razi)

Masih dari riwayat yang sama, Ar-Razi mengisahkan peristiwa teguran tersebut kemudian menjadikan Nabi Muhammad selalu berkata, "Selamat datang wahai orang yang karenanya aku ditegur Tuhanku", ketika bertemu Ibnu Ummi Maktum.

"Setelahnya ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Ibnu Ummi Maktum, ia akan berkata: "Selamat datang wahai orang yang karenanya aku ditegur Tuhanku", kemudian baru berkata "apakah ada kebutuhan bagimu?". Nabi SAW pun pernah mempercayakan Madinah dua kali kepadanya". (Ar-Razi, hal 52).

Dari kisah tersebut, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil, di antaranya: Dari sisi Nabi Muhammad SAW, kita dapat memahami bahwa pada hakikatnya keinginan Nabi Muhammad SAW

pada saat bertemu para pembesar Quraisy hanyalah mengajak mereka agar beriman kepada Allah SWT.

Namun, kedatangan Ibnu Ummi Maktum menjadikan Nabi khawatir dapat mengganggu dakwahnya. Oleh karenanya, Nabi Muhammad Saw sedikit gusar dengan kedatangannya. Kedatangan Ibnu Ummi Maktum kepada Nabi Muhammad untuk dibacakan ayat Al-Quran adalah sebuah kewajaran sebab dia tidak tahu Nabi Muhammad saw sedang bertemu dan berdakwah kepada para pembesar Quraisy.

Jadi Ibnu Ummi Maktum tidak pada posisi yang salah atas teguran Allah kepada Nabi Muhammad atas kegusarannya dengan kedatangan Ibnu Ummi Maktum pada saat berdakwah memberikan pelajaran bahwa penampilan dan fisik seseorang tidak dapat menjadi tolok ukur keimanan. Seorang sahabat yang tunanetra seperti Ibnu Ummi Maktum pada kisah di atas menjadi contoh yang sangat baik. ♦



YANG EFEKTIF, BELAJAR MANAJEMEN BENCANA DARI AL QURAN

Bencana sering kali dipandang sebagai peristiwa yang membawa penderitaan. Namun dalam Islam, Al-Quran mengajarkan cara pandang yang berbeda. Dalam surat Al Baqarah Ayat 155, bencana dipahami sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT sekaligus ujian bagi manusia.

Peristiwa ini menjadi media introspeksi diri untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Oleh karena itu, bencana tidak seharusnya disikapi dengan rasa putus asa atau sikap fatalis, tetapi sebagai dorongan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dengan semangat memperbaiki diri.

Dalam perspektif Islam, khususnya berdasarkan pendekatan Tarjih, manajemen bencana mencakup tiga tahap utama: pencegahan, tanggap darurat, dan pemulihan. Ketiga tahap ini kombinasi antara landasan logika manusiawi dan dasar spiritual yang kuat dalam Al Quran.

Tahap pertama adalah pencegahan. Tahap ini berfokus pada upaya mengu-



rangi risiko terjadinya bencana. Inspirasi langkah ini dapat ditemukan dalam kisah Nabi Yusuf yang tertuang dalam surat Yusuf ayat 47-49. Allah memerintahkan kaum Nabi Yusuf untuk bercocok tanam selama tujuh tahun dan menyimpan hasil panennya untuk menghadapi tujuh tahun paceklik yang akan datang.

Kisah ini menggambarkan pentingnya perencanaan, kewaspadaan, dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan yang dapat memicu bencana, baik secara alamiah maupun akibat ulah manusia.

Tahap kedua adalah tanggap darurat. Pada tahap ini melibatkan serangkaian tindakan cepat dan terorganisir saat

bencana terjadi. Langkah ini mencakup evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, hingga pengurusan pengungsi. Inspirasi untuk tahap ini dapat ditemukan dalam surat Al-Mā'idah ayat 32.

Dalam ayat di atas Allah mengajarkan bahwa menyelamatkan satu nyawa setara dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Prinsip ini menjadi landasan untuk tindakan penyelamatan yang cepat dan efisien, memastikan keselamatan dan kesejahteraan korban sebagai prioritas utama.

Tahap ketiga adalah pemulihan. Tahap terakhir ini melibatkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Langkah ini mencakup perbaikan infrastruktur, pemulihan pelayanan publik, dan upaya membantu masyarakat bangkit

kembali. Dasar spiritual untuk tahap ini tercermin dalam surat Ar-Ra'd ayat 11.

Dalam ayat di atas menyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka berusaha mengubah nasibnya sendiri. Pesan ini menekankan pentingnya peran aktif manusia dalam membangun kembali kehidupan yang lebih baik setelah bencana, dengan tekad dan semangat yang tinggi.

Manajemen bencana berdasarkan Al-Quran begitu lengkap. Selain soal tindakan teknis, ia juga mencakup soal memahami makna spiritual di balik setiap ujian. Karenanya tidak berlebihan bila dikatakan bahwa manajemen bencana dalam Islam memberikan inspirasi untuk hidup lebih baik dan bertanggung jawab. ♦ilham/muhammadiyah.or.id



PENEGAKAN HUKUM JADI PERHATIAN 2025

Bertolak dari catatan sepanjang 2024, masalah penegakan hukum yang menjadi ranah Komisi III DPR tampak akan menjadi perhatian pada 2025 dan selanjutnya. Laporan akhir tahun Komisi III DPR mengarah ke sana.

Menjelang penutupan 2024 Komisi III DPR menyampaikan catatan akhir tahun kinerjanya di hadapan media massa. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengemukakan, sepanjang 2024 Komisi III telah menerima sebanyak 469 laporan pengaduan masyarakat yang telah diteruskan kepada mitra kerja terkait.

"Pengaduan masyarakat kita gas terus, sepanjang tahun 2024 Komisi III DPR

RI menerima 469 laporan pengaduan masyarakat," kata Habiburokhman di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Jumat, 27 Desember 2024. Dia mengatakan seluruh pengaduan masyarakat tersebut telah Komisi III DPR RI teruskan kepada mitra kerja dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh mitra kerja terkait.

Selain itu, dia menyebut Komisi III DPR RI periode ini telah menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat, khususnya



dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun Rapat Dengar Pendapat (RPDU) dengan berbagai pihak terkait. "Banyaknya laporan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat percaya dengan Komisi III DPR RI untuk segera menindaklanjuti pengaduan tersebut," sambungnya.

Turut hadir Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yulianti, dan para anggota Komisi III DPR RI lainnya yaitu Rikwanto, Rudianto Lallo, Nazaruddin Dek Gam, Hasbially Il-yas, dan Nabil Husein Said Amin.

Habiburokhman lantas merinci bahwa Mahkamah Agung (MA) menjadi mitra kerja Komisi III DPR RI yang terbanyak mendapatkan aduan dari masyarakat, yakni sebanyak 149 aduan atau 31,7 persen dari total aduan yang masuk ke Komisi III DPR

RI. "Jadi kita bikin pemeringkatan dalam konteks kuantitas pertama dunia peradilan tapi masyarakat enggak mengadukan Mahkamah Agung secara khusus tapi pengadilan ini pengadilan itu sehingga kami kategorikan sebagai pengaduan ke Mahkamah Agung," katanya.

Dia menyebut kebanyakan aduan terhadap MA menyangkut tentang penanganan perkara, mafia peradilan, mafia per-tanahan, dan profesionalisme pelayanan publik. Kemudian urutan mitra kerja Komisi III DPR RI dengan aduan terbanyak secara berturut-turut ditempati oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sebanyak 113 aduan, Kejaksaan RI sebanyak 85 aduan, dan Polri sebanyak 60 aduan.

Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 23 aduan,

Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 18 aduan, Komisi Yudisial (KY) sebanyak 13 aduan, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebanyak delapan aduan.

Polri, ujarnya, menjadi mitra kerja yang paling responsif menindaklanjuti pengaduan masyarakat dari Komisi III DPR RI dengan persentase sebesar 94 persen.

"Karena setiap kita tindaklanjuti aduan tersebut langsung direspons, Kapolresnya langsung telepon, langsung memberikan data-data terkait, langsung saat itu kita komunikasikan dan kita kawal terus bagaimana penanganannya," tuturnya.

Kemudian urutan mitra kerja Komisi III DPR RI yang paling responsif menindaklanjuti aduan secara berturut-turut adalah Kejaksaan RI (89 persen), Komisi Yudisial (85 persen), PPATK (85 persen), Mahkamah Konstitusi (78 persen), KPK (65 persen), BNN (54 persen), dan MA (38 persen).

Terhadap Polri, Komisi III memberi apresiasi dalam akuntabilitas, pemerintahan, responsivitas dalam penegakan hukum di berbagai bidang, termasuk memberikan sanksi kepada oknum Polri yang melakukan pelanggaran.

Komisi III DPR RI, kata dia, juga men-



Pengaduan masyarakat kita gas terus, sepanjang tahun 2024 Komisi III DPR RI menerima 469 laporan pengaduan masyarakat.

gapresiasi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang telah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dalam berbagai kegiatan besar, seperti pemilu, pilkada, hingga hari raya keagamaan.

Dia menyebut Polri melakukan hal tersebut dengan inovasi program dan operasi pengamanan yang efektif. "Komisi III memberikan apresiasi kepada Kapolri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan inovasi program dan operasi pengamanan yang efektif di berbagai kegiatan masyarakat, seperti Pilpres dan Pilkada, dan hari raya keagamaan," tuturnya.





Selain itu, Komisi III DPR RI mengapresiasi pula akuntabilitas pemerintahan dan responsivitas dalam penegakan hukum di berbagai bidang. "Seperti sumber daya alam, narkoba, mafia tanah dan judi online," ucapnya

Kepada Kejaksaan RI, Komisi III mencatat perlunya peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi dalam sektor penegakan hukum Kejaksaan. Termasuk, fungsi penanganan perkara untuk memastikan penegakan hukum yang dilakukan mampu secara seimbang membantu dalam pengembalian kerugian negara.

Sementara itu, terhadap KPK, Komisi

III mendorong sinergisitas bersama antara Pimpinan KPK dan Dewas KPK dan mendorong penanganan perkara yang berfokus pada penyelamatan keuangan negara dan pengembalian kerugian negara. "Secara lebih efektif, efisien, dan kolaboratif bersama Polri dan Kejaksaan," lanjutnya.

Lebih lanjut, terhadap pemetaan dan pengungkapan jaringan penyelundupan narkoba oleh BNN, Komisi III mendorong BNN terus berupaya meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka penguatan dan peningkatan kapasitas, maupun dalam mel-

akukan penindakan.

Kepada PPATK, Komisi III DPR RI mencatat pentingnya PPATK untuk meningkatkan kapasitas dengan terus mengikuti perkembangan teknologi dan sinergi bersama seluruh pihak terkait.

Untuk Mahkamah Agung, Komisi III memberi masukan agar MA dapat lebih mengoptimalkan sistem penanganan perkara berbasis data dan elektronik. Komisi III DPR RI melihat permasalahan eksekusi masih ada dan mendorong MA untuk dapat melakukan terobosan termasuk kerjasama dalam pengawasan maupun pelaksanaannya

Selanjutnya Kepada Mahkamah Konstitusi, Komisi III DPR RI mendorong MK untuk dapat terus meningkatkan kualitas dan kecepatan penanganan perkara, terutama Pilkada, agar tetap meraih tingginya angka kepercayaan masyarakat.

Kemudian Kepada Komisi Yudisial, Komisi III DPR RI mengapresiasi KY dalam upaya penanganan kasus pelanggaran kode etik hakim serta upaya untuk menjaga independensi dan integritas sistem peradilan di Indonesia.

Dengan catatan akhir 2024, idealnya, kinerja lembaga penegak hukum dan segenap mitra kerja Komisi III DPR akan lebih meningkat positif. Kita akan lihat bersama-sama pada akhir 2025. ♦



4 CLUSTER PENGADUAN KE KOMISI II DPR

Komisi II DPR membagi pengaduan warga menjadi empat cluster (bidang). pertama, pengaduan masyarakat bidang pemilihan yang terdiri dari Pileg, Pilpres dan Pilkada. Kemudian yang kedua, pengaduan masyarakat bidang pertanahan dan tata ruang yakni terkait mafia tanah, penyerobotan tanah, pelayanan publik di sektor pertanahan, dan tata ruang.

Yang ketiga, pengaduan masyarakat tentang kepegawaian terkait honorer netralitas ASN dan lainnya. Terakhir atau keempat, adalah pengaduan masyarakat menyangkut otonomi daerah dan pemerintahan daerah.

"Dari 495 aduan sepanjang 2024, rincian-nya adalah bidang pemilihan 201 aduan masyarakat, bidang pertanahan dan tata ruang 120 aduan masyarakat, bidang ASN dan honorer 114 aduan masyarakat, dan bidang otoda 60 aduan masyarakat," ujar Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda di gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin, 30 Desember 2024.

Menurutnya, dari ratusan aduan tersebut mitra kerja yang paling aktif merespon dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian Dalam Negeri.

"Komisi II DPR selalu berupaya dan selalu membuktikan kinerja serta komitmen yang kuat untuk memegang amanat dan menjalankan perintah undang-undang, serta mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat umum sesuai dengan bidang tugasnya yang akan berdampak signifikan pada kehidupan berbangsa dan bernegara," jelasnya.

"Isunya beragam, mulai dari netralitas ASN, netralitas pejabat kepala daerah, terkait dengan politik uang, terkait dengan isu hoaks, SARA, dan seterusnya, termasuk misalnya bagaimana mobilisasi bantuan sosial yang dilakukan di beberapa tempat," ucap Rifqinizamy.

Kemudian, sebanyak 120 aduan masyarakat berkaitan bidang pertanahan dan tata ruang. Ia mengatakan, aduan terbanyak terkait dengan mafia tanah, penyerobotan tanah tanpa hak, hingga penggunaan tanah yang tidak memiliki atas hak.

Komisi II DPR RI juga menerima sebanyak 114 aduan terkait dengan guru honorer. Ia mengatakan Komisi II DPR RI berkomitmen menyelesaikan persoalan honorer di Indo-

nesia maksimal pada 2025.

Merujuk data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan RB, kurang lebih 1,7 juta orang honorer di Indonesia. Dari jumlah itu, baru 1,3 juta orang honorer yang mengikuti seleksi P3K pada 2024.

"Dan dari 1,3 juta itu ada yang lulus murni, ada yang tidak lulus. Yang tidak lulus pun Komisi II DPR RI meminta kepada pemerintah untuk tetap dijadikan P3K paruh waktu," tukas Rifqinizamy.

Di sisi lain, sebanyak 400 ribu honorer memilih tidak ikut seleksi P3K karena mengikuti seleksi CPNS. Selain itu, adapula kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota tidak menyelenggarakan atau tidak memberikan kuota kepada pemerintah pusat.

"Itu yang akan kami lakukan revisi terha-

gatakan pihaknya juga menerima sebanyak 60 aduan dari masyarakat terkait masalah otonomi daerah. "Tahun ini ada 60, tapi total seluruhnya lebih dari 360 usulan pembentukan provinsi, kabupaten, kota di Indonesia," tukas Rifqinizamy.

Oleh karena itu, Komisi II DPR RI meminta kepada pemerintah untuk segera menyampaikan rancangan peraturan pemerintah terkait dengan desain besar otonomi daerah di Indonesia, yang merupakan kewajiban dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014.

Ia menegaskan dalam beleid itu Mendagri wajib mengonsultasikan rancangan PP ini kepada Komisi II DPR RI.

"PP ini penting untuk kami tahu, kira-kira 10, 20, 50, 100 tahun ke depan jumlah provinsi, kabupaten, kota yang ideal di Indo-



dap undang-undang terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Karena dalam undang-undang tersebut disebutkan, presentase penggajian atau belanja pegawai hanya boleh 30 persen, lebih daripada itu dilarang oleh undang-undang itu," kata Rifqinizamy.

Komisi II DPR RI juga akan memperhatikan mereka yang baru lulus dari perguruan tinggi untuk menjadi aparatur sipil negara. Ke depan, komitmen itu akan direalisasikan lewat revisi terhadap Undang-Undang ASN.

"Saya kira sudah pada tempatnya bukan hanya pelarangan terhadap pengangkatan honorer yang kita lakukan, tapi pemberian sanksi kepada pejabat yang selama ini kerap kali dengan mudahnya mengangkat honorer tanpa adanya sanksi," tutur Rifqinizamy.

Selain itu, Politikus Partai Nasdem men-

nesia itu berapa. Dan alasan-alasan objektif untuk pembentukannya seperti apa," tandas Rifqinizamy.

Hal itu, jelas dia, bertujuan agar pembentukan provinsi, kabupaten, kota tidak diwarnai oleh motivasi politik yang terlalu kental. Bahkan ketika terbentuk provinsi dan kabupaten, kotanya ternyata tidak mampu untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik yang baik.

"Kami juga memberi concern misalnya kepada daerah-daerah otonomi baru di Papua. Daerah otonomi baru di Papua itu sebagian dari daerah otonomi baru di Papua terutama provinsi yang baru dihadirkan. Itu jumlah kabupaten, kota di bawahnya belum lengkap sebagaimana amanah Undang-Undang Pemerintahan Daerah," kata Rifqinizamy. ♦

JADI JUGA PPN NAIK KE12 PERSEN

Indonesia mulai menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dari harga pokok mulai 1 Januari 2025. Semula PPN hanya mencapai 10 dan 11 persen. Dampak utamanya adalah harga yang harus dibayar oleh pembeli, konsumen dikenai tambahan pungutan. Tapi, tidak untuk semua barang dan jasa.



Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara mengumumkan langsung penerapan kenaikan PPN menjadi 12 persen. Sebelumnya, Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu sekitar satu jam pada Selasa petang, 31 Januari 2024.

"Tentang PPN, yang mungkin masih ada suatu keraguan, suatu ketidakpahaman yang tepat sehingga setelah koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan menteri lain lain, saya perlu sampaikan sendiri masalah PPN 12 persen ini," ujar Prabowo di Kantor Kementerian Keuangan, Kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Jadi, kata Prabowo, kenaikan PPN 12 persen ini merupakan amanat Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

"Sesuai kesepakatan pemerintah dengan DPR tahun 2021, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 10 ke 11 persen April 2022. Ini sudah dilaksanakan. Dari 11 ke 12 persen 1 Januari 2025," kata Prabowo.

Ia menjelaskan, kenaikan tarif dilakukan bertahap dari 10 persen, jadi 11 persen pada April 2022. "Ini sudah dilaksanakan. Kemudian perintah undang-undang, 11 ke 12 persen pada 1 Januari 2025, besok. Kenaikan bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat, inflasi dan pertumbuhan ekonomi," kata Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menurut Presiden, penerapan kenaikan tarif PPN secara bertahap ini bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat dan mendorong pemerataan ekonomi.

Presiden pun menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN ini dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yakni barang dan jasa tertentu yang selama ini terkena PPN atas barang mewah. "Contoh, pesawat jet pribadi. Itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan atau digunakan masyarakat papan atas. Kapal pesiar, yacht, motor yacht, rumah yang sangat mewah. Artinya, untuk barang jasa selain tergolong barang mewah tidak ada kenaikan PPN. Tetap sebesar berlaku sekarang, yang sejak 2022," kata Prabowo.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pemerintah pun telah menyiapkan sejumlah insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi mengikuti penetapan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen tahun 2025.

Pemerintah tetap memberikan fasilitas bebas PPN atau PPN tarif 0 persen berkenaan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Barang dan jasa tersebut termasuk bahan kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat se-

teri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pemerintah pun telah menyiapkan sejumlah insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi mengikuti penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen tahun 2025.

Mendekati penerapan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025, penyebaran informasinya memang lebih masal. Toh penerapan jenis pajak itu memang sudah menjadi kesepakatan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN ada-



derhana, rusunami, serta pemakaian listrik dan air minum.

Bagi kelompok rumah tangga berpendapatan rendah, pemerintah memberikan stimulus berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 1 persen dari kebijakan PPN 12 persen untuk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) yakni Minyakita, tepung terigu, dan gula industri, sehingga PPN yang dikenakan tetap sebesar 11 persen. Stimulus Bapokting itu cukup krusial guna menjaga daya beli masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

Dalam kesempatan sebelumnya, Men-

lah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. Kepastian terkait isu kenaikan PPN 12 persen akhirnya dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam konferensi pers yang digelar Rabu, 11 Desember 2024 Bu Menkeu memastikan bahwa barang kebutuhan pokok tidak akan mengalami kenaikan atau tetap dibebaskan dari pengenaan PPN 12 persen pada 1 Januari 2025. "Pada saat PPN 12 persen diberlakukan, barang-barang kebutuhan pokok tetap akan 0 persen

PPN-nya,” kata Sri Mulyani.

Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen memang telah diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pun demikian, pelaksanaannya tetap menjaga asas keadilan. Artinya, kenaikan PPN 12 persen tetap akan dijalankan dengan memperhatikan asas keadilan bagi masyarakat.

Untuk itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah saat ini tengah memformulasikan lebih rinci kenaikan PPN 12 persen, karena kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap APBN. Perlu keseimbangan pada beberapa

asuransi. Tak hanya itu, penjualan buku, vaksinasi, rumah sederhana, pemakaian listrik, dan air minum juga akan tetap dibebaskan dari pengenaan PPN.

Saat ini, barang dan jasa yang disebutkan tadi memang sudah mendapatkan pembebasan tarif PPN sebesar 11 persen. Hal yang sama akan berlaku ketika PPN 12 persen diterapkan.

“Nilai dari barang dan jasa yang tidak dipungut PPN, yang kami sebut sebagai fasilitas, untuk tahun ini diperkirakan mencapai Rp231 triliun. Itu PPN yang tidak dikumpulkan dari barang dan jasa yang

persiapkan secara teliti dan hati-hati. Dan untuk dampaknya terhadap APBN, harus kita hitung secara hati-hati, karena ini adalah kepentingan kita semua,” ucapnya.

Menurut Bu Menkeu, penyesuaian tarif PPN akan dikenakan bagi barang dan jasa yang dikategorikan mewah dan dikonsumsi masyarakat mampu. Barang-barang tersebut di antaranya, kelompok makanan berharga premium, layanan rumah sakit kelas VIP, dan pendidikan yang berstandar internasional yang berbayar mahal.

“Kita juga perlu untuk sedikit memperbaiki agar dalam hal ini azas gotong royong dan keadilan tetap terjaga, yaitu kelompok yang masuk dalam golongan yang dikonsumsi oleh desil 10 yaitu desil paling kaya desil 9-10 kita akan melakukan pengenaan PPN-nya,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin, 16 Desember 2024.

Ia mencontohkan, makanan mewah yang premium seperti daging sapi wagyu atau kobe yang harganya kisaran Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta per kilo. Sementara itu, daging yang dinikmati masyarakat secara umum berkisar antara Rp 150-200 ribu per kilo tidak dikenakan PPN. Untuk sekolah premium, tarif PPN 12 persen akan dikenakan pada sekolah-sekolah yang biaya pembayarannya mencapai ratusan juta.

“Kesehatan yang premium juga akan dikenakan PPN, dan juga PPN untuk pelanggan listrik 3.500-6.600 volt ampere (VA) dikenakan PPN,” jelasnya.

Sedangkan dalam bahan paparan Sri Mulyani dirinci antara lain beberapa contoh barang mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN, kini akan dikenakan PPN.

1. PPN atas Bahan Makanan Premium
 - Beras premium
 - Buah-buahan premium
 - Daging premium (contoh: wagyu, daging kobe)
 - Ikan mahal (contoh: salmon premium, tuna premium)
 - Udang dan crustacea premium (contoh: king crab)

2. PPN atas jasa pendidikan premium
3. PPN atas jasa pelayanan kesehatan medis premium

4. Pengenaan PPN untuk listrik pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA.

Menkeu Ani menjelaskan pertimbangan kebijakan PPN akan dikenakan pada barang-barang mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN karena mayoritas kelompok paling kaya yakni desil 9 dan 10 paling banyak menikmati fasilitas pembebasan PPN ini.

Ia mencatat, masyarakat desil 9 dan



pa aspek yakni keadilan, daya beli, dan juga dari sisi pertumbuhan ekonomi.

Nantinya, pemerintah akan mengumumkan paket kebijakan PPN yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan yang akan dikeluarkan tersebut tidak akan menambah beban pajak pada barang dan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Adapun barang dan jasa yang dimaksud antara lain beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, serta jasa

PPN-nya dinolkan. Tahun depan, kami perkirakan pembebasan PPN itu akan mencapai Rp265,6 triliun,” jelasnya.

Sri Mulyani juga menjelaskan terkait wacana PPN 12 persen yang hanya akan diberlakukan pada barang mewah. Menurutnya, wacana tersebut masih dalam tahap penghitungan dan persiapan. Namun sekali lagi dia menjelaskan bahwa penyusunan kebijakan akan tetap konsisten memperhatikan asas keadilan.

“Di satu sisi ini menyangkut pelaksanaan UU, tapi juga ada sisi asas keadilan. Ada aspirasi masyarakat, tapi juga keadaan dan kesehatan APBN. Kami harus mem-

10 menikmati pembebasan PPN sekitar Rp 41,1 triliun. Sedangkan masyarakat kelompok bawah hanya sedikit menikmati pembebasan PPN. "Ini artinya pembebasan PPN kita kemudian lebih berpihak pada kelompok yang lebih mampu. Oleh Kita juga perlu untuk sedikit memperbaiki agar dalam hal ini asas gotong royong dan keadilan tetap terjaga," tambahnya.

Sedangkan lembaga kajian Center of Economic & Law Studies (CELIOS) memperkirakan, kenaikan PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 berisiko memicu inflasi yang tinggi pada tahun berjalan. Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengemukakan, potensi kenaikan inflasi dapat menambah tekanan ekonomi, khususnya bagi kelompok me-

sumsi masyarakat bawah," ujarnya.

Menurut Bhima Yudhistira, ekonom sekaligus Executive Director Celios, dampak berikutnya dari kenaikan PPN menjadi 12 persen adalah harga peralatan elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor yang ikut naik.

Sedangkan menurut Media Wahyudi, kurang tepat apabila membandingkan kenaikan PPN di Indonesia dengan negara lain seperti Kanada, China, atau Brasil yang menerapkan PPN lebih tinggi. Menurut dia, PPN yang diterapkan di negara dengan pendapatan per kapita tinggi dan ekonomi yang stabil itu tidak berpengaruh daya beli masyarakat. "Jadi, daya beli masyarakat yang kuat memungkinkan pemerintah untuk menetapkan tarif pajak

berkontribusi banyak terhadap penerimaan pajak. "Hal itu terjadi karena efek pelemahan konsumsi masyarakat, omset pelaku usaha akan mempengaruhi penerimaan pajak lain, seperti PPh badan, PPh 21, dan bea cukai," ungkapnya

Sedangkan Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda memprediksi dampak kenaikan tarif PPN pada 2025 justru akan membuat pertumbuhan konsumsi rumah tangga menjadi negatif. "Ketika tarif PPN di angka 10 persen, pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di angka 5 persen-an. Setelah tarif meningkat menjadi 11 persen terjadi perlambatan dari 4,9 persen (2022) menjadi 4,8 persen (2023). Diprediksi tahun 2024 semakin melambat," kata Huda, masih dari sumber yang



nengah ke bawah. "Kenaikan PPN menjadi 12 persen menambah pengeluaran kelompok miskin sebesar Rp 101.880 per bulan, memperburuk kondisi ekonomi mereka," ujarnya.

Sementara itu, kelompok kelas menengah ke atas berpotensi mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp 354.293 per bulan. Menurut Wahyudi, hal ini akan memperburuk fenomena penurunan kelas menengah menjadi kelas menengah rentan.

la juga tak sepenuhnya setuju dengan pernyataan pemerintah terkait semua barang pokok dikecualikan PPN. Wahyudi mengatakan, kebijakan pengecualian tersebut sebetulnya sudah ada sejak 2009. "Kenyataannya, PPN tetap naik untuk hampir semua komoditas yang dikon-

konsumsi yang lebih besar tanpa mengurangi kesejahteraan ekonomi mereka," ucap Media Wahyudi.

Stabilitas ekonomi yang kuat ditandai dengan inflasi rendah dan konsumsi domestik yang kuat membuat penerapan PPN tinggi lebih efektif dan tidak terlalu membebani masyarakat atau menekan pertumbuhan ekonomi. "Masalahnya, di Indonesia, ekonomi masyarakat, khususnya kelas menengah sedang terpukul," katanya.

Jika ingin apple to apple, pemerintah seharusnya membandingkan PPN di Indonesia dengan negara ASEAN lainnya, di mana tarif PPN Indonesia justru menjadi yang tertinggi nomor dua se-ASEAN.

Tambahan pula, Bhima menambahkan, kenaikan PPN 12 persen tidak akan

sama.

Secara penerimaan negara, Huda melanjutkan, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen juga tidak akan memberikan kontribusi yang signifikan. Namun, dampak psikologisnya terhadap daya beli masyarakat dan dunia usaha justru berpotensi lebih besar. Data pertumbuhan pengeluaran konsumen untuk Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) yang hanya naik 1,1 persen. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat masih lemah.

Huda pun mengemukakan,, kenaikan tarif PPN 12 persen hanya akan memperburuk situasi, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana kenyataannya, kita masuk dulu ke 2025. ♦



SIAPKAN JUGA MITIGASINYA

Kenaikan PPN menjadi 12 persen memang dapat dipolitisasi. Yang lebih penting adalah mitigasi dampak negatifnya.

Dalam rangkaian pengumuman kenaikan Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan paket stimulus ekonomi dengan total mencapai

Rp38,6 triliun, setelah kenaikan tarif pajak itu. Presiden menjelaskan bahwa salah satu bentuk paket stimulus yang diberikan kepada masyarakat untuk menjaga daya beli dan mendorong perekonomian, yakni bantuan pangan berupa beras untuk 16 juta penerima.

"Pemerintah telah berkomitmen memberi paket stimulus, nilai stimulus itu adalah Rp38,6 triliun. Seperti yang pernah diumumkan sebelumnya. Bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan 10 kilogram per bulan," kata Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Kemen-



kebijakan bantuan pangan/beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan yang akan diberikan bagi masyarakat di desil 1 dan 2 sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) selama Januari-Februari 2025.

Bagi kelompok rumah tangga berpendapatan rendah, stimulus lainnya yang diberikan berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 1 persen dari kebijakan PPN 12 persen untuk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yakni Minyak, tepung terigu, dan gula industri, sehingga PPN yang dikenakan tetap sebesar 11 persen.

Stimulus Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting itu cukup krusial untuk menjaga daya beli masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.



Pemerintah telah berkomitmen memberi paket stimulus, nilai stimulus itu adalah Rp38,6 triliun.

Presiden Prabowo menekankan barang dan jasa, termasuk kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberikan fasilitas bebas PPN tetap berlaku dengan tarif PPN nol persen.

"Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN nol persen masih tetap berlaku," kata Prabowo Subianto.

Presiden menegaskan bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, seperti kebutuhan pokok, yakni beras, daging, ikan, telur, sayuran, susu segar, air minum, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum dan rumah sederhana, diberi fasilitas pembebasan PPN.

Sementara itu, kenaikan tarif PPN sebesar 12 persen dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yakni barang dan jasa tertentu yang selama ini terkena PPN atas barang mewah. Barang mewah tersebut, kata Presiden, meliputi pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, hingga rumah mewah yang digunakan oleh masyarakat kelas atas.

Menurut Kepala Negara, kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang berpihak pada rakyat. "Saya kira sudah sangat jelas bahwa pemerintah akan terus berupaya

untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan prorakyat," kata Prabowo.

Meski begitu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen. "Jadi, sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo (Subianto), bukan, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya," ujar Deddy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 22 Desember 2024.

Oleh sebab itu, Deddy yang juga anggota Komisi II DPR RI itu menyatakan bahwa sikap fraksinya terhadap kenaikan PPN 12 persen itu hanya meminta pemerintah untuk mengkaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Permintaan itu, bukan berarti fraksi PDIP menolaknya. "Kita minta mengkaji ulang apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji," ungkapnya.

Fraksi PDIP, kata dia, hanya tidak ingin ada persoalan baru yang dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto imbas kenaikan PPN 12 persen tersebut. "Jadi, itu bukan bermaksud menyalahkan Pak Prabowo tetapi minta supaya dikaji dengan baik, apakah betul-betul itu menjadi jawaban dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru, tetapi kalau pemerintah percaya diri itu tidak akan menyengsarakan rakyat silakan terus, kan tugas kita untuk melihat bagaimana kondisi," kata Deddy.

Lebih lanjut, ia juga menyatakan kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12 tersebut melalui pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), bukan atas dasar inisiatif Fraksi PDIP.

Deddy menyebut pembahasan UU tersebut sebelumnya diusahakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode lalu. Sementara, PDIP sebagai fraksi yang terlibat dalam pembahasan, ditunjuk sebagai ketua panitia kerja (panja).

"Jadi, salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah (era Presiden Jokowi) dan melalui Kementerian Keuangan," katanya.

Ia menjelaskan pada saat itu, UU tersebut disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi bangsa Indonesia dan kondisi global dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun, kata Deddy, seiring berjalannya waktu, ada sejumlah kondisi yang membuat banyak pihak, termasuk PDIP me-

keu Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024.

Selain bantuan pangan, Kepala Negara juga menyebutkan bahwa bantuan juga berbentuk pemberian diskon biaya listrik sebesar 50 persen dengan daya listrik terpasang hingga 2.200 VA guna mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

Pemerintah juga memberikan insentif PPh Pasal 21 DTP (Ditanggung Pemerintah) untuk pekerja di sektor padat karya dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan. "Kemudian bebas PPh bagi UMKM beromzet kurang dari Rp500 juta per tahun dan sebagainya. Paket stimulus ini nilainya semua adalah Rp38,6 triliun," kata Presiden.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci, pemerintah merancang

minta untuk dikaji ulang penerapan kenaikan PPN menjadi 12 persen. Kondisi tersebut seperti daya beli masyarakat yang terpuruk, badai PHK di sejumlah daerah hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang saat ini terus naik.

Reaksi datang antara lain dari Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Novita Wijay-

kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen.

"Sejatinya justru mereka (PDIP) yang mengusulkan dan memutuskan, sekarang seolah-olah melempar kesalahan kepada Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo menjadi Presiden baru dua bulan," kata Novita dalam keterangannya yang diterima di Ja-

penting adalah bagaimana bersama-sama mencari solusi untuk meringankan beban rakyat, sambil tetap menjaga keberlanjutan pembangunan dan ekonomi. "Fokus kita sekarang adalah bagaimana menuntaskan tantangan ekonomi yang ada dan memastikan kebijakan ini dapat dijalankan dengan bijaksana demi kepentingan rakyat," katanya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi NasDem Fauzi Amro mengatakan kebijakan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang sebelumnya telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR, termasuk oleh Fraksi PDIP.

Dia menjelaskan UU HPP merupakan hasil kesepakatan bersama yang disahkan melalui Rapat Paripurna DPR pada 7 Oktober 2021. Dalam pembahasannya, Panitia Kerja (Panja) RUU HPP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit.

Untuk itu, Fauzi menilai langkah PDIP mencerminkan sikap yang tidak konsisten karena telah mengkhianati atau mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama antara Pemerintah dan DPR, termasuk Fraksi PDIP yang sebelumnya menyetujui kebijakan tersebut.

"Sikap ini seperti lempar batu sembunyi tangan dan berpotensi mempolitisasi isu untuk meraih simpati publik," tuturnya.

Menurut Ketua DPP Partai NasDem



anti. Ia mengatakan PPN menjadi 12 persen mulai Januari 2025 merupakan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan produk legislasi kolektif antara pemerintah yang dikuasai PDIP dengan legislatif ketika itu. Menurut dia, UU tersebut disahkan pada 2021 dan akan diterapkan mulai Januari 2025, dengan salah satu poinnya terkait

karta, Senin, 23 Desember 2024.

Seharusnya, kata Novita, para peman-gku kepentingan tidak bersandiwara seolah-olah menjadi korban untuk mendapatkan simpati rakyat. Dia pun menyayangkan adanya sikap PDIP yang menolak kenaikan PPN 12 persen yang merupakan hasil kesepakatan bersama.

Menurut Novita, saat ini yang paling



tersebut, kenaikan PPN 12 persen merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan memperkuat penerimaan negara serta mendukung konsolidasi fiskal. Pemerintah juga telah memberikan pengecualian PPN nol persen untuk bahan pokok.

Adapun jenis barang dan jasa PPN nol persen mulai 1 Januari 2025, yakni barang meliputi beras, daging ayam ras, daging sapi, gula pasir, berbagai jenis ikan, telur ayam, cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

Kemudian, jasa yang tidak dikenai PPN 12 persen atau nol persen mulai Januari 2025 terdiri atas jasa pendidikan, layanan kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, rumah susun sederhana milik (rusunami), serta pemakaian listrik dan air minum.

“Langkah ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat,” ucap Fauzi.

Fauzi menyampaikan NasDem mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut sembari meminta pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan agar tidak terjadi distorsi di pasar.

Selain itu, NasDem juga mendorong adanya program kompensasi atau subsidi bagi kelompok masyarakat rentan untuk meminimalkan dampak kenaikan tarif PPN.

Komisi XI DPR pun, kata dia, akan terus memantau pelaksanaan kebijakan tersebut dan berkomitmen membuka ruang dialog dengan Pemerintah serta pelaku usaha untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi rakyat.

Dengan rekam jejak digital yang masih tersedia, Fauzi pun mengingatkan PDIP untuk konsisten dengan keputusan yang telah disepakati dan tidak mempermainkan isu tersebut demi kepentingan politik jangka pendek.

Sedangkan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengemukakan, PDIP merupakan partai yang dari awal mendukung PPN naik menjadi 12 persen, tetapi justru meminta untuk dibatalkan saat kebijakan tersebut akan diimplementasikan. “Berpolitik itu mesti konsisten. Kalau dulu mendukung, ya sekarang mestinya juga mendukung. Kalau ada yang dinilai perlu diperbaiki, silakan ajak para pihak untuk mendiskusikannya. Cari solusi terbaik untuk kepentingan rakyat,” kata Saleh dalam keterangannya, Selasa, 31 Desember 2024.

Saleh menyebut PDIP terkesan mencari simpati dan citra positif dari masyarakat sehingga menyampaikan narasi kritik dan penolakan. Ia juga mengatakan PDIP seperti tidak mau terlibat dalam kenaikan PPN tersebut. “Padahal, kebijakan ini dulu didukung. Bahkan, sudah diatur timeline (linimasa) untuk implementasinya. Nah,

waktunya sudah tiba,” imbuhnya.

Menurut Saleh, sebagai sebuah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 atau UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), kenaikan PPN menjadi 12 persen dinilai harus dilaksanakan.

“Presiden ‘kan disumpah untuk menjalankan seluruh aturan perundang-undangan. Fraksi PAN juga menilai bahwa kebijakan ini berat. Tetapi sebagai bentuk ketaatan pada ketentuan UU negara, PAN tetap mendukung. Sembari dengan itu, dicari jalan yang dapat meringankan masyarakat,” katanya pula.

Saleh meminta PDIP untuk mengikuti aturan yang ada, agar tidak menimbulkan kesan mau benar sendiri dan menyalahkan partai yang lain. Menurut dia, sikap demikian tidak baik untuk kehidupan sosial-politik.

Indonesia, tutur Saleh, sudah memilih demokrasi sebagai jalan politik. Oleh sebab itu, apa pun keputusan politik yang diambil secara demokratis harus dihormati. “Kalau PDIP berada pada posisi oposisi memang selalu begitu. Mereka tahan untuk mengkritik, bahkan sesuatu yang dulu adalah kebijakan mereka,” ucapnya.

Namun begitu, Saleh menjelaskan, kebijakan peningkatan PPN menjadi 12 persen dapat dibatalkan maupun ditunda melalui revisi undang-undang atau melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi. “Silakan hakim yang menilai,” tandasnya. ♦



PAJAK TERMASUK PPN ADALAH INSTRUMEN

Meski sudah disepakati sejak 2021, kenaikan PPN menjadi 12 persen memang memerlukan pemahaman mendalam. Bukan sekadar menjadikannya sebagai wacana politik jangka pendek.

Yang pasti, pajak sebagai instrumen pendapatan negara dapat berubah: bisa naik, turun, atau tetap tarifnya. Dalam hal ini, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan pemerintah bisa memberikan ruang diseksi untuk menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada batas bawah di level

amanat dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang berlaku sejak tahun 2021. Kenaikan PPN sesungguhnya bukan peristiwa yang datang seketika.

"Sebelum 1 April Tahun 2022 tarif PPN berlaku 10 persen. Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 berlaku,

keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024.

Sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI, menurut dia, pemerintah dan DPR sepakat untuk memasukkan asumsi tambahan penerimaan perpajakan dari pemberlakuan PPN 12 ke dalam target pendapatan negara pada APBN 2025. Adapun APBN 2025 telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024.

"Undang-Undang ini disepakati oleh seluruh Fraksi di DPR, dan hanya Fraksi PKS DPR RI yang memberikan persetujuan dengan catatan. Dengan demikian pemberlakuan PPN 12 persen berkekuatan hukum," kata dia.

Dalam pembahasan APBN 2025, dia mengatakan, pemerintah dan DPR juga menyepakati target pendapatan negara dengan asumsi pemberlakuan PPN 12 persen untuk mendukung berbagai program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan program-program strategis.

Di antaranya program makan bergizi gratis yang membutuhkan dana sekitar Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun, pembangunan rumah sakit lengkap di daerah Rp1,8 triliun, pemeriksaan penyakit menular (TBC) Rp8 triliun, renovasi sekolah Rp20 triliun, sekolah unggulan terintegrasi Rp2 triliun, dan lumbung pangan nasional, daerah dan desa Rp15 triliun.

"Saya juga sudah menyampaikan ke publik agar pemerintah melakukan mitigasi risiko atas dampak kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, khususnya terhadap rumah tangga miskin, dan kelas menengah," kata dia.

Sedangkan Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menilai sikap penolakan PDI Perjuangan (PDIP) terhadap kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen hanya politis



lima persen dan batas atas 15 persen bila dipandang perlu, demi mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional.

Dia menjelaskan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen merupakan

maka diatur pemberlakuan kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen per 1 April 2022, dan selanjutnya 1 Januari 2025 tarif PPN menjadi 12 persen. Dengan demikian terjadi kenaikan bertahap," kata Said dalam

belaka.

Sebab, kata dia, PDIP ikut menyetujui Rancangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang mengatur kenaikan PPN 12 persen menjadi undang-undang pada 2021.

"Menurut saya, itu politis saja gitu ya, karena juga kalau melihat ke belakang, ya termasuk para kawan-kawan dari PDIP juga sebetulnya yang menyetujui," kata Hero, panggilan ringkasnya.

Dia juga menyebut tak ingin mencari kambing hitam atas bergulirnya kebijakan kenaikan PPN 12 persen sebab UU HPP merupakan produk legislasi yang telah disepakati oleh DPR bersama pemerintah.

"Saya tidak ingin mencari kambing hitam yang pasti bahwa ini adalah mana undang-undang yang telah diputuskan di gedung DPR, pemerintah bersama

memperlakukan pada kalangan orang yang berkemampuan dan kemudian menggeser, memperkuat, terhadap pembangunan ataupun terhadap program-program pro rakyat," kata anggota Komisi VI DPR RI itu.

Sedangkan Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan tetap ada peluang pemerintah untuk membahas kembali penerapan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen terhadap barang-barang mewah yang akan mulai berlaku pada Januari 2025 bila ternyata memberikan dampak terhadap sektor mikro. "Tapi ternyata (bila) pengenaan (PPN

hingga diputuskan hanya berlaku bagi barang-barang yang masuk kategori mewah.

"Undang-undangnya memang pada 2025 harus naik. Jadi ya itu masalahnya diundang-undang, maka kemudian pemerintah tahu, menyadari itu, maka yang diperlakukan adalah selektif. Apa itu selektif? Pilah-pilih. Apa itu pilah-pilih? Yang dianggap barang mewah saja," ucapnya.

Dia pun menyebut pemerintah saat ini sedang merancang ulang stimulus ekonomi bagi rakyat guna mengantisipasi dampak yang muncul dari kebijakan



Undang-Undang ini disepakati oleh seluruh Fraksi di DPR, dan hanya Fraksi PKS DPR RI yang memberikan persetujuan dengan catatan.

DPR," ucapnya.

Untuk itu, dia menilai yang harusnya diperdebatkan saat ini bukanlah setuju atau menolak kebijakan tersebut, melainkan bagaimana memitigasi dan mengefektifkan kenaikan PPN 12 persen terhadap program-program pro rakyat.

"Ini yang penting menurut saya, supaya betul-betul kita bersama-sama tetap memperkuat fiskal negara karena mendapatkan pendapatan tambahan, tapi pada sisi lain kita juga memperkuat pondasi ekonomi di kalangan tertentu sehingga mampu untuk bisa kita melakukan pengembangan ekonomi yang lebih baik ke depan," tuturnya.

Dia pun menilai penerapan kenaikan PPN hanya untuk kategori barang mewah sudah menjadi bagian perencanaan pemerintah untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan dari kenaikan PPN 12 persen.

"Saya kira ini sudah on the track, Pak Prabowo dengan perencanaan hanya



12 persen) terhadap barang mewahnya ternyata juga masih berdampak kepada hal-hal yang sektor mikro. Ya, sudah kalau itu masih terjadi akan kami sampaikan, akan dibahas," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Desember 2024.

Dia menyebut bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Adapun pemerintah, lanjut dia, menyadari bahwa kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada Januari 2025 itu dapat berimbas pada daya beli masyarakat se-

kenaikan PPN 12 persen tersebut. "Sekarang desain tentang stimulus perekonomian bagi rakyat, sekarang lagi dihitung ulang, nanti akan disampaikan," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa pandangan ataupun keberatan rakyat terhadap kebijakan kenaikan PPN 12 persen pada 2025 itu akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. "Ya, semua kemungkinan pasti akan diambil yang terbaik oleh pemerintah, Pak Presiden Prabowo pasti akan mengambil segala kemungkinan yang terbaik bagi rakyat," tandasnya. ♦

TITIK KRITIS HALAL INDUSTRI RETAILER, MENGAPA HARUS DAN PENTING DISERTIFIKASI?

oleh Junaidi
MUIDigital

Di Indonesia, Sertifikat Halal dirancang khusus untuk produk-produk yang telah memenuhi kriteria kehalalan yang ditetapkan.

Dan, pentingnya Sertifikat Halal tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama dalam membantu konsumen Muslim memilih produk yang sesuai dengan ajaran Islam.

Namun, pertanyaannya muncul yaitu bagaimana dengan jasa retailer yang menawarkan produk non-halal? Apakah mereka juga diwajibkan untuk memiliki Sertifikasi Halal?

Polemik sertifikasi halal retailer semakin mengemuka seiring ketatnya regulasi pemerintah. Alih-alih memberikan kepastian, banyak masyarakat justru salah kaprah.

Sebagian persepsi masyarakat menganggap bahwa memiliki sertifikat halal pada retailer tidak menjamin bahwa semua produk yang dijual telah terjamin kehalalannya.

Di sisi lain, ada juga yang percaya bahwa sertifikasi halal tersebut otomatis menjamin kehalalan semua barang yang tersedia retailer tersebut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan penting dalam menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Sekretaris Komisi Fatwa MUI KH. Miftahul Huda, menjelaskan bahwa MUI bertugas menjaga umat dari produk yang tidak halal.

Dikatakannya, dalam fatwa suatu produk diharamkan karena terdapat najis atau terkena najis (mutanajjis), hal ini kontaminasi najis menjadi salah satu titik kritis dalam jasa retailer. Jika produk terkena najis bisa disucikan dengan air serta bahan pembersih.

Proses pensucian dianggap sukses ditandai dengan hilangnya bau, rasa, dan warna.

Penegasan ini menunjukkan perlunya regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten untuk menjaga integritas pasar halal di Indonesia.

Dia mengatakan, sertifikasi halal pada jasa retailer bukanlah sekadar formalitas, tetapi merupakan tanggung jawab untuk

Muti Arintawati, menegaskan pentingnya sertifikasi halal dalam industri retail. Tidak hanya terbatas pada produk yang ditawarkan, tetapi juga mencakup aspek-aspek operasional yang krusial

Menurutnya Sertifikasi Halal Jasa Retailer tidak hanya mencakup produk, tetapi juga proses penanganan dan fasilitas yang harus memisahkan antara produk halal dan non-halal untuk mencegah kontaminasi," kata dia.

Penjelasan ini menggarisbawahi pentingnya edukasi yang lebih baik kepada masyarakat mengenai arti dan proses sertifikasi halal.

Muti menjelaskan sertifikasi halal untuk jasa retailer mencakup pengelolaan alur bahan atau produk yang harus dijaga agar tidak terkontaminasi najis yang dapat mencemari barang atau produk halal. Aspek ini mencakup berbagai tahapan, termasuk penyimpanan, distribusi (proses penerimaan barang), penanganan, serta penataan produk.

"Artinya, seluruh produk yang bersertifikat halal terjamin tidak terkontaminasi najis hingga sampai di tangan konsumen," tambahnya.

Retailer yang ingin mendapatkan sertifikasi halal harus mengenali dan menangani produknya sesuai standar yang ditetapkan. Ada tiga kategori produk yang perlu penanganan berbeda.

Tiga Kategori Produk dan Penanganannya:

- * Pertama, produk yang jelas halal, seperti buah dan sayur, tidak memerlukan perlakuan khusus.
- * Kedua, produk haram seperti daging babi dan minuman beralkohol harus dipisahkan untuk mencegah kontaminasi dan dilengkapi dengan label yang jelas.
- * Ketiga, produk dengan status kehalalan yang belum pasti, meskipun bebas babi, harus dikelola dengan hati-hati agar tidak mencemari produk halal.

LPPOM mengharuskan retailer untuk memiliki prosedur tertulis yang mencakup semua aspek, mulai dari penerimaan hingga penyimpanan dan pemajangan.

Tanpa adanya prosedur yang jelas, kemungkinan terjadinya kontaminasi produk halal dengan produk non-halal menjadi lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan konsumen. ♦





IKLAN 1 HALAMAN FC
Rp50.000.000



IKLAN BACK COVER FC
Rp75.000.000



IKLAN 1/2 HALAMAN FC
Rp25.000.000

Media yang Tepat Untuk Promosi Usaha Anda

MOESLIM CHOICE

- ADVERTORIAL/INFORIAL (FC)
- IKLAN 1/2 CENTERSPEAD (FC)
- IKLAN 1/2 FACING PAGES (FC)
- IKLAN 1/2 HALAMAN (FC),
- IKLAN ADVERTORIA L/INFORIAL (FC)
- IKLAN CENTERSPREAD (FC), DI LUAR EDISI KHUSUS
- IKLAN COVER 2 (FC)
- IKLAN COVER 3 (FC)
- IKLAN COVER 4 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN DISPLAY (FC), 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 13, 15 & 17 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 3 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 5 (FC) 1 HALAMAN

MANFAAT PLUS BERIKLAN DI MAJALAH MOESLIM CHOICE

- Lebih Akurat dengan Target Pesan Iklan Sesuai dengan Topik Bahasan
- Pilihan Halaman Iklan yang mudah disimak Pembaca
- Harga Iklan Bertabur Diskon



IKLAN CENTER SPREAD FC
Rp80.000.000



CONTACT PERSON: NIKEN

021 - 791 96 781
0896 4369 4121

Email: moeslimchoice@gmail.com



MOESLIMCHOICE

ISSN_2614-2783



Rp 75.000

ILLEGAL
DRILLING
KAWASAN HGU
HINDOLI JADI
SOROTAN

RP20 TRILIUN
ALOKASI
INVESTASI
PADAT KARYA

KABAR
DARI STASIUN
KA CEPAT
KARAWANG

PENGHARGAAN
KEMENDAGRI
UNTUK
KPU



**PPN NAIK
RAKYAT MENJERIT**